

**ANALISIS EFISIENSI ORGANISASI PENGELOLA
ZAKAT DENGAN MENGGUNAKAN DATA
ENVELOPMENT ANALYSIS DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHINYA PERIODE 2010-2014**



Oleh:
Sri Wahyuni
NIM.: 13913060

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2017**

**ANALISIS EFISIENSI ORGANISASI PENGELOLA
ZAKAT DENGAN MENGGUNAKAN DATA
ENVELOPMENT ANALYSIS DAN FAKTOR-FAKTOR
YANG MEMPENGARUHINYA PERIODE 2010-2014**



Oleh:
Sri Wahyuni
NIM.: 13913060

Pembimbing:
M. Bakti Hendrianto, S.E., M.Sc.

TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Ekonomi

**YOGYAKARTA
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wahyuni

NIM : 13913060

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Judul : Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Periode 2010-2014

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Januari 2017

Yang menyatakan,


DPA06AEF096080795

Sri Wahyuni



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 981/PS-MSI/Peng./I/2017


TESIS berjudul : **ANALISIS EFISIENSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
DENGAN MENGGUNAKAN DATA *ENVELOPMENT
ANALYSIS* DAN FAKTOR-FAKTOR YANG
MEMPENGARUHINYA PERIODE 2010-2014**

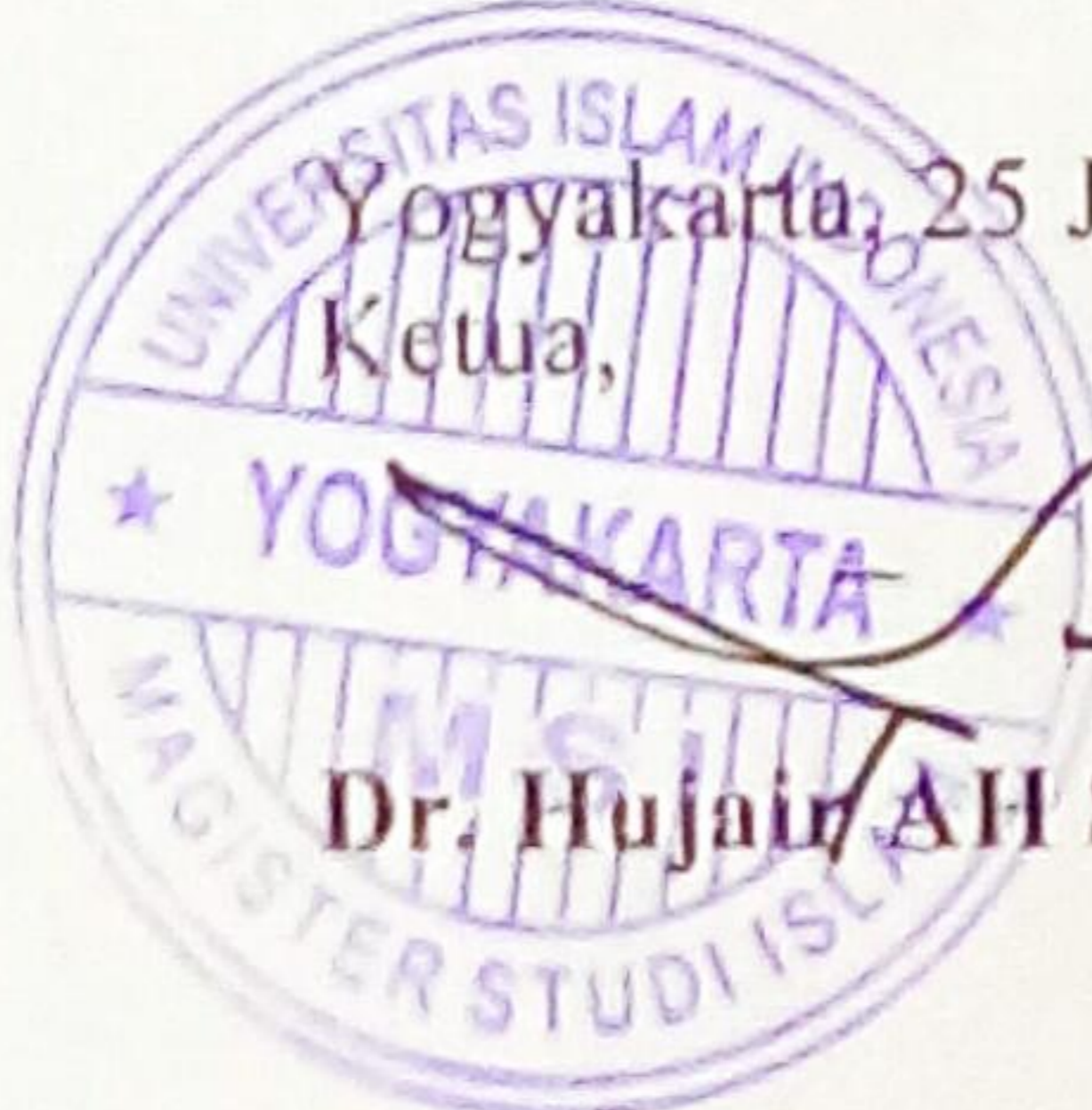
Ditulis oleh : Sri Wahyuni

N. I. M. : 14913060

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ekonomi.

Yogyakarta, 25 Januari 2017
Ketua,

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI





PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1549/PS-MSI/ND/I/2017

TESIS berjudul : **ANALISIS EFISIENSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT DENGAN MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA PERIODE 2010-2014**

Ditulis oleh : Sri Wahyuni

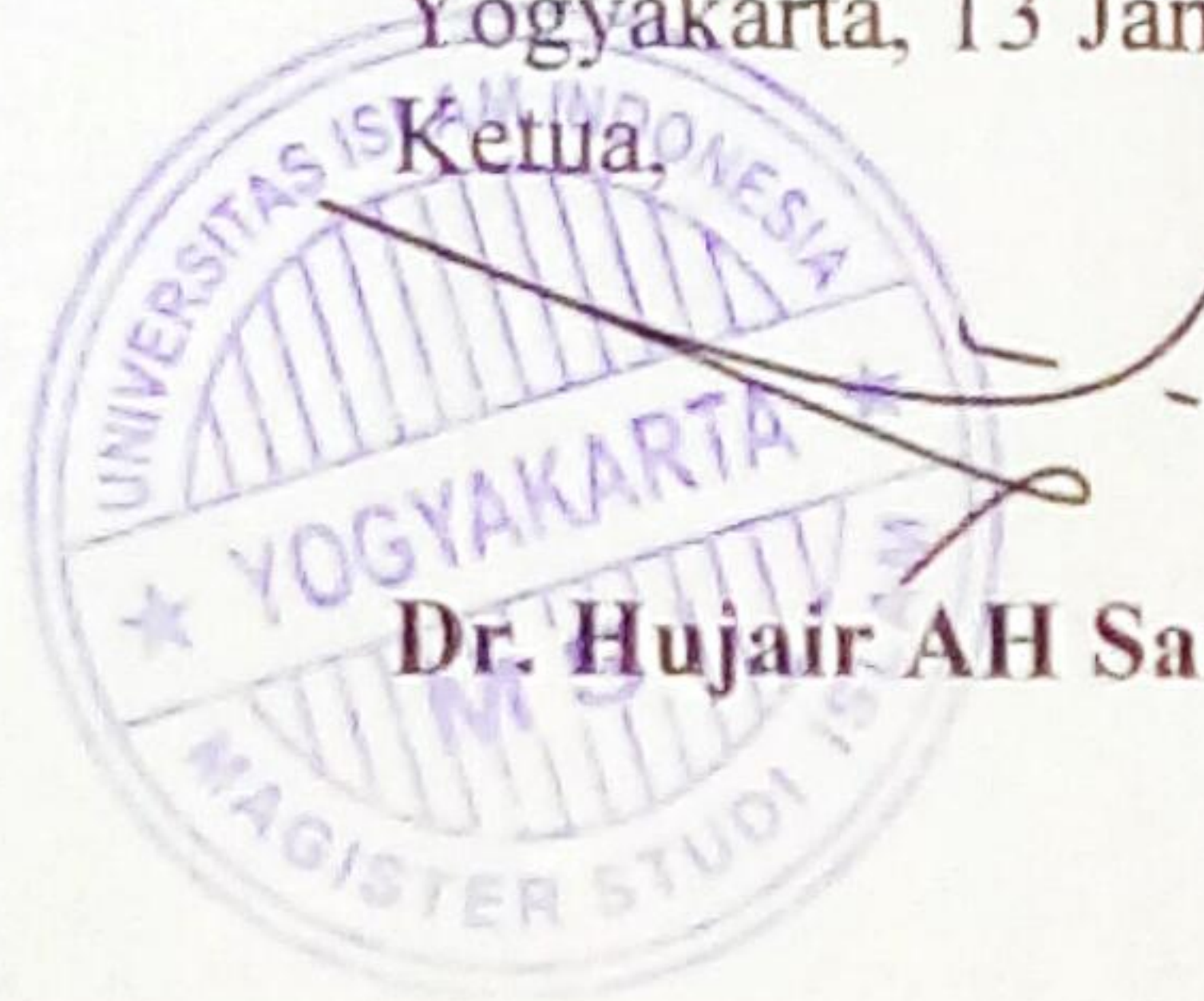
NIM : 14913060

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 13 Januari 2017

Ketua,



Dr. Hujair AH Sanaky, MSI.



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Sri Wahyuni
Tempat/tgl lahir : Ajakkang, 29 Agustus 1989
N. I. M. : 13913060
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **ANALISIS EFISIENSI ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT
DENGAN MENGGUNAKAN *DATA ENVELOPMENT ANALYSIS*
DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA
PERIODE 2010-2014**

Ketua : Dr. Yusdani, M.Ag. (.....)
Sekretaris : Dr. Hujair AH Sanaky, MSI (.....)
Pembimbing : M.B. Hendri Anto, SE., M.Sc. (.....)
Penguji : Dr. Anton Priyo Nugroho, SE., MM (.....)
Penguji : Dr. Rahmani Timorita Y., M.Ag. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 19 Januari 2017

Pukul : 12.30–13.30 WIB

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana MSI UII

Dr. Hujair AH Sanaky, MSI

PERSETUJUAN

Judul : Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola zakat Nasional dengan Menggunakan *Metode Data Envelopment Analysis* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Periode 2010-2014

Nama : Sri wahyuni

NIM : 13913060

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Indonesia.

Yogyakarta, 24 Desember 2016

Pembimbing,



M. Bakti Hendrianto, S.E., M.Sc.

MOTTO

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا
أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴾

dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.'

(QS. Al-An'am: 141)

---oOo---

¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV.Fokusmedia, 2010), hlm. 228

PERSEMBAHAN

Tesis ini Saya Persembahkan Kepada:

- Almamater Universitas Islam Indonesia
- Keluargaku Tercinta
- Keluarga Besar Korps Alumni FoSSEI

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<i>b</i>	-
ت	Ta'	<i>t</i>	-
ث	sa'	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>j</i>	-
ح	ha'	<i>ḥ</i>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<i>kh</i>	ka dan ha
د	Dal	<i>d</i>	-
ذ	zal	<i>ẓ</i>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<i>r</i>	-
ز	Zai	<i>z</i>	-
س	Sin	<i>s</i>	-
ش	Syin	<i>sy</i>	-
ص	sad	<i>ṣ</i>	es (dengan titik di bawah)
ض	dad		de (dengan titik di bawah)

ط	ta'	<i>d</i>	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	<i>ḏ</i>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	<i>ẓ</i>	koma terbalik di atas
غ	gain	‘	-
ف	fa	<i>g</i>	-
ق	qaf	<i>f</i>	-
ك	kaf	<i>q</i>	-
ل	lam	<i>k</i>	-
م	mim	<i>l</i>	-
ن	nun	<i>m</i>	-
و	wawu	<i>n</i>	-
هـ	ha'	<i>w</i>	-
ء	hamzah	<i>h</i>	apostrof
ي	ya	،	-
		<i>Y</i>	

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah*

Semua *ta' marbutah* ditulis dengan *h*, baik berada pada akhir kata tunggal ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata

sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki kata aslinya.

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>
كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

-----◌-----	Fathah	ditulis	<i>A</i>
-----◌-----	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
-----◌-----	Dammah	ditulis	<i>u</i>

فَعَلَ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	Kasrah	ditulis	<i>zukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. fathah + alif	ditulis	<i>A</i>
جاهليّة	ditulis	<i>jahiliyyah</i>
2. fathah + ya' mati	ditulis	<i>a</i>
تَنَسَى	ditulis	<i>tansa</i>
3. Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>

كريم	ditulis	<i>karim</i>
4. Dammah + wawu mati	ditulis	<i>u</i>
فروض	ditulis	<i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

1. fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2. fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لنشكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah* maka ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis sesuai dengan huruf pertama

Syamsiyyah tersebut

السَّمَاء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
الشَّمْس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذَوَالْفُرُوض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

ABSTRAK

Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional Dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analisis Dan Faktor – Faktor Yang Mempengaruhinya Periode 2010 - 2014

Sri Wahyuni

13913060

Tingginya gap antara rasio potensi zakat nasional dan dana zakat yang dihimpun dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satu diantaranya adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah. Hal ini disebabkan tidak semua lembaga zakat mempublikasikan laporan keuangannya dan diaudit secara berkala. Fasilitas, transparansi, dan efisiensi lembaga dalam penyaluran dan pengumpulan zakat menjadi faktor utama dalam preferensi masyarakat untuk menunaikan zakat. Hal ini menandakan perlu dilakukan pengukuran efisiensi kinerja organisasi Pengelola Zakat Nasional dari pendekatan produksi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi Organisasi Pengelola Zakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya pada periode 2010-2014.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif non parametrik yaitu Data Envelopment Analysis untuk mengukur nilai efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional, teknik pengambilan sampel yang dilakukan adalah purposive sampling sehingga dalam penelitian ini hanya terdapat empat OPZ yaitu Dompot dhuafa, Rumah zakat, Baznas, dan PKPU. Data yang digunakan adalah laporan keuangan yang terpublikasikan dari masing-masing OPZ. Setelah memperoleh nilai efisiensi kemudian dilakukan uji korelasi untuk melihat hubungan antara nilai efisiensi dengan rasio jumlah dewan pengawas dan dewan direksi, jumlah kantor cabang, dan besarnya aset.

Hasil penelitian ini memperoleh hasil bahwa Tingkat efisiensi Organisasi Pengelola zakat (OPZ) di Indonesia pada periode 2010 – 2014 menunjukkan suatu trend yang fluktuatif dan masih termasuk ke dalam kategori tidak efisien atau belum optimal dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Secara individu lembaga zakat Dompot dhuafa dan Baznas memiliki tingkat efisiensi rata-rata tertinggi dengan skor efisiensi sempurna selama periode penelitian, sedangkan lembaga zakat Rumah Zakat dan PKPU masuk dalam kategori tidak efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efisiensi Organisasi pengelola zakat di Indonesia, dengan menggunakan metode uji korelasi maka diperoleh hasil Efisiensi memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap aset, dan memiliki korelasi yang kuat terhadap banyaknya jumlah kantor cabang dengan arah koefisien korelasi negatif namun tidak memiliki korelasi sama sekali terhadap rasio dewan pengawas dan dewan direksi.

Kata kunci : Efisiensi, DEA, Organisasi Pengelola Zakat Nasional.

ABSTRACT

Analysis on the Efficiency of National Zakat Management Organization Using the Method of Data Envelopment Analysis and its Determining Factors in the Period of 2010 – 2014

**Sri Wahyuni
13913060**

The high gap between the ratio of the national zakat potency and the collected zakat fund is determined by some parameters; one of which is the low level of public trust. This is because not all zakat institutions have published their financial report and audited their finance periodically. Facilities, transparency and efficiency of the institution in the distribution and the collection of the zakat become the main factor in the preference of public to do the zakat. This then indicates a necessity to do the measurement of the efficiency of work performance of the National Zakat Management Institution from the approach of production. The aim of this research is to analyze the efficiency of the Zakat Management Institution and its determining factors in the period of 2010-2014.

The method used in this research was the nonparametric quantitative method namely Data Envelopment Analysis to measure the value of efficiency of the National Zakat Management Organization. Meanwhile, the technique of collecting data was the purposive sampling. Thus, this research only involved four OPZ: Dompot dhuafa, Rumah zakat, Baznas, and PKPU. The data used was the financial report published from each of OPZ. After obtaining the value of the efficiency, then it was continued by conducting the correlation test to see the correlation between the value of the efficiency and the ratio of the number of the management boards and Board of Directors, number of branch offices and the amount of the asset.

The result of this research showed that the level of the efficiency of the Zakat Management Organization in Indonesia in the period of 2010 – 2014 showed a fluctuated trend and still categorized into inefficient or not optimal in managing the existing resources. Individually, the zakat institution of Dompot Dhuafa and Baznas has the highest average level with the perfect efficiency score in the period of research, while, the zakat institution of Rumah Zakat and PKPU in the category of inefficient. The determining factors of efficiency of zakat management organization in Indonesia, by using the method of correlation test, showed that the result of the efficiency had a quite significant correlation to the asset and had a significant correlation with the number of the branch offices with the negative correlation coefficient but had no correlation with the ratio of the Supervisory Board and Board of Directors.

Keywords: Efficiency, DEA, National Zakat Management Organization

28 December 2016

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ , الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ الْأَنْبَاءِ

وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya dan Sholawat kepada Baginda Rasul saw. sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Menggunakan *Data Envelopment Analysis* dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Periode 2010-2014, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Ekonomi konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selama proses penelitian sampai disusunnya tesis ini tidak lepas dari peranan pihak yang secara langsung atau tidak langsung telah membimbing, mendorong, membantu dan memberikan semangat kepada penulis. Untuk itu, penulis dengan ikhlas ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ir. H. Harsoyo, M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Hujair AH, Sanaky, MA., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Yusdani, M.Ag, selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak M. Bakti Hendrianto, SE., M.Sc selaku Pembimbing tesis yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.

6. Bapak/Ibu Dosen dan segenap civitas akademika Program Pascasarjana Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberi support kepada penulis untuk dapat menyelesaikan studi.
8. Para guru yang telah mengikhhlaskan segenap waktu dan tenaganya untntuk mendidik penulis.
9. Sahabat-sahabat di Program Pascasarjana Magister Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
10. Serta pihak-pihak lain yang turut membantu dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari tesis ini tidaklah luput dari kekurangan, hal itu sejujurnya merupakan keterbatasan kemampuan dan kesempatan yang penulis miliki. Namun demikian, besar harapan agar tesis ini dapat bermanfaat untuk siapa saja yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 5 Januari 2017

Penulis

Sri wahyuni

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN TIM PENGUJI UJIAN.....	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ixx
PEDOMAN TRANSLASI.....	x
ABSTRAK.....	xv
ABSRTACK.....	xvi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTRA GAMBAR.....	xxiv
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1

B. Rumusan Masalah	9
C. Pembatasan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan	11
KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI	13
A. Kajian Pustaka.....	13
B. Landasan Teori.....	21
1. Zakat	21
2. Sejarah Pengelolaan Zakat	29
3. Pengelolaan Zakat Di Indonesia.....	35
4. Pengelolaan Zakat di Dunia Islam Modern.....	47
5. Efisiensi	54
6. Data Envelopment Analysis	79
7. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efisiensi	86
C. Kerangka Berpikir	95
METODE PENELITIAN.....	97
A. Jenis Penelitian.....	97
B. Subyek dan Objek Penelitian.....	98
C. Tempat dan Waktu Penelitian	98

D. Metode Pengumpulan Data.....	98
E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	99
F. Jenis dan sumber data.....	101
G. Teknik Analisis Data.....	101
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	108
A. Deskripsi Data Penelitian.....	108
B. Profil singkat Lembaga Amil Zakat.....	108
1. Rumah Zakat	108
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).....	109
3. Dompot Dhuafa	111
4. Pos Keadilan Peduli Ummat.....	114
C. Perhitungan Efisiensi	115
D. Potensi Perbaikan tingkat Efisiensi Organisasi pengelola zakat (VRS) ..	119
E. Uji Korelasi	124
F. Pembahasan.....	128
PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan	137
B. Keterbatasan Penelitian.....	137
C.Saran	138
DAFTAR PUSTAKA	140

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Gini Ratio	1
Tabel 1.2 Dana Kelola Anggaran Organisasi Pengelola Zakat.....	3
Tabel 1.3 Jumlah Dana Zakat Terkelola Berdasarkan Lembaga Zakat	5
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	19
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan VRS Output Oriented OPZ tahun 2010-2014.	116
Tabel 4.2 Hasil Perhitungan CRS Output Oriented OPZ tahun 2010-2014	117
Tabel 4.3 Rekapitulasi lembaga zakat yang mengalami kinerja Inefisiensi pada tahun 2010-2014.....	120
Tabel 4.4 Data Pencapaian Aktual, Target, dan Potensi Perbaikan Rumah Rakat Indonesia tahun 2010	120
Tabel 4.5 Data Pencapaian Aktual, Target, dan Potensi Perbaikan Rumah Zakat Indonesia tahun 2012	121
Tabel 4.6 Data Pencapaian Aktual, Target, dan Potensi Perbaikan Rumah Rakat Indonesia tahun 2013	122
Tabel 4.7 Data Pencapaian Aktual, Target, dan Potensi Perbaikan PKPU tahun 2010.....	122
Tabel 4.8 Data Pencapaian Aktual, Target, dan Potensi Perbaikan PKPU tahun 2013.....	123

Tabel 4.9 Data Pencapaian Aktual, Target, dan Potensi Perbaikan PKPU tahun 2014.....	123
Tabel 4.10 Uji Korelasi.....	124
Tabel 4.11 Uji Hipotesis Hubungan Y dengan X1	125
Tabel 4.12 Uji Hipotesis Hubungan Y dengan X2	126
Tabel 4.13 Uji Hipotesis Hubungan Y dengan X3	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Efisiensi dengan Orientasi Input	75
Gambar 2.2 Kurva Efisiensi dengan Orientasi Output	77
Gambar 2.3 Grafik Efisiensi CRS dan VRS	83
Gambar 2.4 Kerangka Berfikir.....	95
Gambar 4.1 Hasil perhitungan dengan asumsi VRS output oriented dompet dhuafa selama tahun 2010- 2014	118
Gambar 4.2 Hasil perhitungan dengan asumsi VRS dan CRS output oriented baznas selama tahun 2010- 2014	119
Gambar 4.3 Hasil perhitungan Asumsi CRS dan VRS Rumah Zakat, Dompet dhuafa, Baznas, dan PKPU tahun 2010-2014	129

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang berpenduduk 249,9 juta jiwa dimana tahun 2013 mempunyai Gross Domestic Product (GDP) sebesar US\$ 868,3 milyar. Seperti negara berkembang pada umumnya, kemiskinan dan disparitas pendapatan merupakan masalah yang masih menjadi fokus penyelesaian pemerintah. Tercatat hingga tahun 2013, penduduk miskin masih berjumlah 28.070.000 atau 11.37% dari keseluruhan penduduk. Meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,29%, hal ini tidak diikuti dengan distribusi pendapatan yang baik, indeks gini menunjukkan ketimpangan yang meningkat hingga mencapai 0,413 dari skala tertinggi 1.²

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Gini Rasio

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (juta orang)	Presentase Penduduk Miskin	Indeks Gini
2010	31.02	13.33 %	0.38
Maret 2011	30.02	12.49 %	
Sep-11	29.89	12.36 %	0.41
Maret 2012	29.13	11.96 %	
Sep-12	28.59	11.66 %	0.41
Maret -13	28.07	11.37 5	0.413

Sumber : BPS 2005, diolah

²Badan Pusat statistik, "Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2010-2013", diakses dari <http://www.bps.go.id/linkTabelStatistik/view/id/1494> pada tanggal 23 juli 2016

Pemerintah telah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan ini dengan menggelontorkan dana untuk program penanggulangan kemiskinan sebesar Rp115,5 triliun pada tahun 2013 dengan target penurunan tingkat kemiskinan sekitar 9,5-10,5 persen.³ Namun dari target yang ada, pemerintah hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,29 persen (BPS, 2013). Di sisi lain Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia, mempunyai potensi zakat paling tinggi di dunia. Menurut Hafidhuddin (2013), terdapat 217 triliun rupiah potensi zakat yang ada di Indonesia dan belum semuanya terserap secara optimal. Padahal zakat memiliki banyak manfaat. Manfaat zakat sebagai instrument people to people transfer seharusnya bisa menjadi jalan keluar terbaik untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi (Beik:2009). Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga, di samping mempunyai dimensi vertikal juga mempunyai dimensi horizontal. Zakat adalah sistem keuangan, ekonomi, sosial, politik, moral dan agama sekaligus.⁴

Manfaat zakat dibuktikan dari penelitian Beik yang menyebutkan bahwa zakat mampu mengurangi jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dari Rp 540.657,01 menjadi Rp 410.337,06. Ditinjau dari tingkat keparahan

³Kemenkeu. Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Jakarta:Kementrian Keuangan, 2013).

⁴Qordhawi, Yusuf, "Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan", (Jakarta:Zikrul hakim, 2005). Hlm 94.

kemiskinan, zakat juga mampu mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai dengan penurunan nilai Indeks Sen. Indeks Sen adalah indeks kemiskinan yang menggabungkan pendekatan headcount ratio, income gap ratio, dan koefisien Gini sebagai indikator distribusi pendapatan di antara kelompok miskin. Indeks Sen mengalami penurunan dari 0,46 menjadi 0,33. Nilai indeks Foster, Green, and Thorbecke (FGT) yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan turun nilainya dari 0,19 menjadi 0,11. Kajian ini menjadi bukti bahwa instrumen zakat memiliki potensi yang luar biasa.⁵

Walau potensi zakat di Indonesia termasuk yang terbesar, namun realisasi penghimpunan zakat yang telah dijaring oleh anggota Forum Zakat (FOZ) tidak lebih dari 1% dari potensi yang ada. Dana yang berhasil dihimpun dan dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat anggota FOZ tertera pada tabel 2.

Tabel 1. 2. Dana Kelola Anggota Organisasi Pengelola Zakat

Tahun	Jumlah (Rp Miliar)
2008	486
2009	571
2010	702
2011	738
2012	845

Sumber: (Tempo:2014)

Jumlah dana yang dapat dihimpun dan dikelola Organisasi Pengelola Zakat dari tahun ke tahun selalu bertambah, namun belum mencapai hitungan triliun, padahal seperti yang diungkapkan oleh Hafidhuddin, potensi zakat Indonesia mencapai 217 triliun rupiah. Tingginya gap antara rasio potensi

⁵Beik Irfan Syauqi, "Analisis Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan". *Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Zakat dan Emporing*. (Jakarta:Indonesia Magnificance of Zakat, 2009)

zakat nasional dan dana zakat yang dihimpun dipengaruhi oleh beberapa hal. Hal ini wajar terjadi karena survey PIRAC menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada lembaga zakat pada tahun 2004 hanya 15%.⁶ Tingkat kepercayaan yang rendah ini wajar terjadi jika dari 300 lebih Organisasi Pengelola Zakat yang ada di Indonesia, hanya 19 Organisasi Pengelola Zakat yang terdaftar secara legal dan diakui. Tingkat kepercayaan yang rendah ini menurut artikel IMZ pada tahun 2010 yang menyebutkan bahwa tidak semua OPZ yang ada di Indonesia memiliki laporan keuangan yang transparan serta diaudit secara berkala. Sehingga hal ini akan berakibat pada melemahnya kepercayaan publik, sekalipun pada lembaga yang cukup kredibel. Tidak hanya di Indonesia, di Malaysia faktor organisasi menjadi pendorong utama tingginya tingkat partisipasi zakat. Fasilitas, transparansi, dan efisiensi lembaga dalam penyaluran dan pengumpulan zakat menjadi faktor utama dalam preferensi masyarakat untuk menunaikan zakat.⁷

Dalam perkembangannya banyak Organisasi Pengelola Zakat bermunculan, namun Organisasi Pengelola Zakat pada tingkat nasional yang diakui oleh Ditjen Pajak sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak yang legal hanya ada 19 OPZ, antara lain: Badan Amil Zakat Nasional, Dompot Dhuafa, Lazis Nahdlatul Ulama, LAZ Persis, Lazis Muhammadiyah, BMH Hidayatullah, LAZ LDII, PKPU, Rumah Zakat, LAZ BMM, LAZ BRI, Lazis

⁶ Abidin, Hamid., *Potensi dan Ironi Zakat*. Jakarta:PIRAC, 2008.

⁷ Zamil, Nor Aiza Mohd., Abdul Rahim Abdul Rahman. (2006). *Efficiency of Islamic and Conventional Commercial Banks in Malaysia: A Data Envelopment Analysis (DEA) study*. Malaysia:IIUM

Pertamina, LAZNAS BSM, LAZIS IPHI, BMT ICMI, Lazis Darut Tauhid, YDSF, BAMUIS BNI, dan Lazis Takaful.⁸ Sebagai pengelola dana zakat, efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sangatlah penting. OPZ merupakan lembaga intermediasi bersifat nirlaba. Terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola negara dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dari 19 OPZ yang ada penghimpunan zakat masih didominasi oleh lembaga-lembaga besar. Seperti yang ditunjukkan tabel 3. Pada tahun 2012, dana zakat yang dapat dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat anggota Forum Zakat sebesar 845 miliar rupiah. Sebagian besar dana tersebut masih didominasi oleh OPZ besar. Bahkan Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah hanya dapat mengelola dana sebesar 50 miliar rupiah. Jauh berada di bawah lembaga amil zakat swasta nasional

Tabel 1.3. Jumlah Dana Zakat Terkelola Berdasarkan Lembaga Zakat Lembaga

Lembaga	Dana kelola (Rp Miliar)
Dompot Dhuafa	202
Rumah Zakat	146
PKPU	107
YMB BRI	57
Baznas	50
Lazis Nahdlatul Ulama	0,6

Sumber : Tempo (2014, diolah)

⁸ Rahmayanti, Anisa(2014) Efisiensi Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola Dana Zakat di Indonesia (Studi Kasus: PKPU, Rumah Zakat, dan BAMUS BNI). Skripsi Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah.

Dari fakta-fakta di atas, kinerja Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baik pihak pemerintah maupun swasta menjadi suatu masalah yang perlu diteliti. Kurangnya proporsionalitas dana zakat yang dikelola antar lembaga, terutama Badan Amil Zakat Nasional yang merupakan OPZ milik negara dan Dompet Dhuafa sebagai pengelola dana terbesar. Serta Lazis Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh organisasi masyarakat dengan massa terbanyak yang tersebar hingga kecamatan-kecamatan namun mengelola dana tidak lebih dari 1 milyar pada tahun 2012, Sehingga perlu diketahui bagaimana efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat tersebut dalam penghimpunan dan pengelolaan dana.

Bagi Organisasi Pengelola Zakat milik pemerintah maupun swasta, efisiensi menjadi hal penting. Sehingga semakin efisien suatu Organisasi Pengelola Zakat, maka semakin besar dampak positif pada pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat.⁹ Efisiensi mutlak diperlukan bagi OPZ guna mewujudkan maslahat yang lebih besar bagi umat.

pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki diserahkan langsung kepada mustahiq, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut dengan amil zakat. amil zakat ini lah yang bertugas melakukan sosialisasi kepada masyarakat melakukan penagihan, pengambilan, dan mendistribusikan zakat secara tepat dan benar. lembaga zakat harus

⁹ Iskandar, Tatang., “ Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan pada Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Ummat Yogyakarta Periode Tahun 2004-2008”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2012.

menerapkan sistem pertanggungjawaban yang baik, dengan demikian tata kelola lembaga zakat menjadi faktor penting dalam pengoptimalan sumberdaya yang dimiliki lembaga pengelola zakat.

efisiensi merupakan salah satu instrumen dalam mengukur kinerja lembaga yang memiliki laporan keuangan, dalam hal ini lembaga zakat. pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan input dengan output yang dihasilkan, salah satu metode yang digunakan yaitu non parametrik data envelopment analysis.

Pengukuran efisiensi telah banyak dilakukan untuk menilai kinerja lembaga. Efisiensi sendiri ditinjau dari teori ekonomi, ada dua pengertian efisiensi yaitu efisiensi teknik dan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi mempunyai sudut pandang makro yang mempunyai jangkauan lebih luas dibandingkan dengan efisiensi teknik yang bersudut pandang mikro. Pengukuran efisiensi teknik cenderung terbatas hanya pada hubungan teknis mengubah input menjadi output. Sehingga peningkatan efisiensi teknis hanya memerlukan kebijakan mikro yang bersifat internal, yaitu dengan pengendalian dan alokasi sumber daya yang optimal. Pendekatan dalam pengukuran efisiensi terbagi menjadi tiga yakni rasio, regresi, dan frontier.¹⁰ Pada penelitian rasio, terdapat keterbatasan variabel yang diukur, melihat pendekatan rasio sebagai *"the most critical limitation of the financial ratio is that they fail to consider the multiple input output..."* sehingga pendekatan ini belum mampu menilai

¹⁰Siswadi, Erwinta. Wilson Arafat. "Mengukur Efisiensi Relatif Kantor Cabang LAZ dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)". *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia* tahun 2004, No.1/TH.XXXIII.

kinerja lembaga keuangan secara menyeluruh.¹¹ Sedangkan persamaan regresi hanya menampung sebuah output, sehingga untuk mengukur efisiensi, penelitian ini menggunakan pendekatan frontier jenis non parametrik dengan metode Data Envelopment Analysis. Sehingga semua variabel yang ada pada lapangan dapat diteliti tingkat efisiensi tanpa harus ada distribusi normal pada populasi. Pengukuran efisiensi Organisasi Pengelola Zakat biasa menggunakan pendekatan intermediasi. pendekatan intermediasi adalah pengukuran efisiensi yang mengasumsikan OPZ sebagai lembaga keuangan perantara antara pemilik dana kepada yang membutuhkan dana. Namun di sisi lain, Organisasi Pengelola Zakat tak hanya berperan sebagai lembaga perantara, namun juga diukur dengan bagaimana kemampuan lembaga mengelola uang menjadi sejumlah asset-aset yang dimiliki untuk seperti banyaknya jumlah ambulan gratis, bangunan sekolah, bangunan rumah sakit, serta klinik yang disediakan untuk masyarakat.

Penguatan kapasitas lembaga zakat harus dengan sistem tata kelola yang baik Penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) bagi lembaga pengelola zakat (LPZ) sebagai sarana mewujudkan profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan publik.

Diharapkan penelitian ini mampu mengukur efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat Nasional dari pendekatan produksi. Sehingga dapat diketahui pos-pos operasional yang dapat ditingkatkan efisiensinya dan seberapa besar potensi dana terhimpun dan dana tersalurkan yang dapat dioptimalkan.

¹¹Chu-Fen Li., "Problem in Bank Branch Inefficiency: Management, Scale and Location." *Asian Journal of Management and Humanity Sciences*. 2007, Vol 1, No 4.

Sehingga peneliti tertarik untuk memilih judul “*Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Metode Data Envelopment Analysis dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Periode 2010-2014*”. Dari penelitian mengenai program ini dapat diketahui efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat dengan pendekatan produksi.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat efisiensi Lembaga Amil zakat Nasional dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) pada periode 2010-2014 dengan pendekatan produksi ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi lembaga zakat ?

C. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian ini terfokus dan mendalam maka penelitian ini menitikberatkan pada pengukuran efisiensi keuangan Organisasi Pengelola Zakat yang tergabung dalam Forum Organisasi Zakat nasional (FOZ), dan diambil sample yaitu Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat yang mengelola dana zakat terbesar, diikuti oleh Rumah Zakat, baznas dan PKPU

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan mengetahui tingkat efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan metode Data Envelopment Analysis melalui pendekatan produksi periode 2010-2014.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

a. Secara teoritis

- 1) Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian efisiensi kinerja Organisasi Pengelola Zakat.
- 2) Menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode Data Envelopment Analysis pada lembaga, institusi, maupun bidang-bidang di luar ekonomi, seperti industri, pemerintahan, dan bidang lainnya.

b. Secara praktis

- 1) Sebagai acuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pemerintah di masa yang akan datang, sehingga posisi BAZ dan LAZ yang jelas dapat memudahkan pengelolaan dana zakat masyarakat.
- 2) Sebagai acuan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan OPZ di masa yang akan datang, sehingga dana ZIS dapat dikelola dengan lebih baik efisien.
- 3) Menjadi sumber informasi bagi para donatur maupun calon donatur untuk mengetahui tingkat efisiensi OPZ, yang mempengaruhi tingkat kepercayaan donatur terhadap lembaga.

D. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika ini, penulis hendaknya menjelaskan secara singkat mengenai isi pembahasan dari Tesis ini adalah :

BAB I: Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Latar belakang masalah berisikan informasi yang relevan untuk membantu menemukan pokok permasalahan yang berangkat dari sesuatu yang umum kepada hal yang khusus. Rumusan masalah adalah pernyataan tentang suatu keadaan yang memerlukan pemecahan dan atau memerlukan jawaban akibat dari ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan. Tujuan penelitian merupakan sesuatu yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

BAB II: Kajian Pustaka dan Landasan Teori

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai konsep dan teori yang akan digunakan dalam penelitian yang berkenaan dengan topik tesis. Pada bab ini juga disertakan pembahasan mengenai hasil studi terdahulu untuk dilakukan perbandingan metode penelitian yang digunakan dari berbagai penelitian. Berangkat dari tinjauan pustaka dan landasan teori, kemudian disusunlah hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian

Bab ini mendeskripsikan tentang bagaimana penelitian yang dilakukan akan dilaksanakan secara operasional, terdiri atas variabel penelitian serta

definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis yang digunakan, dasar dan model ekonometrika yang digunakan serta uraian mengenai data yang digunakan.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai hasil dari data yang telah diolah. Hasil dari *output* yang diuji dan dianalisis secara statistik. Hasil analisis tersebut akan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I.

BAB V: Penutup

Sebagai bab terakhir dalam penulisan tesis yang memuat kesimpulan, saran dan implikasi hasil penelitian. Dimana kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Saran merupakan anjuran yang disampaikan kepada pihak yang berkepentingan terhadap hasil penelitian dan yang berguna bagi penelitian selanjutnya. Sedangkan implikasi hasil penelitian menjelaskan kontribusi yang dimungkinkan dari penelitian ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang menjadi acuan dalam melakukan penelitian diantaranya :

Penelitian pertama Norazlina Abdul Wahab, et.al. (2006). *Productivity Growth of Zakat Institutions in Malaysia*¹² Penelitian ini menunjukkan tingkat efisiensi dan produktivitas lembaga zakat pada beberapa daerah di Malaysia yang diukur dengan menggunakan metode Data Envelopment Analysis. Variabel yang diteliti adalah jumlah pegawai dan total pengeluaran sebagai input serta 48 total zakat yang dikumpulkan, jumlah pembayar zakat, dan total dana zakat yang disalurkan sebagai output. Hasil penelitian ini menilai efisiensi rata-rata di Malaysia adalah sebesar 0.990 dengan tingkat efisiensi paling rendah ada di Johor dan tertinggi ada di Kelantan.

Muharram Harjun, (2007) *Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (periode Tahun 2005)*.¹³

Penelitian ini menganalisis nilai efisiensi bank syariah dengan pendekatan intermediasi kemudian membandingkan nilai efisiensinya yang di bagi dalam dalam tiga kelompok yait (bank umum syariah-unit usaha syariah, bank syariaiah

¹²Norazlina Abd. Wahab, Abdul Rahim Abdul Rahman, "Productivity growth of zakat institutions in Malaysia: An application of data envelopment analysis", *Studies in Economics and Finance*, Vol. 29 Iss: 3, tahun 2007 pp.197 – 210.

¹³Harjun Muharam, Rizki Pusvitasari, "Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia Dengan Metode Data Envelopment Analysis (periode Tahun 2005)". *Jurnal Undip*, No.3 Vol.II tahun 2007.

BUMN-Non BUMN, Bank syariah Swasta Nasional Devisa-Non Devisa) penelitian ini menggunakan metode Data Envelopment Analysis, hasil penelitian disepanjang tahun 2005 tercatat hanya 3 bank yang senantiasa dalam kondisi efisien 100 persen yaitu BTN syariah, Niaga Syariah dan permata Syariah. sembilan bank yang lainnya tidak mengalami efisiensi, Bank Syariah Mandiri belum efisien di tahun 2005, setelah pengukuran menggunakan metode DEA, score efisiensi DEA dibandingkan berdasarkan tiga kelompok (bank syariah -Unit usaha Syariah, BUMN-non BUMN bank syariah, devisa-non devisa bank swasta nasional), akhirnya di peroleh hasil bahwa tidak ada perbedaan score efisiensi yang signifikan dalam tiap kelompok, hal ini menunjukkan bahwa efisiensi bank syariah dalam kondisi yang baik di tahun 2005

Nasher Akbar (2009). *Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis*¹⁴ Penelitian ini menganalisis efisiensi sembilan Organisasi Pengelola Zakat Nasional (OPZ). Metode yang digunakan adalah Data Envelopment Analysis dengan asumsi Constant Return to Scale (CRS) dan Variabel Return to Scale (VRS). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan produksi dengan variabel input biaya personalia, biaya sosialisasi dan biaya operasional lainnya. Variabel output yang digunakan antara lain dana terhimpun dan dana tersalurkan, sedangkan Tingkat efisiensi sebesar 94,52%, skala 75%, dan overall 71,27%. Perhitungan efisiensi 9 OPZ pada tahun 2007 dengan asumsi CRS menunjukkan hanya BMM dan Bamuis BNI yang mencapai efisiensi.

¹⁴Nasher Akbar, *Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan pend Pendekatan Data Envelopment Analyti*. TIFBR, No 2 Vol.4, tahun 2009.

Sugiyarti Fatma Laela, (2010). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat*.¹⁵ Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Hasil penelitian ini adalah komposisi dewan pembina tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi OPZ, namun rasio dewan pengawas terhadap dewan pelaksana, semakin efisien suatu OPZ. Demikian juga dengan keberadaan laporan auditor independen akan meningkatkan efisiensi OPZ. Empat variabel independen lainnya yaitu perubahan kompensasi yang dibayarkan kepada pegawai, penerapan program manajemen dan sistem budaya yang efficiency emphasis, struktur kelembagaan OPZ dan ukuran OPZ tidak terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efisiensi

August Wiharyono, (2013). *Efisiensi Lembaga Zakat di Indonesia studi kasus Organisasi Pengelola zakat tahun 2008-2013*.¹⁶ Penelitian ini menganalisis efisiensi organisasi pengelola zakat yang merupakan anggota forum organisasi pengelola zakat, penelitian ini menggunakan pendekatan non parametrik yaitu Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi pengelola zakat yang mengalami skala efisiensi penuh dengan asumsi CRS maupun VRS yaitu Baimus BNI. Sedangkan organisasi pengelola zakat lainnya belum optimal.

¹⁵Sugiyarti Fatma Laela, Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat. *TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, Vol. 5 No.2 Agustus– Desember 2010.

¹⁶August Wiharyono, (2013). *Efisiensi Lembaga Zakat di Indonesia studi kasus Organisasi Pengelola zakat tahun 2008-2013*. Skripsi:Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia

Sandi Kusuma Wardana (2013) *Analisis Tingkat Efisiensi Perbankan Dengan Pendekatan Non Parametrik Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2005-2011)*.¹⁷ Hasil dari penelitian ini menunjukkan Lembaga keuangan memiliki peran penting dalam perekonomian negara-negara berkembang '. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang diperlukan untuk memiliki kinerja yang baik, terutama di lingkungan kompetisi antara bank dan salah satu aspek penting dalam pengukuran kinerja adalah efisiensi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kinerja efisiensi 13 bank komersial Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode penelitian dari tahun 2005 sampai 2011 dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Analisis data yang digunakan adalah analisis metodologi Data envelopment nonparametrik (DEA). Menurut hasil, tingkat efisiensi tidak berubah banyak antara tahun 2005 dan 2011. Skor efisiensi mencapai tingkat atas pada 2011 untuk semua bank. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam efisiensi antara negara yang dimiliki dan bank komersial swasta nasional di Indonesia.

Yohana Diah ekonigrum (2013) *Analisis Efisiensi teknik Perbankan syariah di Indonesia dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) (studi kasus pada 6 bank syariah di Indonesia)*¹⁸ Berdasarkan hasil perhitungan DEA,

¹⁷Sandi Kusuma Wardana (2013) *Analisis Tingkat Efisiensi Perbankan Dengan Pendekatan Non Parametrik Data Envelopment Analysis (DEA) (Studi Pada Bank Umum di Indonesia Tahun 2005-2011)*. *Jurnal Universitas Brawijaya, FEB*.

¹⁸Yohana Diah ekonigrum (2013) *Analisis Efisiensi teknik Perbankan syariah di Indonesia dengan metode Data Envelopment Analysis (DEA) (studi kasus pada 6 bank syariah di Indonesia)*. Thesis, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

ada 2 bank yang menjadi objek penelitian yaitu Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Victoria Syariah dalam kurun waktu 2011 sudah termasuk efisien. Hal ini terlihat dari skor efisiensi yang sudah mencapai 100 persen. 4 bank lain yaitu BCA Syariah, BRI Syariah, Bank Panin Syariah, dan Bank Bukopin syariah dalam kurun waktu 2011 masih belum efisien. Hal ini terlihat dari skor efisiensi yang belum mencapai 100 persen, akan tetapi terdapat 1 bank yang sudah mendekati efisien yaitu Bank Panin Syariah karena dalam 12 bulan hanya 1 bulan saja yang mengalami inefisiensi. Bank yang mengalami inefisiensi paling tinggi adalah BCA Syariah dan BRI Syariah dengan inefisiensi pada 12 bulan selama tahun 2011. Sedangkan Bank Bukopin syariah menyusul dengan inefisiensi 9 bulan selama tahun 2011. Kemudian disusul oleh Bank Panin Syariah yang hampir efisien karena dalam 12 bulan selama kurun waktu tahun 2011 hanya 1 bulan saja yang mengalami inefisiensi

M. Mahbudi Ali dan Ascarya (2014). Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri)¹⁹ Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dengan mengambil studi kasus BMT MMU dan BMT UGT Sidogiri

¹⁹M. Mahbudi Ali, Ascarya, Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil Dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri), *TAZKIA Islamic Finance & Business Review*, Vol. 5 No.2 Agustus–Desember 2010.

Pasuruan tingkat cabang dengan total sampel 50 cabang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Two Stage DEA. Tahap pertama mengukur tingkat efisiensi BMT MMU dan BMT UGT dengan menggunakan DEA. Tahap kedua menguji faktor-faktor internal dan eksternal, yang mempengaruhi tingkat efisiensi BMT MMU dan BMT UGT dengan menggunakan pendekatan Tobit. Hasil penghitungan DEA menunjukkan, efisiensi overall technical BMT MMU (0,84) dan BMT UGT (0,88) pada tahun 2008 masih kurang optimal. Penyebab utama inefisiensi untuk BMT MMU adalah penyaluran pembiayaan, sementara sumber utama inefisiensi BMT UGT adalah penghimpunan dana pihak ketiga yang kurang maksimal. Hasil pengolahan Tobit menunjukkan bahwa kekuatan modal dan ukuran BMT memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap efisiensi overall technical pada dua BMT. Sementara dari sisi eksternal, PDRB perkapita memiliki pengaruh negatif secara signifikan. Adapun pertumbuhan pengangguran, tingkat pendidikan, dan komitmen keberagamaan tidak berpengaruh secara signifikan.

Alfi Lestari, Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Pendekatan Data Envelopment Analysis Dea) (2015)²⁰ Besarnya potensi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lombok Timur diyakini dapat menciptakan keadilan distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. Akan

²⁰ Alfi lestari, Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (Bazda) Pendekatan Data Envelopment Analysis Dea) (2015), *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* , Volume 16, Nomor 2, Oktober 2015.

tetapi, dana ZIS yang terhimpun belum optimal dan masih jauh dari potensi zakat yang ada. Sehingga dibutuhkan optimalisasi potensi zakat, salah satunya diukur dari tingkat efisiensinya. Studi ini bertujuan untuk menganalisis Efisiensi Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan pendekatan intermediasi. Objek yang diteliti adalah laporan keuangan BAZDA Kabupaten Lombok Timur periode 2012-2014. Metode yang digunakan adalah metode Data Envelopment Analysis (DEA) dengan asumsi Constant Return to Scale (CRS). Ada dua variabel yang digunakan dalam studi ini yaitu variabel input dan output. Variabel input yang digunakan adalah dana ZIS yang terhimpun, aktiva tetap dan gaji karyawan. Sementara variabel outputnya adalah dana ZIS yang tersalurkan dan biaya operasional. Hasil studi ini menunjukkan bahwa BAZDA Kabupaten Lombok Timur mengalami efisiensi pada tahun 2012-2014 yaitu sebesar 100 persen. Efisiensi terjadi karena nilai aktual tidak sama dengan nilai target yang ditetapkan oleh DEA

2.1 Ringkasan Penelitian terdahulu.

No	Peneliti	Objek Penelitian	Metodologi	Tujuan
1	Norazlina Abdul Wahab (2007)	Lembaga Zakat yang ada di Malaysia	DEA dengan Asumsi CRS dan VRS dengan Pendekatan Produksi	Menghitung tingkat efisiensi dan produktivitas lembaga zakat pada beberapa daerah di Malaysia
2	Muharram Harjun, Rizki Pusvitasari (2007)	Bank umum syariah-Unit Usaha syariah, Bank Syariah BUMN-Non BUMN, Bank Nasional swasta	DEA dengan pendekatan Intermediasi	menganalisis nilai efisiensi bank syariah

		Devisa-Non Devisa		
3	Nasher Akbar (2009)	<i>Organisasi Pengelola Zakat Nasional</i>	DEA dengan asumsi VRS dan CRS dengan pendekatan produksi	menganalisis efisiensi sembilan Organisasi Pengelola Zakat Nasional (OPZ)
4	Sugiyarti Fatma Laela, (2010)	Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).	Uji Korelasi	menganalisis faktor- faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja efisiensi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ).
5	Augost Wiharyono, (2013).	organisasi pengelola zakat yang merupakan anggota forum organisasi pengelola zakat,	DEA dengan asumsi CRS dan VRS	Menganalisis efisiensi Organisasi pengelola Zakat
6	Mahbudi Ali dan Ascarya (2013)	BMT MMU Dan BMT UGT Sidogiri	DEA dengan pendekatan Intremediasi	Menganalisis efisiensi Bank BMT MMU dan BMT UGT Sidogiri
7	Yohana Diah ekoningrum (2013)	Bank Jabar Banten Syariah dan Bank Victoria Syariah	DEA	Menganalisis Efisiensi Perbankan Syariah
8	Alfi Lestari, 2014	BAZDA Lombok Timur	DEA, pendekatan intermediasi	Menganalisis Efisiensi BAZDA kab. Lombok Timur

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas terdapat titik temu dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada analisis efisiensi, kesamaan yang ada pada penelitian ini adalah variabel yang akan diteliti dan alat analisis yang akan digunakan, namun di sini penulis menambahkan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi sehingga cakupannya lebih luas dari penelitian-penelitian sebelumnya

B.Landasan Teori

1. Zakat

a. Definisi dan Dasar Hukum Zakat

Zakat berasal dari kata az-zakah yang memiliki arti “tumbuh, baik, suci dan berkah”.²¹ Hukum Islam memaknai kata tersebut menjadi dua hal, Pertama, zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan pahala. Kedua, zakat merupakan suatu pembuktian jiwa suci dari kikir dan dosa. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zakat secara etimologi mempunyai arti yang sama dengan, penyucian, berkembang, sedekah, serta membersihkan diri dari dosa dan kekejian.

Secara terminologi, zakat adalah “pemberian sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu, menurut syarat-syarat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya”.²² Selain itu, zakat memiliki arti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian sebagian harta kaum kaya untuk kaum miskin sebagai hak mereka dan bukan derma.²³ Ibnu Taimiyah memiliki pendapat bahwa zakat adalah memberikan bagian tertentu dari harta yang berkembang jika sudah sampai nishob untuk keperluan tertentu. Dasar hukum zakat menurut pemerintah adalah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan

²¹Dahlan, Abdul Aziz., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta:Ictiar Baru Van Hoeve, 1996.

²²DPPTAI, Ilmu Fiqh. Jakarta:DPPTAI, 1983.

²³Bin Baz, Syaikh Abdul Aziz, *Zakat. Indonesia*:Raudhatul Muhibbin, 2009.

zakat menyebutkan bahwa Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dari beberapa pengertian zakat di atas dapat disimpulkan bahwa, zakat adalah sebagian dari harta benda milik kaum mampu yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan harapan dapat memperoleh beberapa kebaikan dan dapat menyucikan jiwa dari sifat kikir. Dengan kata lain, mengeluarkan atau memberikan sebagian harta benda yang sudah mencapai batas minimal (nishab) dan rentang waktu satu tahun (haul) kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq zakat) dengan syarat-syarat tertentu.

b. Subjek Zakat

Zakat adalah ibadah wajib yang manfaatnya langsung dirasakan oleh sesama manusia. Zakat ditunaikan oleh pemilik harta (muzakki) ketika barang-barang yang dimiliki sudah mencapai batas minimal dalam jumlah dan rentang waktu kepemilikan. Harta tersebut disalurkan kepada yang berhak menerima (mustahiq). Muzakki yang wajib menunaikan zakat mempunyai syarat sebagai berikut:

- 1) Muslim. Karena zakat merupakan salah satu rukun Islam maka tidak diwajibkan kepada orang nonmuslim.
- 2) Merdeka. Zakat tidak diwajibkan kepada budak dan hamba sahaya karena hartanya adalah milik tuannya maka tuannyalah yang berzakat untuk budaknya.

- 3) Dewasa (*baligh*). Zakat hanya diwajibkan kepada orang dewasa tidak kepada anak-anak yang belum baligh. Akan tetapi jika anak-anak itu memiliki harta yang sudah sampai nishob dan satu tahun maka walinya atau orang yang mengurusinya wajib untuk mengeluarkan zakat dengan niat untuk anak-anak tersebut.
- 4) Berakal. Orang yang tidak berakal kedudukannya sama dengan anak-anak, maka walinya yang dibebani untuk membayar zakat.

Harta zakat yang telah terkumpul wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka peanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Oleh karena itu zakat disalurkan kepada para mustahik yang terbagi menjadi delapan golongan (*ashnaf*), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Fakir

Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau pun usaha yang memadai, sehingga sebagian besar kebutuhannya tidak terpenuhi, meskipun ia memiliki pakaian dan tempat tinggal.²⁴ Namun jika orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya dikarenakan kemalasannya bekerja padahal ia mempunyai tenaga, maka ia tidak termasuk kedalam golongan fakir.

²⁴ Al-Qasim, Abu Ubaid,. *Ensiklopedi Keuangan Publik (Terj)*. (Jakarta:Gema Insani Press, 2006), hlm.137.

2) Miskin

Miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi ia tidak dapat mencukupinya. Kebutuhan yang dimaksudkan ialah makanan, pakaian dan lain-lain menurut keadaan yang layak baginya. Meskipun antara fakir dan miskin hanya memiliki sedikit perbedaan akan tetapi dalam teknis operasionalnya sering disamakan, yaitu orang yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya.

3) Amil

Amil adalah orang yang melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, baik penarik, pencatat, bendahara, dan pembagi zakat. Allah memberi bagian kepada orang yang mengurus zakat. dari harta zakat. Amil dapat menerima bagian dari zakat hanya sebesar upah yang pantas untuk pekerjaannya.

4) Mualaf

Mualaf adalah orang yang diharapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap islam atau terhalangnya niat jahat orang tersebut terhadap kaum muslimin atau orang yang diharapkan akan ada manfaatnya dalam membela dan menolong kaum

muslimin.²⁵ Para ahli membagi muallaf kedalam dua bagian, antara lain:

a) Yang belum memeluk Islam

- (1) Diharapkan akan beriman kepada Allah dengan diberikan pertolongan kepadanya, sebagaimana nabi telah memberi 100 ekor unta hasil rampasan perang hunain kepada Shafwan ibn Umayyah, yang dengan pemberian itu ia menjadi pengikut islam.
- (2) Mempunyai resiko untuk berbuat jahat, ia diberi bagian dari zakat untuk menahan kejahatan itu.

b) telah masuk Islam

- (1) masih lemah imannya, yang diharapkan dengan pemberian itu maka akan tetap imannya.
- (2) Pemuka-pemuka yang mempunyai sahabat yang sebanding dengan dia yang masih kafir.
- (3) orang islam yang bertempat tinggal di perbatasan, agar ia membela negerinya dari serangan musuh.
- (4) orang islam yang diperlukan untuk menarik zakat dari mereka yang tidak mau memberi, jika tidak dengan perantara orang itu.

3) Riqab (hamba sahaya)

Riqab adalah budak yang akan membebaskan dirinya dari tuannya, dalam pengertian ini tebusan yang diperlukan untuk membebaskan orang Islam yang di tawan oleh orang-orang kafir.

²⁵Qordhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangu Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta:Zikrul Hakim, 2005), hlm. 97

Untuk membebaskan harus menebusnya dengan sejumlah uang kepada tuannya, maka ia berhak mendapatkan pembagian zakat, hal ini merupakan salah satu cara di dalam Islam untuk menghapuskan perbudakan.

Cara untuk membebaskan budak bisa dilakukan dengan menolong budak mukhatab yaitu budak yang telah melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan tuannya, bahwa ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu untuk membebaskan.

4) Gharim

Al-Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang bertumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang kemudian tidak mampu untuk membayar hutangnya. Maka dengan zakat diharapkan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh hutangnya. Para ulama membagi gharimin menjadi dua macam, pertama, orang yang berhutang untuk kemaslahatan dirinya dan keluarganya, dan yang kedua, orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang lain atau kepentingan umum. Dengan demikian gharimin di beri bagian zakat sekedar untuk melunasi hutangnya.²⁶

5) Fi-Sabilillah

Fi-Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah, tanpa memperoleh gaji atau imbalan. Dalam pengertian yang sangat luas fi-

²⁶ Zuhri, Muh., *Hukum islam dalam Lintasan Sejarah.*, (Jakarta:PT Raya Grafindo Persada, 2002), hlm,189

Sabilillah juga diartikan dengan berdakwah, berusaha menegakkan hukum Islam dan membendung arus pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Dengan demikian definisi jihad tidak hanya terbatas pada kegiatan ketentaraan saja.

6) Ibn as-Sabil

Ibn as-Sabil adalah orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan tidak dapat mendatangkan uang dari rumahnya. Orang tersebut diberi zakat hanya sekedar untuk sampai pada tujuan yang dimaksud. Ibn as-Sabil dapat memperoleh bagian zakat apabila benar-benar membutuhkan uang zakat, artinya tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk kembali ke daerahnya, dan tidak sedang dalam perjalanan maksiat, dan tidak mendapatkan orang yang memberi pinjaman pada saat meneruskannya.²⁷

c. Objek Zakat

Salah satu rukun Islam adalah zakat, yang terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Setiap muslim yang telah memenuhi syarat menjadi subjek zakat wajib menunaikan zakat fitrah pada bulan Ramadhan dengan objek zakat kebutuhan pokok sebesar 5 mud atau kurang lebih 2,5 kilogram. Sedangkan untuk zakat maal, Tidak semua golongan mempunyai kewajiban untuk menunaikan zakat, begitupun dengan harta. Tidak semua harta wajib dizakati. Zakat hanya ditunaikan oleh pemilik

²⁷Ash- Shiddieqy, Muhammad Hasbih, Koleksi hadist-hadist Hukum 7. (Jakarta:Pustaka Rizki Putra, 2001), hl.84.

harta (muzakki) ketika barang-barang yang dimiliki sudah mencapai batas minimal dalam jumlah dan rentang waktu kepemilikan..

Pengelompokkan harta yang wajib dizakati menurut undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 4 ayat 1 dan 2, antara lain:

- 1) emas, perak dan uang
- 2) perdagangan dan perusahaan
- 3) Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
- 4) Hasil pertambangan
- 5) Hasil peternakan
- 6) Hasil pendapatan dan jasa
- 7) Rikaz

Menurut Muhammad, zakat wajib dikeluarkan apabila telah memenuhi dua syarat, antara lain:

- 1) Harta telah mencapai nishab. Nishab adalah batas minimal harta yang wajib dizakati.
- 2) Harta yang wajib dizakati telah mencapai haul. Haul adalah jangka waktu kepemilikan harta yang mencapai setahun.²⁸

d. Tujuan Zakat

Sementara itu, al-Qardhawi mengatakan bahwa tujuan mendasar ibadah zakat itu adalah untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Sistem distribusi zakat merupakan solusi terhadap persoalan-persoalan tersebut dengan

²⁸Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Proses Perkembangan di Indonesia*. (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2005) hlm. 78

memberikan bantuan kepada orang miskin tanpa memandang ras, warna kulit, etnis, dan atribut-atribut keduniawian lainnya.²⁹ Sebagai ibadah yang berdimensi ketuhanan dan kemanusiaan, zakat mempunyai beberapa tujuan. Menurut Abbas, beberapa ulama menjelaskan tujuan dari ajaran zakat yaitu untuk kehidupan individu dan untuk kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan yang pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengobati hati dari cinta dunia, mengembangkan kekayaan batin, serta menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia. Dengan ungkapan lain, esensi dari semua tujuan ini adalah pendidikan yang bertujuan untuk memperkaya jiwa manusia dengan nilai-nilai spiritual yang dapat meninggikan harkat dan martabat manusia melebihi martabat benda, dan menghilangkan sifat materialisme dalam diri manusia.

2. Sejarah Pengelolaan Zakat

Islam turun ke dunia sebagai *rah}matan lil 'a lamin*. Salah satu misi Islam adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Ajaran *zakat* dalam Islam adalah simbol kepedulian sosial terhadap kesenjangan ekonomi, perhatian atas fenomena kemiskinan, dan cita-cita akan kesejahteraan umat. Melalui *zakat*, Islam tidak akan membiarkan kemiskinan merajalela dan menjamur di atas pentas sejarah hidup manusia. Berikut ini adalah gambaran historis bagaimana pengelolaan zakat sebagai salah satu ajaran Islam yang bervisi

²⁹ Qordhawi, Yusuf, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Jakarta:Zikrul Hakim, 2005), hlm. 158

pengentasan kemiskinan dijalankan dengan baik.

a. Sejarah pengelolaan zakat pada masa Nabi Muhammad

Peradaban islam adalah cermin kultural dari kalangan elit yang dibangun dengan kekuatan-kekuatan ekonomi, peradaban islam terbentuk berkat penaklukan bangsa arab selama delapan tahun masa pertempuran. Nabi Muhammad saw. berusaha meraih kekuasaan atas suku-suku dalam rangka menundukkan Mekah. Sejumlah utusan dan duta dikirim ke seluruh penjuru Arabia. Sementara suku -suku bangkit untuk menyampaikan kesetiaan, membayar zakat dan pajak, sebagai simbol keanggotaan dalam komunitas muslim dan simbol menerima Muhammad sebagai Nabi dan Utusan Allah swt.³⁰

Ulama berpendapat bahwa adanya porsi zakat yang diperuntukkan bagi Amil merupakan suatu indikasi bahwa zakat sewajarnya dikelola oleh lembaga khusus zakat atau yang disebut dengan Amil bukan oleh individu muzakki sendiri. Rasulullah SAW pernah mempekerjakan seorang pemuda dari Suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat Bani Sulaim. Pernah pula mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Muaz bin Jabal pernah diutus Rasulullah SAW pergi ke Yaman, disamping bertugas sebagai da'i, juga mempunyai tugas menjadi amil zakat. Menurut Yusuf Al-Qardawi, Nabi SAW telah mengutus lebih dari 25 Amil ke seluruh pelosok Negara dengan memberi perintah untuk

³⁰Lapidus, Ira. M, *Sejarah Sosial Ummat Islam*, terj. Ghufron A. as'adi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005) hlm 89.

pengumpulan sekaligus mendistribusikan zakat sampai habis sebelum kembali ke madinah³¹

Pembukuan zakat juga dipisahkan dari pendapatan Negara lainnya, pencatatan zakat juga dibedakan antara pemasukan dan pengeluaran, di mana keduanya harus terinci dengan jelas, meskipun tanggal penerimaan dan pengeluaran sama. Selain itu, Nabi SAW berpesan pada para amil agar berlaku adil dan ramah, sehingga tidak mengambil lebih dari apa yang sudah ditetapkan dan tidak berlaku kasar baik pada muzakki maupun mustahiq. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa pada zaman Nabi SAW pengelolaan zakat bersifat terpusat dan ditangani secara terpusat, namun demikian pengelolaan zakat pada saat itu secara institusional dapat dianggap sederhana dan masih terbatas dengan sifatnya yang terlokasi dan sementara, di mana jumlah zakat yang terdistribusi akan tergantung pada jumlah zakat yang terkumpul pada daerah atau kawasan tertentu, dan uang zakat yang terkumpul langsung didistribusikan kepada para mustahiq tanpa sisa.³²

Dalam bidang pengelolaan zakat Nabi Muhammad saw. memberikan contoh dan petunjuk operasionalnya. Manajemen operasional yang bersifat teknis tersebut dapat dilihat pada pembagian strukturamil zakat, yang terdiri dari: (1) Katabah, petugas yang mencatat para wajib

³¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Modul penyuluhan Zakat*, Jakarta, 2013, hlm

³²Ibid., hlm. 123.

zakat, (2) Hasabah, petugas yang menaksir, menghitung zakat, (3) Jubah, petugas yang menarik, mengambil zakat dari para muzakki, (4) Khazanah, petugas yang menghimpun dan memelihara harta, dan (5) Qasamah, petugas yang menyalurkan zakat pada mustahiq (orang yang berhak menerima zakat)³³

Dalam praktiknya, Nabi tidak membagi rata hasil zakat yang terkumpul kepada delapan kelompok tersebut. Nabi membagi sesuai kebutuhan. Maka konsekuensinya, ada salah satu kelompok yang tidak memperoleh zakat karena persediaan zakat di alokasikan kepada kelompok lain yang lebih membutuhkan. Dengan demikian, sistem distribusi zakat pada masa Rasulullah diatur secara proporsional dan kondisional disesuaikan dengan tingkat kebutuhan mustahiq zakat.

b. Zakat pada masa sahabat

Pada periode ini terjadi sebuah peristiwa penting yang menyangkut zakat, Setelah Rasulullah SAW wafat, banyak kabilah-kabilah yang menolak untuk membayar zakat dengan alasan bahwa zakat merupakan perjanjian antara mereka dan Nabi SAW, sehingga setelah beliau wafat maka kewajiban tersebut menjadi gugur. Abu Bakar yang menjadi khalifah pertama penerus Nabi SAW memutuskan untuk memerangi mereka yang menolak membayar zakat dan menganggap mereka sebagai orang murtad. Perang ini kemudian terkenal dengan sebutan *Harbu Riddah* atau perang melawan pemurtadan. Perang ini

³³Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 78

tercatat sebagai perang pertama di dunia yang dilakukan sebuah Negara demi membelah kaum miskin atas orang kaya.³⁴

Setelah wafatnya Abu Bakar dan dengan perluasan wilayah Negara Islam yang mencakup dua kerajaan besar pada masa tersebut yaitu sebagian kerajaan Romawi (Syria, Palestina, dan Mesir) dan seluruh kerajaan Persia termasuk Irak, ditambah dengan melimpahnya kekayaan Negara pada masa khilafah, telah memicu adanya perubahan pada system pengelolaan zakat. Kedua faktor tersebut mengharuskan terjadinya institusionalisasi yang lebih tinggi dari system pengelolaan zakat. Perubahan ini tercermin secara jelas pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Umar mencontoh sistem administrasi yang diterapkan di Persia, di mana sistem administrasi pemerintahan dibagi menjadi delapan provinsi, yaitu Mekkah, Madinah, Syiria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina dan Mesir. Umar kemudian mendirikan apa yang disebut dengan *Al-Dawawin* yang sarna fungsinya dengan *Baitul Maal* pada zaman Nabi SAW di mana ia merupakan sebuah badan audit Negara yang bertanggung jawab atas pembukuan pemasukan dan pengeluaran Negara. *Al-Dawawin* juga diperkirakan mencatat zakat yang didistribusikan kepada para mustahiq sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengembangan yang dilakukan Umar terhadap Baitul Maal merupakan kontribusi Umar kepada dunia Islam. Pada masa Umar pula system pemungutan zakat secara langsung oleh Negara, yang dimulai

³⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Modul penyuluhan Zakat*, (Jakarta, 2013), hlm. 67.

dengan pemerintahan Abdullah bin Masud di Kufah di mana porsi zakat dipotong dari pembayaran Negara. Meskipun hal ini pernah diterapkan pada Khalifah Abu Bakar, namun pada masa Umar proses pengurangan tersebut menjadi lebih tersistematis.³⁵

Pengelolaan zakat pada masa ‘Usman dibagi menjadi dua macam: (1) *Zakat al-amwal az-zahirah* (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan (2) *Zakat al-amwal al-batiniyah* (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniagaan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk *self assessment*³⁶

Periode ‘Ali ibn Abi Talib ra. Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah ‘Ali ibn Abi Talib ra. berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, ‘Ali ibn Abi Talib ra. tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintahan dan agama. Ketika ‘Ali ibn Abi Talib ra. bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus

³⁵Ibid., hlm. 75.

³⁶Hadi Sjechul Permono, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 131.

ditanggung oleh Baitul Mal. Khalifah ‘Ali ibn Abi Talib ra. juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para mustahiq (delapan golongan yang berhak menerima zakat).³⁷

3. Pengelolaan Zakat Di Indonesia

a. Masa kerajaan Islam

Menurut cendekiawan muslim Indonesia Masdar F Mas’udi Zakat pada mulanya adalah “upeti” dalam bahasa Muhammad Rasullullah yang orab itu sesaji udihiyah, juga terdapat lembaga “upeti” atau apa saja orang menyebutnya. Islam datang bukan untuk membrangusnya atau membuat lembaga sejenis sebagai pesaing atau alternatifnya, Ia hanya ingin lembaga upeti yang telah membangkai dan membuat kesengsaraan orang banyak di mana-mana itu dapat ditransformasikan, bahkan bisa ditransubtansikan, justru untuk menegakan kesejahteraan orang banyak. Dalam perkembangannya, upeti secara nyata telah membuat yang miskin terus tenggelam dalam kemiskinannya, sementara yang kaya para pengusaha dan segenap kerabat serta kaki tanganya terus memambung keatas mengikuti kecenderungan nafsu dan keinginannya, kini keadan harus di balik, dengan sepirirt “Zakat” lembaga upeti justru manjadi sarana yang efektif agar kekayaan dan fasilitas kehidupan bisa diatus sedemikian rupa, tidak hanya melingkar-melingkar di antra kelompok tertentu saja, dengan sepirirt “Zakat” lembaga upeti yang semulanya

³⁷ Qodir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 82.

menjadi sumber kezhaliman harus di transformasikan menjadi wahana keadilan.³⁸

“Zakat” sebagai konsep keagamaan, di satu pihak, dan “pajak” sebagai konsep keduniawian, di pihak lain, bukanlah hubungan dualisme yang dikotomis melainkan hubungankeesaan wujud yang dialektis. Zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan, diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan “pajak”, melainkan justru merupakan sesuatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa dengan raga. “Zakat” merasuk ke dalam “pajak” sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan “pajak” memberi bentuk pada “zakat” sebagai badan atau raga bagi proses pengejewantahannya.³⁹

Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang, dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang, atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan penghidupan warganya. Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di masjid-

³⁸Mas’udi, Masdar F., *Agama Keadilan (Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam)*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1991), hlm. 76.

³⁹Ibid., hlm 83.

masjid. Seorang imam dan kadi (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.⁴⁰

b. Masa Kolonialisme

Ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan penjajahan Barat dahulu, zakat berperan sebagai sumber dana bagi perjuangan kemerdekaan tersebut. Setelah mengetahui fungsi dan kegunaan zakat yang semacam itu, Pemerintah Hindia Belanda melemahkan sumber keuangan dan dana perjuangan rakyat dengan cara melarang semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi mengeluarkan zakat harta mereka. Kebijakan Pemerintah Hindia Belanda ini menjadi batu sandungan dan hambatan bagi terselenggaranya pelaksanaan zakat.⁴¹

Wacana keislaman pada masa penjajahan tidak bisa mengesampingkan nama Dr. C. Snouck Hurgronje yang merupakan Penasehat Urusan Pribumi dan Islam. Data mengenai praktek filantropi Islam sebagian besar didapat tulisan dan surat-surat Snouck yang ditujukan kepada Gubernur Jenderal atau pejabat daerah (Bupati,

⁴⁰Azra, Azyumardi, *"Filantropi dalam Sejarah Islam di Indonesia"* dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat & Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), hlm 131.

⁴¹Daud Ali, Muhammad, *"Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf"*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm 80.

Residen, Asisten Residen) di bawah Hindia Belanda. Dengan nasehat-nasehatnya, Sonuck adalah tokoh yang paling berpengaruh dalam memutuskan kebijakan kolonial terhadap bentuk pengelolaan kas masjid yang didapatkan melalui zakat dan biaya pemikahan serta Zakat. Dalam pelaksanaan ajaran agama Islam (termasuk zakat) diatur dalam Ordonantie Pemerintah Hindia Belanda. Nomor 6200 tanggal 28 Pebruari 1905. Dalam peraturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam dan bentuk pelaksanaannya sesuai syari'ah Islam. Pemerintah Hindia Belanda mengedarkan larangan tegas tertanggal 18 Agustus 1866 nomor 216 untuk menghapus semua campur tangan pemerintah daerah atas pungutan sukarela keagamaan.⁴²

c. Masa Awal kemerdekaan

Pada awal kemerdekaan Indonesia, pengelolaan zakat tidak diatur pemerintah dan masih menjadi urusan masyarakat. Kemudian pada tahun 1951 barulah Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran Nomor : A/ VIV 17367 tanggal 8 Desember 1951 tentang Pelaksanaan Zakat Fitrah. Pada tahun 1964 Kementerian Agama menyusun Rancangan Undang-undang tentang Pelaksanaan Zakat dan Rancangan Peraturan Pemerintah mengganti Undang-undang tentang Pelaksanaan

⁴²Kementerian Agama Republik Indonesia, "*Standarisasi Amil Zakat Indonesia*", Jakarta, 2013

Pengumpulan dan Pembagian Zakat serta Pembentukan Baitul Maal, tetapi kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat maupun kepada Presiden.

Kendatipun Negara Republik Indonesia tidak didasarkan pada ajaran suatu agama, namun falsafah negara kita dan pasal Undang-undang dasar negara republik Indonesia memberikan kemungkinan kepada pejabat-pejabat negara untuk membantu pelaksanaan pemungutan zakat dan pendaya gunanya, perhatian pemerintah terhadap lembaga zakat ini secara kualitatif, mulai meningkat pada tahun 1986, pada tahun itu pemerintah mengeluarkan peraturan menteri Agama nomor 4 dan Nomor 5/1968, masing masing tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan pembentukan Baitul Mal (Balai harta kekayaan) di tingkat pusat, propinsi dan Kabupaten.⁴³

d. Masa Orde baru

Pada masa orde baru presiden Suharto memberikan angin segar, menteri keuangan pada waktu itu, dalam jawabannya kepada menteri Agama menyatakan bahwa peraturan zakat tidak perlu dituangkan dalam undang-undang, cukup dengan peraturan menteri Agama saja, Dengan dipelopori oleh pemerintah Daerah DKI Jaya yang pada waktu itu dipimpin oleh Gubernur Ali Sadiki, berdirilah di Ibukota badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Bazis) pada tahun 1968. Di berbagai tingakat propinsi setelah itu berdiri pula badan serupa yang dipelopori oleh pejabat

⁴³ Daud Ali, Muhammad, “ *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*“, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm, 96.

atau unsurpemerintah setempat dengan dukungan para ulama dan pemimpin islam atau sebaliknya, dengan demikian terbentuklah Badan Amil Zakat yang bersifat semi pemerintah. Umumnya melalui surat keputusan gubernur. Kini dikenal Bazis atau Baz di Aceh (1975), Sumatera Barat (1973), Sumatra Selatan lampung (1975), DKI Jaya (1968), Jawa Barat (1974), Kalimantan Selatan (1977), Kalimantan Timur (1972) Sulawesi utara, Sulawesi Selatan (1985) dan Nusa Tenggara Barat.⁴⁴

Perkembangan zakat pada masa Orde Baru ini tidak sama di setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahapan konsep atau baru ada di tingkat kabupaten seperti Jawa Timur. Atau ada pula yang hanya dilakukan oleh Kanwil Agama setempat. Karena itulah, mekanisme penarikan dana oleh lembaga zakat ini bervariasi. Di Jawa Barat hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di DKI Jaya terjadi pengumpulan zakat, ditambah dengan infaq dan shadaqah. Dan di tempat-tempat lain masih meniru pola pada masa awal penyebaran Islam, yakni menarik semua jenis harta yang wajib dizakati.⁴⁵

Pada tahun 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang menugaskan seluruh jajaran Departemen Agama untuk membantu lembaga-lembaga keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq

⁴⁴ Ibid., hlm 102.

⁴⁵ Dawam Raharjo, *"Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam"*, Bandung: Mizan, 1987), hlm. 213.

dan shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan lain-lain, Pada tahun 1991 telah dikeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah. Dalam SKB tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah yang disingkat BAZIS yang dibentuk di tingkat provinsi sampai tingkat desa/kelurahan. SKB tersebut ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Instruksi ini ditujukan kepada jajaran Departemen Agama untuk membina secara teknis tugas-tugas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Kemudian SKB tersebut juga ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah. Instruksi ini ditujukan kepada jajaran Departemen Dalam Negeri untuk membina secara umum tugas-tugas Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.⁴⁶

e. Masa Reformasi

Terbentuknya Kabinet Reformasi memberikan peluang baru kepada umat Islam, yakni kesempatan emas untuk kembali menggulirkan wacana RUU Pengelolaan Zakat yang sudah 50 tahun lebih diperjuangkan. Komisi VII DPR-RI yang bertugas membahas RUU tersebut. Penggodokan RUU memakan waktu yang sangat panjang, hal

⁴⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Standarisasi Amil Zakat Indonesia*”, Jakarta, 2013

itu disebabkan perbedaan visi dan misi antara pemerintah dan anggota DPR. Satu pihak menyetujui apabila persoalan zakat diatur berdasarkan undang-undang. Sementara pihak lain tidak menyetujui dan lebih mendorong supaya pengaturan zakat diserahkan kepada masyarakat, Pada tahun 1999 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berusaha memajukan kesejahteraan sosial dan perekonomian bangsa.⁴⁷

Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus bagi mustahiq delapan asnaf. Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Pengelolaan Zakat, mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam Pola penyaluran dan pendayagunaan zakat antara lain:

- 1) Distribusi dan pendayagunaan untuk delapan asnaf.
- 2) Memprioritaskan asnaf fakir miskin untuk memenuhi keperluan pokok, seperti makan dan tempat tinggal.
- 3) Bantuan pendidikan berupa beasiswa.

⁴⁷Fakhrudin, "*Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press,2008), hlm 78.

4) Bantuan pemberdayaan ekonomi umat.

Pendayagunaan infaq, sedekah, wasiat, hibah, waris dan kafarat diutamakan untuk usaha produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan umum, prosedurnya ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan usaha produktif.
- 3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- 4) Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
- 5) Mengadakan evaluasi
- 6) Membuat laporan (kementrian agama Republik Indonesia tahun 2013), pengelolaan zakat pasca Undang-undang no.23 tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat.

Kelahiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi sejarah penting dalam sejarah pengelolaan zakat di Indonesia sebagai revisi UU pengelolaan zakat sebelumnya. Undang-undang ini menjadi tonggak kebangkitan pengelolaan zakat di Indonesia setelah sekian puluh tahun termarginalkan dan titik balik terpenting dunia zakat nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 bahwa pengelolaan zakat dilakukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, dari tingkat nasional sampai kecamatan. Untuk tingkat nasional dibentuk BAZNAS, tingkat provinsi dibentuk BAZNAS

Provinsi, tingkat kabupaten/kota dibentuk BAZNAS Kabupaten/ Kota dan tingkat kecamatan dibentuk BAZNAS Kecamatan. Organisasi BAZNAS di semua tingkatan bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif. Guna tercapainya tujuan yang lebih optimal dalam pengelolaan zakat untuk kesejahteraan umat, maka dalam Undang-Undang disebutkan bahwa Lembaga Pengelola Zakat tidak hanya mengelola zakat, tetapi juga mengelola infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat. Pendayagunaan zakat diperuntukkan khusus bagi mustahiq delapan asnaf. Sesuai dengan penjelasan Undang- Undang Pengelolaan Zakat, mustahiq delapan asnaf ialah fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil yang dalam aplikasinya dapat meliputi orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.⁴⁸

Saat ini keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia menurut undang-undang nomor 38 tahun 1999, terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu kota Negara dibentuk oleh presiden atas usul menteri, sedangkan Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) berkedudukan di Ibu kota Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan dibentuk oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan Camat atas

⁴⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, “*Standarisasi Amil Zakat Indonesia*”, Jakarta, 2013

usul kepala kantor Departemen Agama setempat. Selain oleh BAZ, pengelolaan zakat juga dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat. Keberadaan LAZ dikukuhkan oleh pemerintah setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Salah satu syarat pendirian LAZ adalah berbadan hukum yayasan. Berdasarkan undang undang yayasan, struktur organisasi yayasan terdiri atas tiga unsur yaitu pembina pengurus dan pengawas. Sedangkan menurut Qardhawi seorang pengelola zakat harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Mukallaf. Yaitu orang yang dewasa yang sehat akal pikirannya yang siap menerima tanggung jawab mengurus ummat
- 3) Memiliki sifat amanah atau jujur.
- 4) Mengerti dan memahami hukum-hukum zakat, akan mengundang kepercayaan dari masyarakat.
- 5) Memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Di Indonesia, berdasarkan keputusan Menteri Agama R.I.Nomor 581 Tahun 1999, demi transparansi dan profesionalitas pengelolaan zakat, LAZ harus memiliki persyaratan teknis antara lain:

- 1) berbadan hukum
- 2) memiliki data muzakki dan mustahik
- 3) memiliki program kerja yang jelas

- 4) memiliki pembukuan yang baik
- 5) melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Menurut undang-undang, Organisasi Pengelola Zakat yang legalitasnya diakui oleh pemerintah, khususnya Ditjen Pajak hanya ada 19, antara lain:

- 1) Badan Zakat Nasional
- 2) Dompot Dhuafa,
- 3) Lazis Nahdlatul Ulama,
- 4) LAZ Persis,
- 5) Lazis Muhammadiyah,
- 6) BMH Hidayatullah,
- 7) LAZ Lembaga Dakwah Islam Indonesia,
- 8) Pos Keadilan Peduli Ummat
- 9) Rumah Zakat,
- 10) LAZ Baitul Maal Muammalat,
- 11) LAZ Bank Rakyat Indonesia,
- 12) Lazis Pertamina,
- 13) LAZNAS Bank Syariah Mandiri,
- 14) LAZIS IPHI,
- 15) BMT Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia,
- 16) Lazis Darut Tauhid,
- 17) Yayasan Dana Sosial al-Falah,
- 18) BAMUIS Bank Negara Indonesia,

19) Lazis Takaful.⁴⁹

4. Pengelolaan Zakat di Dunia Islam Modern

Di dunia Islam modern ini terdapat beberapa negara Islam yang mewajibkan warga negaranya untuk mengeluarkan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan, dan demi menjalankan perintah agama. Negara-negara Islam tersebut di antaranya: Kerajaan Saudi Arabia, Sudan, Pakistan, Yordania, Kuwait, dan Malaysia. Berikut ini adalah gambaran tentang peraturan undang-undang, sistem pengelolaan, dan aplikasi zakat di masing-masing negara Islam tersebut.

a. Saudi Arabia

Penerapan zakat di Saudi Arabia yang didasarkan pada perundang-undangan negara dimulai sejak tahun 1951 M. Sebelum itu, penunaian zakat di Saudi Arabia tidak diatur oleh perundang-undangan. Penerapan pengelolaan zakat oleh pemerintah Saudi berdasarkan pada keputusan Raja (*Royal Court*) No. 17/2/28/8634 tertanggal 29/6/1370 H/7/4/1951., yang berbunyi: “zakat *syar‘iy* yang sesuai dengan ketentuan *syariah Islamiyah* diwajibkan kepada individu dan perusahaan yang memiliki kewarganegaraan Saudi.” Sebelumnya, terbit keputusan Raja terkait pengenaan pajak pendapatan bagi warga non Saudi. Dengan terbitnya keputusan tersebut, warga non Saudi tidak lagi diwajibkan

⁴⁹Anisa Rahmayanti, Efisiensi Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola Dana Zakat di Indonesia (Studi Kasus: PKPU, Rumah Zakat, dan BAMUIS BNI). *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

mengeluarkan zakat, melainkan hanya diwajibkan membayar pajak pendapatan. Sementara warga Saudi hanya dikenai kewajiban membayar zakat tanpa pajak. Guna menangani urusan tersebut, dibentuklah bagian khusus yang bernama kantor pelayanan zakat dan pajak pendapatan (*Mashlahat Az-Zakat wa dakh*). Dimana terdapat sanksi apabila tidak membayar baik disengaja atau tidak disengaja, yaitu mereka tidak akan dilayani secara administratif oleh negara.⁵⁰

Kewenangan menghimpun zakat di Saudi Arabia mulai kebijakan sampai urusan teknis berada di bawah kendali Departemen Keuangan yang kemudian membentuk bagian khusus yang diberinama *Maslahah az-Zakah wa ad-Dakhl* (Kantor Pelayanan Zakat dan Pajak Pendapatan). Sedangkan kewenangan penyaluran zakat berada dalam kendali Departemen Sosial dan Pekerjaan di bawah Dirjen Jaminan Sosial (*Daman 'Ijtima'i*).

Penghimpunan zakat di Saudi Arabia diterapkan pada semua jenis kekayaan. Zakat ternak dikelola oleh komisi bersama antara Departemen Keuangan dan Departemen Dalam Negeri yang disebut *al-'Awamil* yaitu komisi khusus yang bertugas melakukan pemungutan zakat ternak ke pelosok-pelosok daerah, kemudian mendrop semua hasilnya ke Departemen Keuangan. Komisi khusus *Al-'Awamil* ini juga mengumpulkan zakat pertanian, zakat perdagangan, zakat simpanan

⁵⁰ Didin, Zakat Bisa Sebagai Pengurang Pajak, lihat di <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/04/20/111922-didin-zakat-bisa-sebagai-pengurang-pajak>, diunduh tanggal 11 Desember 2016

uang, dan zakat pendapatan. Yang termasuk kategori zakat pendapatan seperti pendapatan dokter, kontraktor, pengacara, *accounting*, dan para pegawai, termasuk juga seniman, penghasilan hotel, biro travel. Zakat pendapatan dari masing-masing profesi tersebut akan dipotong dari tabungan mereka setelah mencapai nisab. Cara penghitungannya berdasarkan pada laporan keuangan masing-masing.⁵¹

b. Pakistan

Negara Pakistan didirikan pada tahun 1950. Namun, undang-undang tentang pengelolaan zakat yang disebut dengan UU zakat dan Usyr baru diterbitkan secara resmi pada tahun 1979. Undang-undang ini dianggap belum sempurna sehingga pada tahun 1980 Undang-undang zakat mulai disempurnakan.

Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik yang disebut dengan Central Zakat Fund (CZF). CZF dipimpin secara kolektif oleh enam belas anggota, salah satunya adalah Hakim Agung Pakistan, delapan orang tidak resmi dengan tiga diantaranya dari golongan ulama, dan tujuh sisanya resmi salah satunya ketua Zakat Fund, empat Menteri Keuangan Negara Bagian Federal dan unsur kementerian urusan agama. Hirarki pengelolaan zakat di Pakistan puncaknya berada di CZF, empat *Provincial Zakat Fund* (negara bagian), 81 Lokal Zakat Fund, sampai ke tingkat Unit Pengumpulan yang berada di daerah.

⁵¹ M. Taufiq Ridlo, “*Pengelolaan Zakat di Negara-negara Islam*”, dalam Kuntarno Noor Aflah (editor), *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006), hlm. 33-35.

Zakat diwajibkan kepada setiap muslim warga negara Pakistan yang hartanya telah mencapai nisab. Zakat langsung dipotong dari harta *muzakki* pada item-item tertentu seperti: pemotongan langsung dari *account* tabungan dan deposito, sertifikat deposito, sertifikat investasi, obligasi pemerintah, saham perusahaan dan polis asuransi. Sedangkan harta lainnya diserahkan kepada *muzakki* untuk menunaikannya, seperti zakat uang *cash*, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat industri, dan sebagainya.

Penyaluran zakat di Pakistan didistribusikan ke delapan *asnaf* dengan memperhatikan skala prioritas sebagaimana tertuang dalam naskah Undang-undang: “prioritas utama diberikan kepada fakir miskin terutama para janda, orang cacat baik dengan cara langsung atau tidak langsung seperti melalui pendidikan resmi sekolah, pendidikan keterampilan, rumah sakit, klinik, dan lainnya.”⁵²

c. Yordania

Kerajaan Hasyimite Yordania mengambil inisiatif untuk menetapkan undang-undang khusus pemungutan zakat pada tahun 1944 M. Yordania merupakan negara Islam pertama yang melahirkan undang-undang semacam itu, yaitu UU yang mewajibkan pemungutan zakat di negara Kerajaan Hasyimite Yordania.

Di tahun 1988 ditetapkanlah UU mengenai lembaga amil zakat yang disebut dengan UU *Sunduq az-Zakat* tahun 1988. Undang-undang

⁵²*Ibid.*, hlm 42-43

ini memberikan kekuatan hukum kepada lembaga tersebut untuk mengelola anggaran secara independen serta hak penuntutan di muka pengadilan. Karenanya, *Sundug az-Zakat* memiliki hak untuk mengeluarkan berbagai macam aturan, juknis, dan juklak agar semakin efektif dalam melaksanakan kegiatan penghimpunan zakat.

Sundug zakat Yordania dalam operasionalnya mendayagunakan kelompok kerja yang tersebar di seluruh Yordania. Kelompok ini disebut *Lajnah az-Zakat* (Komisi Zakat). Tugas *Lajnah az-Zakat* di antaranya: memantau kondisi kemiskinan dalam masyarakat, mendirikan klinik-klinik kesehatan dan *medical centre*, mendirikan pusat pendidikan bagi pengangguran, mendirikan proyek-proyek investasi, dan mendirikan pusat-pusat garmen (*home industri*).⁵³

d. Kuwait

Undang-undang pendirian lembaga pemerintah yang bertugas mengurus pengelolaan zakat di Kuwait disahkan, disetujui parlemen, dan diterbitkan sebagai undang-undang pendirian *Bait az-Zakat* dengan nomor 5/82 tertanggal 21 Rabi'ul Awwal 1403 H atau bertepatan pada tanggal 16 Januari 1982 M.

Bait az-Zakat memiliki Dewan Direksi yang dipimpin langsung Menteri Waqaf dan Urusan Islam dengan anggota: wakil Kementrian

⁵³ *Ibid.*, hlm. 44, 46.

Waqaf dan Urusan Islam, wakil Kementrian Sosial dan Tenaga Kerja, Direktur Utama Institusi Jaminan Sosial, kepala rumah tangga istana, enam warga Kuwait yang memiliki pengalaman dan keahlian di bidangnya yang tidak menjabat di instansi pemerintah yang ditentukan oleh pemerintah melalui sidang kabinet dengan masa jabatan 3 tahun dan bisa diperpanjang.

Bait az-Zakat Kuwait konsen dengan perencanaan strategis sejak pendiriannya. Mereka meyakini pentingnya perencanaan dalam mengantarkan lembaga pada sasaran-sasaran dan tujuan di masa mendatang. Hal tersebut dilakukan dengan menempuh cara dan metodologi ilmiah, serta kajian yang terencana. Aktivitas perencanaan di Baituz Zakat berkembang sesuai dengan perkembangan manajemen dan cara kerja di dalamnya. Pada saat ini, hal tersebut bertumpu pada para pegawai yang ahli dalam merumuskan strategi dengan menggunakan panduan dan metodologi perencanaan strategis yang paling mutakhir.⁵⁴

e. Malaysia

Di Malaysia, setiap negeri mempunyai Majlis Agama Islam yang telah diberi kuasa oleh Pemerintah untuk mengurus masalah Islam, termasuk urusan wakaf dan zakat. Majlis Agama Islam terdapat di 13 negeri (yaitu Selangor, Johor, Perak, Terengganu, Pulau Pinang, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Kedah, Melaka, Serawak, Sabah,

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

dan Perlis) dan di 1 Wilayah Persekutuan (yaitu, Kuala Lumpur, Labuan, dan Putrajaya) yang dikoordinasikan oleh Kantor Perdana Menteri yang membawahi direktorat Kemajuan Islam dan memainkan peranan utamanya untuk nasional, serta mewakili Malaysia untuk tingkat internasional dalam urusan agama.

Di bawah Majlis Agama Islam terdapat organisasi atau kantor yang bertanggung jawab untuk zakat dan wakaf. Salah satunya adalah Pusat Pungutan Zakat (PPZ). PPZ ini pertama kali beroperasi pada 1 Januari 1991. Manajemen PPZ berada di bawah perusahaan Hartasuci Sdn. Bhd., yang bertanggung jawab akan manajemen PPZ di hadapan Majlis Agama Islam. Antara Hartasuci dan Majlis Agama Islam terdapat ikatan kontrak perjanjian, yaitu memberi kuasa untuk manajemen PPZ dan sekaligus menjadi amil zakat. Kontrak tersebut meliputi beberapa hal seperti tugas Hartasuci dan peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh Hartasuci sebagai pihak yang menjalankan manajemen PPZ dan amil zakat.

Fungsi utama PPZ ialah mencari *muzakki* baru, menjaga kontinuitas pembayarannya, memberi penerangan seputar zakat, menghimpun zakat, mengeluarkan resi zakat kepada pembayar, membuat laporan harian, bulanan, dan tahunan, membina loket-loket baru dan saluran-saluran baru untuk pembayaran zakat agar lebih memudahkan pembayar zakat, dan menambah aset PPZ dari kelebihan upah *amil* setelah ditolak semua perbelanjaan.

Pendistribusian zakat di Wilayah Persekutuan sebagai contoh, melalui program-program bantuan langsung untuk Fakir dan Miskin semisal bantuan makanan, bantuan keuangan, bantuan medis, sekolah, seragam sekolah, kontrak rumah, bencana alam, pernikahan dan usaha. Bantuan tidak langsung dapat berbentuk pemberian manfaat tidak langsung, seperti Institut Kemahiran Baitulmal (IKB) yang giat melakukan pembinaan, pelayanan pelatihan keterampilan untuk fakir miskin. Sedangkan Komplek Kebajikan Darus Sa'adah merupakan tempat perlindungan dan pendidikan bagi *mu'allaf*, janda, dan fakir miskin. Institut Profesional Baitulmal (IPB) juga memberikan pendidikan profesional setingkat perguruan tinggi kepada anak-anak fakir miskin, di samping hotel dan rumah sakit yang mereka miliki.⁵⁵

5. Efisiensi

a. Pengertian Efisiensi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efisiensi diterjemahkan dengan daya guna. Ini menunjukkan bahwa efisiensi selain menekankan pada hasilnya, juga ditekankan pada daya atau usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar tidak terjadi pemborosan.⁵⁶

Menurut Wirapati efisiensi adalah usaha mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 52-54

⁵⁶ Ibnu Syamsi, *Efisiensi, sistem, dan prosedur kerja*. (Jakarta:PT.Bumi Aksara, 2004), hlm.2

tersedia (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang sependek-
pendeknya di dalam keadaan yang nyata tanpa mengganggu
keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga, dan waktu.

Sedangkan menurut Ghiselli dan Brown *The term efficiency has a
very exact definition, It is expressed as the ratio of output to input.* Jadi,
menurut Ghiselli dan Brown istilah efisiensi mempunyai pengertian yang
sudah pasti, yaitu menunjukkan adanya perbandingan antara keluaran
(output) dan masukan (input).⁵⁷

Efisiensi merupakan perbandingan terbaik antara suatu hasil
(output) dengan usahanya (input). Perbandingan ini dapat dilihat dari dua
segi berikut ini:

7) Hasil (Output)

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien jika suatu usaha
memberikan hasil yang maksimum.

8) Usaha (Input)

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien, jika suatu hasil tertentu
tercapai dengan usaha yang minimum.

Dari beberapa pengertian efisiensi di atas, kami menyimpulkan
bahwa efisiensi adalah kegiatan mencapai tujuan dengan benar, dengan
cara menggunakan sumber daya, waktu, tenaga yang minimum secara
optimal dengan hasil output yang maksimal. Optimal di sini bukan berarti
menggunakan sumber daya yang ada secara berlebihan, tetapi

⁵⁷ *Ibid.*, hlm.4.

menggunakan sumber daya yang ada itu secara baik-baik dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah output.

Sebuah manajemen yang efisien (efficient operation) akan menggunakan sumber daya yang ada secara optimal demi mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal, dan tidak membuang-buang sumber daya yang ada secara cuma-cuma dalam melaksanakan operasinya. Suatu operasi tidak efisien jika sebuah manajemen menggunakan sumber daya melebihi dari jumlah yang diperlukan.

Pada umumnya, manajemen yang berhasil adalah manajemen yang efisien namun juga efektif. Karena manajemen yang efisien saja akan sia-sia jika gagal dalam mencapai tujuannya karena kurang efektif, dan manajemen yang efektif saja akan sangat mungkin terjadi pemborosan karena tidak efisien.

b. Pengertian Efisiensi Ekonomi Syariah

Efisiensi dalam pengertian Optimum Pareto yang netral nilai dan ekuilibrium modern juga tidak muncul dalam literatur Islam. Ini tidak berarti bahwa konsep efisiensi tidak dikenal. Konsep ini telah diidentifikasi dalam beberapa pengertian. Salah satunya adalah dalam pengertian usaha untuk melakukannya yang terbaik. Efisiensi juga perlu dalam berbagai konteks sementara sumber-sumber daya tidak boleh disia-siakan atau disalah gunakan karena adanya pertanggungjawaban kepada Tuhan. Menurut salah satu nasihat Abu Yusuf kepada Harun ar-Rasyid, yang didasarkan pada hadits, pertanggungjawaban ini berlaku

bagi semua sumber daya, termasuk usia manusia, ilmu, kekayaan, dan semua kemampuan fisiknya. Pertanggungjawaban ini menuntut bahwa sumber-sumber daya dipergunakan untuk membantu memaksimalkan kesejahteraan manusia. Pertanggungjawaban ini berlaku bagi sumber-sumber daya, tidak pandang apakah itu SDM atau SDA, langka atau melimpah, mengandung biaya atau gratis⁵⁸

Dengan demikian, penggunaan sumber-sumber daya yang paling efisien dalam ilmu ekonomi konvensional dapat didefinisikan menurut *Optimum Pareto*, sementara dalam suatu perekonomian Islam akan ditentukan berdasarkan maqashid. Setiap penggunaan yang menggagalkan realisasi maqashid harus dipandang sebagai kesia-siaan dan inefisiensi. Sebagai contohnya, dalam ilmu ekonomi konvensional, konsep *Optimum Pareto* membolehkan penghancuran kelebihan output jika hal ini memungkinkan pelaku bisnis menahan penurunan labanya tanpa membuat konsumen menjadi lebih buruk (kondisinya) karena naiknya harga. Namun, cara seperti ini tidak dapat diterima dalam paradigma Islam karena perilaku seperti ini tidak hanya akan merusak sumber-sumber daya yang telah disediakan oleh Allah sebagai suatu bentuk amanah melainkan juga menimbulkan ketidakadilan kepada para konsumen.

⁵⁸M. Anas Zarqa, "Islamic Economics: An approach to Human Welfare", in *Studies in Islamic Economics* Edited by Khurshid Ahmad, Jeddah: *International Centre for Research in Islamic Economics and UK: The Islamic Foundation* dies, University of Binghamton, 1980.

Meskipun usaha mempertahankan harga pada tingkat sekarang tidak dapat dibuat menjadi lebih bermanfaat jika kelebihan output tersebut tidak dihancurkan, harga akan turun atau kelebihan itu dapat dibagikan kepada orang-orang miskin. Begitu juga, waktu dan energi yang dipergunakan untuk shalat dan berpuasa akan tampak sia-sia jika dipandang menurut kerangka materialisme, karena hal itu akan menyebabkan, meskipun tidak selalu, penurunan output sehingga menghambat maksimalisasi output dan laba. Namun, jika dipandang dari sudut kontribusi si kaya yang akan dapat menciptakan character building dan peningkatan spiritual serta kesejahteraan manusia, maka shalat dan puasa sesungguhnya memiliki keunggulan positif. Barangkali karena alasan ini, dan alasan lain, seperti yang ditunjukkan sebelumnya bahwa salah satu qaidah ushul membolehkan penetapan suatu pengorbanan privat yang lebih sempit untuk mendapatkan kemaslahatan public yang lebih besar. Umumnya para ulama memandang bahwa syariat, dengan strategi dan nilai-nilai moral yang disediakan untuk menanamkan nilai-nilai ini secara efektif dalam masyarakat, bukan saja akan membantu menjamin keadilan dan kesejahteraan bagi semua, melainkan juga mendorong kemajuan manusia. Al-Mawardi mengindikasikan bahwa ajaran-ajaran Islam telah terbukti menjadi fondasi yang solid bagi peningkatan dan stabilitas di dunia. Ibnu Khaldun juga menekankan

bahwa sebuah negara tidak dapat mencapai kemajuan dan kekuatan kecuali dengan menerapkan syariat.⁵⁹

c. Konsep Efisiensi dalam Islam

Tujuan efisiensi adalah untuk mencapai keuntungan optimal. Tujuan ini melenceng dari *khittah* awalnya dan hanya menguntungkan bagi sebagian pihak dan merugikan yang lainnya yang mana para pelaku ekonomi hanya memikirkan kesejahteraan diri sendiri tanpa memikirkan batasan-batasan mana yang harus diperhatikan. Dalam Islam, istilah efisiensi ini tidak dikenal. Menekan biaya yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan keuntungan yang paling maksimal dalam teori produsen akan berakibat pada perbuatan *dzalim* yang tidak bersenyawa dengan ruh Islam. Dalam Islam, perwujudan keuntungan yang optimal dihasilkan melalui usaha yang optimal (kerja keras) untuk menghasilkan sesuatu secara optimal dengan tetap menjaga keseimbangan (*ta'adul*) dan etika syariah. Keuntungan yang dihasilkan harus seimbang dengan kerja keras dan beban yang dikeluarkan.

Dalam Islam, teori efisiensi sudah diterapkan sejak zaman Rasulullah saw, dimana Islam mendukung penuh efisiensi kerja namun harus tetap dalam koridor syariat Islam dari al-Qur'an dan Sunnah. Terdapat dalam sabda Rasulullah saw, *al-Kharaj bid-Dhaman* (setiap keuntungan yang didapatkan harus sesuai dengan beban yang

⁵⁹Umar Chapra, *The Future of Economics : An Islamic Perspective*, (The Islamic Foundation, United Kingdom, 2000), hlm. 61.

dikeluarkan). Keseimbangan juga berarti bahwa dalam mewujudkan *value added*, produsen harus memperhatikan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.⁶⁰ Untuk mewujudkan optimalisasi dan keseimbangan, Islam memberikan beberapa *guidance*, di antaranya:

1) Memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam

Islam menghendaki umatnya untuk bekerja memakmurkan bumi dan memanfaatkan seluruh potensi sumber daya alam. Allah berfirman:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴿٦١﴾

Artinya : “.....Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya.... “ (Hud: 61)⁶¹

2) Spesialisasi kerja

Konsep spesialisasi kerja pernah diutarakan oleh Ibnu Khaldun dalam *Muqddimah*-nya. Menurutnya dengan jumlah penduduk yang semakin besar, maka akan terjadi pembagian dan spesialisasi tenaga kerja sehingga akan memperbesar *surplus* dan perdagangan internasional. Pembagian tenaga kerja internasional akan lebih

⁶⁰M.Mahbubi Ali dan Ascarya, “Analisis Efisiensi Baitul Maal Wat Tamwil dengan Pendekatan Two Stage Data Envelopment Analysis (Studi Kasus Kantor Cabang BMT MMU dan BMT UGT Sidogiri)”, *Islamic Finance and Business Review*, Vol 5, No.2 Agustus-Desember 2010, Bogor : Tazkia, hlm. 113-114.

⁶¹Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV.Fokusmedia, 2010), hlm. 228

tergantung pada perbedaan keahlian dan keterampilan penduduk dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya alam.

Salah satu cara Islam mewujudkan efisiensi dengan cara minimalisasi biaya produksi adalah dengan pengharaman riba (bunga). Sebagai bagian dari elemen biaya tetap dalam produksi, penghapusan bunga akan membuat biaya produksi lebih rendah (efisien).⁶²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامِنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ

لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat gandapan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan” (Al-Imran:130)⁶³

3) Larangan israf dan tabdzir dalam produksi

Perbedaan antara *israf* dan *tabdzir* disampaikan oleh Al-Mawardi. Al-Mawardi menjelaskan bahwa *israf* adalah kesalahan menggunakan takaran yang tepat, sedangkan *tabdzir* adalah kebodohan dalam menggunakan aloasi yang tepat.⁶⁴ Lebih jelasnya *tabdzir* berarti menggunakan harta dengan cara yang salah, yakni menuju tujuan yang terlarang seperti penyuapan, hal-hal yang melanggar hukum atau dengan cara yang tanpa aturan. Sedangkan

⁶²M.Mahbubi Ali dan Ascarya, “Analisis....”, hlm. 114

⁶³Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 66

⁶⁴M.Mahbubi Ali dan Ascarya, “Analisis....”, hlm. 114

israf atau pemborosan berarti penggunaan harta secara berlebihan untuk hal-hal yang melanggar hukum dalam hal seperti makanan, pakaian, tempat tinggal atau bahkan sedekah.⁶⁵ Allah berfirman:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ ﴾

Artinya : “Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). “makanlah dari buah bila dia berbuah dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya) dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (al-An’am:141)⁶⁶

Dalam efisiensi terdapat unsur keadilan, keadilan diartikan dengan suka sama suka dan satu pihak tidak mendzalimi pihak lain. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal ini merugikan orang lain atau merusak alam.⁶⁷ Menegakkan keadilan merupakan salah

⁶⁵M.Nur Rianto al-Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta:Kencana, 2010), hlm. 87

⁶⁶Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an...*, hlm. 146

⁶⁷Ahmad Arisatul Cholik, “Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, Juli 2013, hlm. 180

satu dari tiga tujuan syariah yang diambil dari konsep *maqasid syariah* oleh Abu Zahrah.

Beberapa *guidance* di atas menunjukkan bahwa efisiensi dalam Islam tidaklah sama dengan ekonomi konvensional. Hal ini karena orientasi kehidupan seseorang muslim tidaklah sebatas hanya pada dunianya saja, tetapi adanya integrasi kehidupan dunia dan akhirat, dimana dunia hanyalah ladang bagi kehidupan di akhirat.

Pada teori efisiensi dalam Islam, terdapat unsur keadilan. Dalam Islam, adil didefinisikan sebagai tidak mendzalimi dan tidak di dzalimi. Dimana Rasulullah saw bersabda, "*Inna Lakum ru'usa amwalikum la tazlmuna wa la tuzlamun*" (HR.Ahmad). Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam, seperti halnya yang terjadi pada masa kolonialisasi dan imperialisme, di mana bangsa Barat mengeksploitasi alam Asia dan Afrika besar-besaran diiringi praktek perbudakan yang merugikan manusia. Hal semacam ini merupakan perampasan hak baik kepada manusia maupun alam dan suatu perbuatan yang dibenci Allah SWT, suatu ketidakadilan yang harus ditaubati pelakunya dan wajib membayar ganti rugi kepada korban.

Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lain, sehingga akan terjadi eksploitasi manusia antar manusia. Masing- masing

berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar dari usaha yang dikeluarkannya demi kerakusannya.⁶⁸

Dalam agama Islam sangat menganjurkan efisiensi, mulai dari efisiensi keuangan, waktu, bahkan dalam berkata dan berbuat yang sia-sia (tidak ada manfaat dan tidak ada keburukan) saja diperintahkan untuk meninggalkannya, apalagi berbuat yang mengandung keburukan atau kerugian.

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ
الْغَوِّ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman (1) (yaitu) orang-orang yang khusyuk dalam shalatnya(2) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna(3)”(QS.Al-Mu’minuun1-3)

Dalam mempergunakan waktu, Islam juga memerintahkan untuk menggunakan waktu yang kita miliki seoptimal mungkin dan jangan sampai ada waktu yang terbuang secara sia-sia. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Ashr.

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

⁶⁸ Ahmad Arisatul Cholik, “Teori Efisiensi dalam Ekonomi Islam”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2 Juli 2013, hlm 180-181

“Demi masa(1) Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian(2) kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran(3)” (QS.Al-Ashr 1-3)

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan dalam organisasi itu termasuk efisien atau tidak maka prinsip-prinsip atau persyaratan efisiensi harus terpenuhi. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1) Efisiensi Harus Dapat Diukur

Standar untuk menetapkan batas antara efisien dan tidak efisien adalah ukuran normal. Ukuran normal ini merupakan patokan (standar) awal untuk selanjutnya menentukan apakah suatu kegiatan itu efisien atau tidak. Batas ukuran normal untuk pengorbanan (input) adalah pengorbanan maksimum. Sedangkan batas ukuran normal untuk hasil (output) adalah hasil minimum. Kalau tidak dapat diukur maka tidak akan dapat diketahui apakah suatu kegiatan atau cara kerja itu efisien atau tidak.

2) Efisiensi Mengacu Pada Pertimbangan yang Rasional

Saat melakukan pertimbangan, haruslah pertimbangan itu pertimbangan yang rasional. Maksudnya, segala pertimbangan harus berdasarkan akal sehat, masuk akal, logis, dan bukan emosional. Dengan pertimbangan yang rasional, objektivitas pengukuran dan penilaian akan lebih terjamin.

3) Efisiensi Tidak Boleh Mengorbankan Kualitas (Mutu)

Dalam hal ini kuantitas boleh saja ditingkatkan tetapi jangan sampai mengorbankan kualitasnya. Jangan hanya mengejar kuantitas tetapi dengan mengorbankan kualitas.

4). Efisiensi Merupakan Teknis Pelaksanaan

Dalam pelaksanaannya jangan sampai bertentangan dengan kebijakan atasan. Karena kebijakan atasan tentu saja sudah dipertimbangkan dari berbagai segi yang luas cakupannya, pelaksanaan operasionalnya dapat diusahakan seefisien mungkin sehingga tidak terjadi pemborosan.

5) Pelaksanaan Efisiensi Harus disesuaikan dengan Kemampuan Organisasi yang Bersangkutan

Penerapan efisiensi disesuaikan dengan kemampuan sumber daya, dana, fasilitas, dan lain-lain yang dimiliki oleh organisasi yang bersangkutan sambil diusahakan peningkatannya. Setiap organisasi tidak selalu mempunyai kemampuan yang sama dan pengukuran efisiensi hendaknya didasarkan pada kemampuan yang dimilikinya, baik mengenai sumberdaya, dananya, fasilitasnya ataupun yang lainnya.

Dari kesemua prinsip yang telah kami jelaskan di atas, prinsip-prinsip tersebut harus terpenuhi untuk menentukan tingkat efisiensi sebuah kegiatan dalam organisasi. Jika prinsip atau persyaratan diatas

tidak terpenuhi maka tidak dapat diketahui apakah suatu kegiatan itu sudah efisien atau tidak.

D. Konsep Efisiensi OPZ

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas lembaga Pengelola Zakat (LPZ), maka diperlukan tata kelola yang baik dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam menjalankan program kerjanya, penerapan prinsip-prinsip GCG akan terlaksana secara efektif dan efisien jika dapat dipahami oleh semua pengurus. Oleh karena itu, indeks pemahaman (tingkat pemahaman) pengurus LPZ mengenai prinsip-prinsip GCG perlu diketahui oleh pimpinan LPZ.

Prinsip-prinsip good Corporate Governance (GCG) yang terdiri atas prinsip transparency (transparansi), accountability (akuntabilitas), responsibility (responsibilitas), indenpedency (indepensi), dan fairness (kewajaran dan kesetaraan) sehingga LPZ dapat melakukan tindakan perbaikan kerja dan tata kelola kelembagaan agar dapat optimal, dengan demikian akan berimplikasi terhadap perilaku para pengurus LPZ dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG

Secara terperinci aspek-aspek yang harus diketahui oleh pengurus LPZ untuk setiap GCG, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Prinsip transparansi

Untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip transparansi, diperlukan pemahaman yang memadai terhadap prinsip transparansi tersebut.

1. Rencana kerja tahunan

2. Laporan keuangan berkala triwulan
3. Laporan keuangan berkala tengah tahunan
4. Laporan keuangan berkala tahunan
5. Sistem akuntansi berbasis standar akuntansi
6. Teknologi Informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan
7. Sistem manajemen informasi
8. Laporan kegiatan dan keuangan insidental
9. Informasi penting tentang kegiatan insidental

Oleh karena itu, agar LPZ dinilai transparan maka perlu menerapkan indikator-indikator transparansi tersebut

Prinsip akuntansibilitas adalah suatu prinsip pertanggungjawaban yang meliputi kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ lembaga sehingga pengelolaan terlaksana secara efektif, prinsip ini menuntut mengelola zat secara benar, terukur, dan sesuai dengan kepentingan lembaga dengan tetap memperhitungkan kepentingan pengurus dan muzakki, pada umumnya pemahaman mengenai prinsip accountability disebabkan oleh pengetahuan yang diperoleh pengetahuan yang diperoleh dari penerapan indikator-indikator akuntansibilitas berikut :

1. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat
2. Komite audit dan manajemen resiko
3. Koordinasi program kerja/kegiatan
4. Evaluasi program kerja/kegiatan

Agar pemahaman prinsip Accountability tersebut dapat dipahami secara memadai oleh pengurus, LPZ perlu meningkatkan pemahaman dengan perbaikan pengetahuan dan membangun kesadaran (awareness) mengenai prinsip accountability. Indikator yang perlu penerapan serius adalah sistem pengendalian internal yang efektif, sebagai suatu komite audit dan manajemen risiko dalam pengelolaan zakat.

Prinsip Responsibilitas (responsibility)

LPZ sudah seharusnya dikelola berdasarkan pada prinsip responsibilitas agar tercapai kesinambungan. Oleh karena itu LPZ harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, Pada umumnya pemahaman tentang responsibility diperoleh dari penerapan indikator-indikator berikut :

1. Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan
2. Kewajiban Sosial Perusahaan (CSR)
3. Kemitraan dengan masyarakat atau bina lingkungan
4. Keterbukaan informasi sesuai regulasi
5. Etika, moral, dan akhlak

Dengan demikian penerapan indikator-indikator di atas, dipandang dapat menjadi sarana menanamkan pemahaman tentang prinsip responsibility. Artinya bahwa LPZ harus berusaha melaksanakan tanggung jawab sosial dan peduli lingkungan dengan memberdayakan sumber daya manusia (SDM) yang ada, yang akan melaksanakannya.

Prinsip Independensi

Kemandirian adalah kata kunci dari prinsip independency. LPZ harus dikelola secara independen sehingga masing-masing unit atau divisi tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi Oleh

Konsep ideal tersebut perlu diketahui baik oleh semua pengurus agar dapat dipahami dan dilaksanakan. Secara umum terdapat beberapa indikator yang menyebabkan pemahaman mengenai prinsip independensi yaitu,

1. Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan tugas masing-masing organ
2. Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencari urusan lembaga
3. Kondisi menghindari benturan kepentingan dalam keputusan
4. Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ dalam lembaga

Maka dari itu, secara umum dapat diketahui pula bahwa penerapan indikator-indikator tersebut di atas secara umum dapat diketahui pula bahwa penerapan indikator-indikator tersebut di atas, dapat dijadikan sebagai sarana menanamkan pemahaman prinsip independensi, LPZ harus berupaya menciptakan suatu keadaan dimana lembaga dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun. sehingga semua pengurus LPZ harus berniat dan berkomitmen mengembangkan secara all out pengelolaan zakat.

Prinsip kewajaran dan kesetaraan (fairness)

Perwujudan prinsip fairness tersebut diantaranya adalah LPZ berkewajiban mendistribusikan zakat kepada seluruh golongan mustahiq selama semua golongan itu ada dan memiliki kebutuhan yang asam atau sesuai dengan jumlah dan kebutuhannya. Selain itu, LPZ sebagai 'amil yang bertugas menghimpun dan mendistribusikan zakat, berhak mendapat maksimal seperdelapan ($1/8$) perolehan zakat.

Adapun beberapa indikator yang menyebabkan pemahaman mengenai prinsip fairness, yaitu :

1. Terciptanya peran dan tanggung jawab setiap pengurus/oragn lembaga
2. Keadaan memperlakukan muzaku dan mustahik secara adil dan jujur
3. Kondisi kerja, yang baik dan aman bagi pengurus
4. Kondisi membolehkan muzaki memberikan masukan sesuai ketentuan
5. Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak
6. Adanya peraturan pelaksanaan lembaga
7. Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga

Dengan demikian daapt diketahui bahwa apabila indikator-indikator fairness diatas diterapkan, daapt dinyatakan sebagai sarana penanaman pemahaman prinsip fairness dan mengindikasikan bahwa LPZ telah berupaya mengimplementasiakn prinsip kewajaran dan kesetaraan (fairness) dalam pengelolaan lembaga.

Urgensi penerapan prinsip-prinsip GCG di LPZ dimaksudkan agar pengelolaan zakat dapat dilaksanakan secara profesional, hal ini dapat difahami karena ada korelasi yang erat antara GCG dengan budaya LPZ dalam menciptakan iklim berzakat, budaya tersebut terkait dengan kepercayaan publik terhadap LPZ seiring dengan pengelolaan lembaga zakat yang baik dan profesional⁶⁹

E. Cara Meningkatkan Efisiensi dalam Organisasi

Agar tercipta organisasi yang efisien, ada beberapa cara untuk meningkatkan efisiensi dalam organisasi. Adapun cara tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan fungsi manajemen secara tepat

Dalam fungsi manajemen yang meliputi planing, organizing, actuating, dan controlling itu harus dilaksanakan dengan tepat. Jika ada fungsi manajemen yang tidak tepat itu akan menjadikan suatu manajemen kurang efisien dan tentu saja akan menjadikan organisasi yang tidak efisien pula.⁷⁰

2) Pemanfaatan sumber daya ekonomi yang tepat

Semua sumber daya ekonomi yang ada seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya kewirausahaan, dan juga

⁶⁹ Rahmani Timorita Yulianti, *Good Corporate Governace di Lembaga Zakat*, Kaukaba Dipantara: Yogyakarta, 2016, hal 73.

⁷⁰ Ibnu Syamsi, *Efisiensi, sistem, dan prosedur kerja*. (PT. Bumi Aksara. Jakarta, 2004), hlm. 78

sumber daya modal dipilih dengan baik, kemudian dimanfaatkan secara tepat.

- 3) Pelaksanaan fungsi organisasi sebagai alat pencapai tujuan yang setepat tepatnya

Memanfaatkan fungsi-fungsi organisasi yang sebagai wadah untuk digunakan sebagai alat pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebetulnya secara tepat.

- 4) Pengarahan dan dinamika organisasi dilakukan untuk pengembangan dan kemajuan yang berkesinambungan.

Pengarahan-pengarahan dan dinamika yang sudah ada ataupun sudah berjalan dalam sebuah organisasi dilakukan dengan sebaik mungkin secara terus menerus demi berkembangnya sebuah organisasi dan juga kemajuan yang secara berkesinambungan.

d. Jenis Efisiensi

Efisiensi terdiri dari tiga jenis yakni efisiensi teknik, alokatif, dan gabungan dari kedua efisiensi yang disebut efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi mempunyai sudut pandang makro yang mempunyai jangkauan lebih luas dibandingkan dengan efisiensi teknik yang bersudut pandang mikro. Pengukuran efisiensi teknik cenderung terbatas hanya pada hubungan teknis mengubah input menjadi output. Sehingga peningkatan efisiensi teknis hanya memerlukan kebijakan mikro yang bersifat internal, yaitu dengan pengendalian dan alokasi sumber daya yang

optimal. Farrell dalam Coelli mengusulkan bahwa efisiensi perusahaan terdiri dari dua komponen:

- 1) Efisiensi teknik yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh output yang maksimal dari kumpulan input,
- 2) Efisiensi alokatif yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan input dengan proporsi yang maksimal, dengan harga masing-masing. Kedua ukuran tersebut bila dikombinasikan akan menjadi ukuran efisiensi ekonomis.⁷¹

e. Cara Mengukur Efisiensi

Pengukuran efisiensi sangat diperlukan untuk menilai kinerja lembaga, pengukuran efisiensi menurut Farrell dalam, dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu:

1) Input Oriented Measure

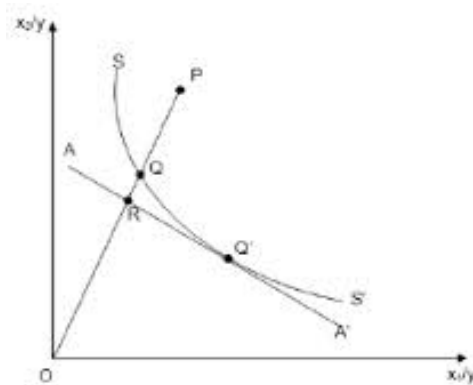
Pengukuran berorientasi input menghitung berbagai input yang dapat dikurangi tanpa mengubah jumlah output yang dihasilkan. Sehingga perhitungan ini menitikberatkan pada pengurangan sumberdaya yang digunakan disbanding meningkatkan output. Pengukuran ini biasa dituliskan dengan notasi:

$$\text{Efisiensi naik} = \frac{\text{output tetap}}{\text{input berkurang}}$$

⁷¹ Coelli TJ. *A Guide to DEA Version 2.1: A Data Envelopment Analysis (Computer) Program*. Armidale: Departemen of Econometrics, (University of New England Australia, 1996), hlm. 89.

Dalam penjelasannya, Farrell memberikan contoh perusahaan yang memproduksi output Y dengan dua input yakni X_1 dan X_2 dengan asumsi Constant Return to Scale (CRS).

Gambar 2.2 Kurva Efisiensi dengan Orientasi Input



Sumber: (Coelli:2005)⁷²

Garis OP menjelaskan kombinasi input yang digunakan oleh suatu perusahaan. Garis isocost AA' menggambarkan kombinasi input yang dapat digunakan oleh produsen dalam tingkat biaya yang sama (efisiensi alokatif), sedangkan garis isoquant yang ditunjukkan dengan kurva SS' menggambarkan kombinasi input untuk menghasilkan output yang sama (efisiensi teknis). Titik Q' menunjukkan tingkat efisien secara teknis dan alokatif. Titik P menunjukkan inefisiensi karena tidak berada pada kurva isocost dan isoquant. Titik R menunjukkan efisiensi alokatif dan Q efisiensi teknis. Tingkat efisiensi tersebut didapat dari perhitungan rasio berikut:

⁷² Ibid., hlm. 91

$$AE \text{ (Allocative Efficiency)} = \frac{OR}{OQ}$$

$$TE \text{ (Technical Efficiency)} = \frac{OQ}{OP}$$

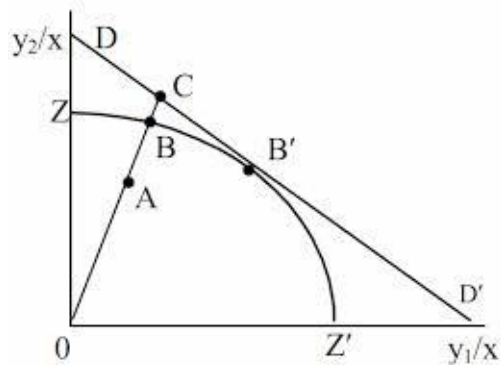
2) Output Oriented Measure

Orientasi output menghitung berbagai output yang dapat ditingkatkan tanpa mengubah jumlah input yang dihasilkan. Pengukuran ini biasa dituliskan dengan:

$$\text{Efisiensi naik} = \frac{\textit{output naik}}{\textit{input tetap}}$$

Dalam penjelasannya, Farrel memberikan contoh perusahaan yang memproduksi dua output yakni Q1 dan Q2 dengan sebuah input X. Asumsi yang digunakan adalah Constant Return to Scale (CRS), sehingga didapat Kurva Kemungkinan Produksi atau Production Possibility Curve yang ditunjukkan dengan garis ZZ' yang merepresentasikan batas atas dari kemungkinan produksi. Sehingga titik A menunjukkan inefisiensi secara teknis karena masih bisa mengoptimalkan output yang masih berada di bawah garis Production Possibility Curve ke titik B.

Gambar 2.3. Kurva Efisiensi dengan Orientasi Output



Sumber: (Coelli:2005)⁷³

Titik B yang berada pada Production Possibility Curve menunjukkan technical efficiency. Sedangkan titik C yang berada pada garis isorevenue DD' menunjukkan technical efficiency. Titik B' menunjukkan tingkat efisien secara teknis dan alokatif yang merupakan tingkat paling ideal.

Perhitungan efisiensi teknis dan alokatif didapat dari perhitungan rasio berikut:

$$AE \text{ (Allocative Efficiency)} = \frac{OB}{OC}$$

$$TE \text{ (Technical Efficiency)} = \frac{OA}{OC}$$

Sehingga didapat Overall Revenue Efficiency dengan memperhitungkan dua persamaan di atas.

$$RE = \frac{OA}{OC} = \frac{OA}{OB} \times \frac{OB}{OC} = TE \times AE$$

Sedangkan menurut Muharam dan Purvitasari⁷⁴, pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, antara lain:

⁷³ Ibid., hlm. 92.

1) Pendekatan rasio

Pendekatan rasio dalam mengukur efisiensi dilakukan dengan menghitung perbandingan output dengan input yang digunakan. Pendekatan rasio akan dinilai memiliki efisiensi yang tinggi apabila dapat memproduksi jumlah output yang optimal dengan input yang seminimal mungkin.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}}$$

Chu-Fen Li melihat pendekatan rasio sebagai "the most critical limitation of the financial ratio is that they fail to consider the multiple input-output..." Oleh karena itu pendekatan ini belum mampu menilai kinerja lembaga keuangan secara menyeluruh.

2) Pendekatan regresi

Pendekatan ini mengukur efisiensi menggunakan sebuah model dari tingkat output tertentu sebagai fungsi dari berbagai tingkat input tertentu. Persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n$$

Dimana Y adalah output dan X adalah input. Penghitungan regresi ini tidak dapat mengakomodir jumlah variabel output yang banyak.

3) Pendekatan Frontier

⁷⁴Harjun Muahrram dan rizki Pusvitasari, "Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia dengan Metode DEA (Periode tahun 2005)". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, tahun 2007, Yogyakarta, Vol II, No.3.

Pendekatan frontier dalam mengukur efisiensi dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pendekatan frontier parametrik dan non parametrik. Pendekatan parametrik dapat diukur dengan tes statistik parametrik seperti menggunakan *Stochastic Frontier Approach* (SFA) dan *Distribution Free Approach* (DFA). Pendekatan frontier non parametrik diukur dengan tes statistik non parametrik yaitu dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Tes parametrik adalah suatu tes yang modelnya mensyaratkan asumsi khusus tentang distribusi populasi harus normal, sedangkan tes statistik non parametrik adalah tes yang modelnya tidak mensyaratkan distribusi khusus pada distribusi data. Sehingga untuk menganalisis pengukuran dengan variabel yang ada, penelitian ini menggunakan metode non parametrik DEA.

6. Data Envelopment Analysis

a. Definisi

Data Envelopment Analysis (DEA) adalah sebuah metode pengukur efisiensi yang menggunakan teknik pemrograman matematis. DEA mengukur efisiensi relatif dari kumpulan decision making unit (DMU) dalam mengelola sumber daya (input) dengan jenis yang sama

sehingga menghasilkan output dengan jenis yang sama pula, dimana hubungan bentuk fungsi dari input ke output tidak diketahui⁷⁵

DEA merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi, antara lain untuk penelitian kesehatan (health care), pendidikan (*education*), transportasi, pabrik (*manufacturing*), maupun perbankan⁷⁶. DEA pada awalnya dikembangkan oleh Farell yang mengukur efisiensi teknik satu input dan satu output menjadi multi input dan multi output. DEA dipopulerkan oleh Charness, Cooper, dan Rhodes (1978) dengan asumsi Constan Return to Scale (CRS) dan dikembangkan lagi oleh Bunker, Charness, dan Cooper (1994) dengan asumsi Variabel Return to Scale (VRS). Kedua metode ini akhirnya terkenal sebagai model CCR dan BCC.

b. Model-Model pada DEA

1) CCR (Charness, Cooper, dan Rhodes)

Model DEA paling dasar adalah model CCR (Charness, Cooper, dan Rhodes) yang dikembangkan tahun 1978. Dalam model ini untuk setiap entitas pengukuran DMU (*Decision Making Unit*) dibentuk virtual input dan output yang pembobotannya v_i (input) dan v_r (output) memiliki nilai yang belum diketahui.

$$\text{Virtual input} = v_1 x_{10} + \dots + v_m x_{m0}$$

⁷⁵Siswandi, Erwinta. Wilson Arafat, "Mengukur Efisiensi Relatif Kantor Cabang LAZ dengan Menggunakan Metode DEA", *Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia* No. 1/TH.XXXIII, tahun 2004.

⁷⁶Indukindro, "*Dasar-Dasar Ekonometrika*", (Yogyakarta : Bank Indonesia dan MEP UGM, 2000), hlm.56.

$$\text{Virtual output} = u_1 y_{10} + \dots + u_s y_{s0}$$

Nilai bobot akan ditentukan dengan menggunakan teknik Linear programming dengan fungsi tujuan memaksimalkan.

$$\text{Rasio} = \frac{\text{virtual input}}{\text{virtual output}}$$

Dalam hal ini bobot optimal kemungkinan dan pada umumnya akan berbeda untuk setiap DMU. Jadi dalam DEA bobot dihasilkan dari data dan bukan ditentukan dari awal. Setiap DMU akan diarahkan kepada penggunaan input yang efisien dan akan menghasilkan nilai tujuan terbaik oleh setiap DMU yang ada. Model CCR yang merupakan model dasar DEA menggunakan asumsi Constant Return to Scale yang mengasumsikan bahwa penambahan satu unit input harus menghasilkan penambahan satu unit output. Asumsi lain yang digunakan adalah tiap DMU beroperasi dengan optimal. Efisiensi pada tipe ini juga disebut Overall Efficiency yakni efisiensi secara teknis dan skala. Rumus dari CRS biasa dituliskan dengan notasi berikut:

$$\text{Max} \sum_{k=1}^p \mu_k \gamma_{k0} - \mu_0$$

$$\mu_k v_i$$

$$\text{s. t.} \sum_{i=1}^m v_i X_{i0} = 1$$

$$\sum_{k=1}^p \mu_k \gamma_{kj} - \sum_{i=1}^m v_{ki} X_{ij} - \mu_0 \leq 0 \quad j = 1, \dots, n$$

$$\mu_k \geq \varepsilon, v_i \geq \varepsilon \quad \mu_k \geq \varepsilon, v_i \geq \varepsilon$$

$$k = 1, \dots, p$$

$$i = 1, \dots, m$$

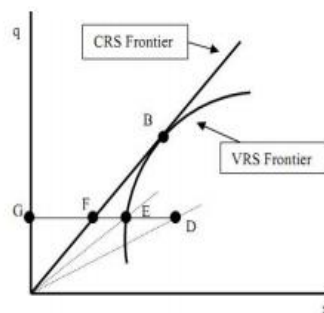
Maksimisasi di atas merupakan nilai technical efficiency(BCC), x_{ij} adalah banyaknya input tipe ke-I dari DMU ke-j, y_{kj} adalah jumlah output tipe ke-k dari DMU ke-j.

Nilai dari efisiensi tersebut selalu kurang atau sama dengan 1. DMU yang nilai efisiensinya kurang dari 1 berarti inefisien sedangkan DMU yang nilainya sama dengan 1 berarti DMU tersebut efisien.

Selain kedua model di atas, beberapa studi telah mengembangkan perhitungan Technical Efficiency (TE) dari CRS DEA menjadi dua komponen, yakni: komponen pertama mengacu pada skala efisiensi, sedangkan komponen lainnya mengacu pada TE ‘murni’. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung CRS dan VRS terhadap suatu data yang sama. Jika terdapat selisih di antara kedua skor TE dari DMU, hal tersebut mengindikasikan bahwa DMU mempunyai skala efisiensi. Nilai efisiensi skala dapat diketahui dari persamaan berikut:

$$\text{Scale Efisiensi (SE)} = \frac{TE_{crs}}{TE_{vrs}}$$

Gambar 2.4 Grafik Efisiensi CRS dan VRS



Sumber : Coelli,2005⁷⁷

⁷⁷ Ibid., hlm. 133.

Garis tengah lurus menunjukkan CRS, menggambarkan kinerja perusahaan yang berjalan optimal. Garis melengkung adalah VRS yang merupakan TE perusahaan yang kinerjanya berbeda-beda pada tiap perusahaan. Titik D menunjukkan kinerja perusahaan yang belum efisien dan belum optimal. Titik E menunjukkan kinerja perusahaan yang sudah efisien secara teknis, namun belum mencapai skala optimal. Perusahaan yang berada pada titik D dan E harus meningkatkan skalanya hingga mencapai titik B, yakni overall efficient.⁷⁸

c. Kelebihan dan Kekurangan DEA

Dari berbagai metode perhitungan efisiensi yang ada pada DEA, ada tiga kelebihan yang diperoleh. Pertama, sebagai tolok ukur untuk memperoleh efisiensi relatif yang berguna untuk mempermudah perbandingan antara unit ekonomi yang sejenis. Kedua, mengukur berbagai informasi efisiensi antar unit kegiatan ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Ketiga, menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan tingkat efisiensinya.

Akbar⁷⁹ mengemukakan bahwa DEA memiliki kelebihan dan kekurangan sebagai berikut:

⁷⁸Coelli, TJ, "A Guide to DEAP Version 2.1 : A Data Envelopment Analysis (Computer)" ,Program. Armidale. Departement of Econometrics, (University Of New England Australia, 1996), page 82.

⁷⁹Akbar, Nasher., "Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan DEA". *Jurnal Islamic Finance and Bisnis Review* volume 4 no. 2 (Bogor:Tazkia, 2009)

- 1) DEA dapat mengukur efisiensi berbagai DMU sejenis secara relatif yang mempunyai banyak input dan output.
- 2) Tidak perlu mencari asumsi bentuk hubungan antar variabel input dan output dari DMU sejenis yang akan diukur efisiensinya.
- 3) DMU langsung dibandingkan dengan yang sejenis.
- 4) Faktor input dan output dapat memiliki satuan ukuran yang berbeda. Seperti dalam penelitian ini yang mempunyai input (X_1) dalam satuan orang. Sedangkan output (Q_1) dalam jutaan rupiah. Pengukuran efisiensi tersebut dapat dilakukan tanpa perlu melakukan perubahan satuan dari variabel-variabel yang ada.

Sedangkan kekurangan yang perlu diperhatikan dari metode DEA menurut Akbar, antara lain:

- 1) Teknik perhitungan yang digunakan dalam DEA adalah extreme point technique, sehingga kesalahan pengukuran berakibat signifikan.
- 2) DEA hanya mengukur efisiensi relatif dari DMU, yakni menunjukkan perbandingan baik dan buruk dari sebuah DMU dibanding dengan DMU sejenis. DEA tidak mengukur efisiensi absolut.
- 3) DEA adalah teknik non parametrik, sehingga uji hipotesis secara sistemik tidak mudah dilakukan.
- 4) Karena tiap DMU menggunakan rumusan linier programming yang terpisah, maka perhitungan secara manual sangat rumit dan lama. Namun hal ini dapat diatasi dengan adanya software.

d. Pendekatan Pengukuran Efisiensi dengan DEA

Pengukuran efisiensi pada lembaga keuangan, termasuk lembaga nirlaba mempunyai banyak pendekatan, pendekatan yang digunakan, antara lain:

1) Pendekatan Produksi

Pendekatan ini menganggap institusi keuangan sebagai produsen dari simpanan dan kredit pinjaman. Input adalah jumlah tenaga kerja, asset tetap, dan material lainnya. Sedangkan output adalah jumlah simpanan, pinjaman, serta transaksi terkait.

2) Pendekatan Intermediasi

Dalam pendekatan ini, lembaga keuangan dianggap sebagai lembaga perantara dalam jasa keuangan, yang mengubah dan menyalurkan aset-aset keuangan dari unit-unit surplus kepada unit-unit defisit. Dalam hal ini, input-input yang digunakan adalah biaya tenaga kerja, modal, dan pembayaran bunga deposito. Output yang diukur adalah kredit pinjaman dan investasi keuangan.

3) Pendekatan Asset

Pendekatan ini melihat institusi keuangan sebagai penyalur kredit pinjaman yang outputnya diukur dengan aset-aset yang dimiliki.⁸⁰

7. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efisiensi

Abdul rahman berdasarkan hasil penelitiannya (melanjutkan penelitian Jamaliah dan Abdullah Rahim⁸¹ menyarankan tiga syarat agar zakat dapat

⁸⁰ Ibid.

efektif menjadi bagian dari sistem keuangan di Malaysia. Ketiga syarat yang dimaksud adalah (1) adanya ukuran yang objektif dan fair atas besarnya dana zakat untuk bisnis (2) adanya standar praktik akuntansi zakat (3) adanya sistem pengukuran kinerja. Jika persyaratan tersebut diaplikasikan untuk konteks Indonesia, syarat pertama dan kedua ini mudah-mudahan segera terpenuhi dengan disahkan ED PSAK no 109 tentang zakat.⁸²

Lembaga penilai independen untuk lembaga charity di Amerika Serikat, charity Navigator, juga menggunakan indikator efisiensi dan kapasitas organisasi sebagai ukuran kinerja lembaga donasi. Kedua indikator ini dihitung dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan kemudian dikombinasikan dengan bobot yang sudah ditentukan.

a. Hubungan antara keberadaan rasio Dewan Pengawas dan Dewan Direksi dengan Efisiensi

Fungsi pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen untuk menjamin pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan serta untuk memastikan bahwa tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Secara formal, lembaga zakat membuat Dewan Syariah, kedudukan Dewan Syariah dilembagakan secara struktural. Bersifat

⁸¹ Jamaliah, A. M and Abdul Rahim, A. R. (2005), Performance Measurement Practices of Public Service Religious Organizations in Malaysia, *British Accounting Association (BAA) Annual Conference*, UK: University of Heriot Watt, Edinburgh.

⁸² Ikatan Akuntansi Indonesia, 2008, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No. 109*, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta

formal disahkan melalui surat keputusan yang diangkat badan pendiri. Karena menagwasi seluruh kegiatan, secara organisasi posisi dewan syariah berada di atas pimpinan lembaga zakat. Hak dan wewenang dewan syariah, melegalisasi dan mengesahkan setiap program lembaga zakat. Juga berhak menghentikan program yang menyimpang dari ketentuan syariah. Mengingat namanya adalah dewan syariah, maka dewan syariah diisi oleh tim yang terdiri dari beberapa orang yang dianggap ahli di bidangnya. Dipimpin oleh ketua dewan syariah, yang diangkat berdasarkan kesepakatan anggota dewan syariah.

Aktivitas pengawasan syariah dalam dewan syariah dapat dibedakan atas beberapa kegiatan yakni⁸³ :

1) Pengawasan syariah

Kegiatan pengawasan syariah ini bersifat umum normatif, terutama dalam mengawasi kehidupan keseharian dengan memperhatikan nilai-nilai yang berkembang. Seluruh aspek kegiatan dapat dikonsultasikan pada pemegang syariah. Jika belum ada orang yang ahli dalam manajemen syariah dan ekonomi syariah

2) Pengawasan manajemen syariah

Bidang ini khusus mengawasi manajemen agar sesuai dengan prinsip syariah, manajemen yang bertentangan dengan syariah ditolak. Sesungguhnya ditinjau dari sudut manajemen, qur'an dan hadis berisi tentang berbagai nasehat manajemen. Hanya dalam

⁸³Eri Sudewo, *Manajemen zakat*, (Yogyakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), hal 142.

praktek manajemen kita masih lemah, kita belum bisa mengimplemtasikan nasihat manajemen itu dalam kehidupan bermasyarakat dan bermuamalah. Jadi dibutuhkan adanya orang yang memang khusus mendalami manajemen syariah.

3) Pengawasan ekonomi syariah

Islam memiliki ajaran tentang teori dan praktek ekonomi syariah belakangan ekonomi syariah makin berkembang di indonesia, dengan dibukanya jurusan ekonomi syariah diberbagai perguruan tinggi. Dalam kaitan dengan zakat ajaran ekonomi syariah menjadi amat penting , sebab zakat harus dikelola dan didayagunakan melalui pendekatan ekonomi syariah zakat yang dikelola tanpa landasan ekonomi syariah manfaatnya tidak akan dirasakan oleh kalangan fakir miskin.

Jansen dan mecking⁸⁴ dalam godfrey et.al, 1997 menyebutnya sebagai agensi problem. Masing-masing pihak dalam hal ini shareholder sebagai principal dan manajer sebagai agen memiliki kepentingan untuk memaksimalkan utulitas mereka masing-masing. Dalam kaitannya dengan efisiensi pada OPZ, callen dan Falk⁸⁵ meneliti pengaruh komposisi dewan komisaris dan debt value ratio pada lembaga charity terhadap efisiensi lembaga tersebut.

⁸⁴Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). "Theory of the firm: managerial behavior, agency costs". *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360

⁸⁵Callen, J and H Falk, "Agency and Efficiency in NPOs: The Case of SHF Charities". *The Accounting Review*. Vol 66, No. 1, 1993.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Al-Amameh⁸⁶; Jacking & Johl⁸⁷ yang meneliti tentang GCG, struktur kepemilikan dan kinerja bank, GCG yang diproksikan dengan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan yang diukur dengan ROA yaitu semakin besar ukuran dewan komisaris, akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan karena adanya teori resources dependency, bahwa dengan besarnya jumlah dewan komisaris yang lebih besar meningkatkan akses ke berbagai sumber daya terhadap lingkungan eksternal dan berdampak positif pada kinerja perusahaan. Dewan komisaris besar yang lebih beragam, memberikan perpaduan keahlian, pengetahuan dan keterampilan⁸⁸. Penelitian lain yang dilakukan oleh Ibrahim dan Samad⁸⁹, menyatakan bahwa *board size* secara signifikan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.

Karena Indonesia menganut sistem *two-tier governance*, maka dalam penelitian ini dewan komisaris diukur dengan dewan pengawas, berdasarkan data sekunder, penelitian ini melihat dari sisi fungsi dewan pengawas dalam hal controlling pekerjaan, diharapkan semakin tinggi

⁸⁶Al-Amameh, A, "Corporate Governance, Ownership Structure and Bank Performance in Jordan". *International Journal of Economics and Finance*, 2014, 6(6), 69-81.

⁸⁷Jacking, B., & Johl, S, "Board Structure and Firm Performance: Evidence from India's Top Companies". *Corporate Governance: an International Review*, 2009, 14(4), 492-509.

⁸⁸Al-Amameh, A, "Corporate Governance, Ownership Structure and Bank Performance in Jordan". *International Journal of Economics and Finance*, 2014, 6(6), 69-81.

⁸⁹ Ibrahim, H., & Samad, F. A, "Corporate Governance Mechanism and Performance of Public-Listed Family Ownership in Malaysia". *International Journal of Economics and Finance*, Februari 2011, 3(1), 13.

rasio jumlah dewan pengawas terhadap dewan direksi maka fungsi pengawasan akan semakin efektif, sehingga akan meningkat efisiensi⁹⁰. Dari penjelasan ini maka hipotesis yang dibangun adalah sebagai berikut: “Terdapat korelasi antara rasio dewan pengawas dan dewan direksi terhadap efisiensi OPZ”

b. Hubungan antara jumlah kantor cabang dan Efisiensi

Pada dasarnya suatu perusahaan jika memiliki banyak kantor cabang maka potensi pengumpulan zakatnya makin besar sebab membuka akses penghimpun yang semakin besar, mengingat kondisi geografis Indonesia yang tergolong luas, maka kehadiran kantor cabang menjadi salah satu usaha untuk memaksimalkan potensi penghimpunan zakat. Kantor terdiri dari beberapa komponen yaitu manusia, sarana dan pekerjaan. Pengelolaan yang baik dan efektif dari ketiganya akan meningkatkan nilai yang tinggi bagi perusahaan. Peran penting manajemen perkantoran dalam perusahaan antara lain :

- 1) Membantu pihak manajerial dalam membuat keputusan.
- 2) Membantu bagian lain memberikan pelayanan administrasi.
- 3) Membantu meningkatkan pelayanan pelanggan

Manfaat positif dari pengelolaan bagian perkantoran secara profesional adalah

- 1) Efisiensi perusahaan

⁹⁰Sugiyarti Fatma Laela, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat”. *Tazkia islamic finance and business review*. 2010, Vol 5 No.2

2) Meningkatkan kinerja atau performance perusahaan

3) Membangun image positif perusahaan

Dalam upaya meningkatkan keunggulan bersaing, banyak perusahaan memusatkan perhatian pada strategi eksternal, dari meningkatkan promosi hingga terobosan-terobosan pemasaran lainnya dilakukan untuk mendongkrak penjualan. Tentu saja dengan biaya yang tidak kecil⁹¹. Pengendalian perusahaan dengan manajemen perkantoran yang profesional akan memberikan efisiensi yang besar dalam operasional perusahaan

Dengan bertambahnya jumlah cabang perkantoran maka secara tidak langsung, lembaga zakat harus menempatkan orang-orang yang mempunyai kemampuan tinggi baik dalam hal teknis maupun manajerial, karena selain kegiatan teknis yang bersifat operasional, kegiatan dalam perkantoran juga bersifat strategis, dengan bertambahnya jumlah kantor cabang maka secara otomatis lembaga zakat juga harus mengupayakan agar tercipta suasana yang kondusif untuk memaksimalkan peran dan potensi setiap kantor cabang dengan cara memenuhi kegiatan manajemen perkantoran, seperti:

1) Menyediakan organisasi kantor yang efektif, agar tercapai efisiensi perusahaan.

⁹¹Steiner, G., *“Strategic Planning: What Every Manager Must Know”*. (New York: The Free Press, 1979), hlm. 78.

- 2) Mengusahakan fasilitas pelayanan & komunikasi, agar tercipta kinerja yang prima di dalam perusahaan.
- 3) Mengelola lingkungan fisik, agar tercipta kenyamanan kerja sehingga karyawan lebih produktif dalam bekerja.
- 4) Membuat standar kerja yang akan di gunakan untuk evaluasi kinerja pekerjaan kantor.⁹²

Dapat dilihat pada laporan perekonomian Indonesia tahun 2013 yang menyebutkan bahwa dari tahun 2011-2013 terdapat jumlah kantor cabang yang selalu meningkat (2011 kisaran 12.000, 2012 kisaran 14.000, dan 2013 kisaran 16.000) Peningkatan kantor cabang tersebut guna untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap sistem keuangan⁹³.

Pengembangan sistem teknologi online dalam melakukan proses pelayanan dan kegiatan operasional perusahaan agar setiap Kantor Wilayah dan Kantor Cabang bisa langsung terintegrasi dan juga untuk mengatasi keterbatasan kendaraan operasional dengan banyaknya Kantor Cabang yang memiliki jarak yang cukup jauh, sehingga proses dan kegiatan operasional perusahaan yang dilakukan bisa berjalan lebih baik dan lebih cepat. Dari penjelasan dapat ditarik hipotesa sebagai berikut:

⁹²Kotler, Philip; Singh, Ravi, "Marketing Warfare in the 1980s". *Journal of Business Strategy*, 1981, 1 (3): 30-41.

⁹³Melia Agustina Tertius dan Yulius Jogi Christiawan, *Pengaruh Good Corporate Governanceterhadap Kinerja Perusahaan pada Sektor Keuangan*. (Akuntansi Bisnis Universitas Kristen Petra, 2010), hlm 56

“Terdapat korelasi antara banyaknya jumlah kantor cabang dengan Efisiensi OPZ”

c. Hubungan antara Ukuran (size) dan Efisiensi

Ukuran perusahaan adalah suatu skala, dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara, antara lain : total aktiva, log size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini dilihat berdasarkan dari besarnya total aktiva yang dimiliki perusahaan. Aktiva merupakan suatu komponen penting dari suatu perusahaan. Asset menunjukkan aktiva yang digunakan dalam aktivitas operasional perusahaan. Peningkatan asset yang diikuti peningkatan hasil operasi akan semakin menambah kepercayaan pihak luar perusahaan dengan meningkatnya kepercayaan pihak luar terhadap perusahaan, dimungkinkan pihak kreditor tertarik menanamkan dananya ke perusahaan.

Variabel ukuran perusahaan diukur dengan logaritma (Ln) dari total asset. Hal ini dikarenakan besarnya total asset masing-masing perusahaan berbeda bahkan mempunyai selisih yang besar, sehingga dapat menyebabkan nilai yang ekstrim. Untuk menghindari adanya data yang tidak normal tersebut maka data total asset perlu di Ln kan. Penggunaan total aktiva sebagai alat ukur perusahaan didasarkan pada penelitian Sufian dan Noor, Noor dan Hayati, dan Sufian variabel ukuran perusahaan dapat dinyatakan dengan rumus:

Ukuran Perusahaan (SIZE) = Ln (Total Aktiva)

Ukuran size lazim digunakan sebagai variable kontrol untuk menganalisa lebih mendalam seandainya terdapat keberagaman hasil penelitian yang mengukur dengan eksplanatory variable yang sama. Hager et.al⁹⁴, misalnya menguji apakah ukuran (size, usia (age)) berpengaruh terhadap efisiensi lembaga charity. Hasilnya adalah bahwa semakin besar ukuran lembaga charity (total aset semakin besar), semakin efisien lembaga tersebut. Namun sebaliknya, hasil penelitian menunjukkan bahwa efisiensi tidak terakit dengan usia lembaga charity, dalam penelitian ini hipotesis ke tiga yaitu :

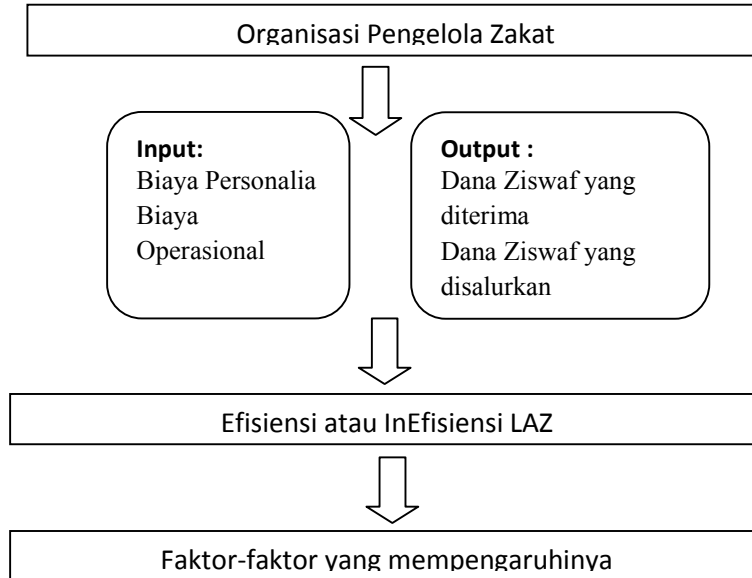
“Ukuran size OPZ memiliki pengaruh signifikan terhadap efisiensi OPZ”

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini dibangun untuk mengukur tingkat efisiensi Organisasi pengelola Zakat Nasional yakni BAZNAS, PKPU, Dompot Dhuada, dan Rumah zakat pada periode 2010-2014. Pengukuran efisiensi pada penelitian ini dilakukan melalui pendekatan produksi, dengan menggunakan asumsi VRS

⁹⁴Hager, Mark A et.al., Variations in Overhead and Fundraising Efficiency Measures: The Influence of Size, Age and Subsector. *Annual Conference of the Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action*. Miami, 2001.

Gambar 2.5 Kerangka Berpikir



Analisis ini menjelaskan interaksi input dan output dengan pendekatan produksi, pendekatan produksi akan mengukur efisiensi dari input yang berupa biaya operasional, biaya personalia, yang akan dibandingkan dengan variabel output berupa dana ziswaf yang diterima serta dana ziswaf yang disalurkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan non-parametrik. Penelitian kuantitatif menggunakan angka-angka dan data statistik tertentu. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, dan analisis data bersifat kuantitatif.⁹⁵

Pendekatan non-parametrik yang digunakan ialah *Data Envelopment Analysis (DEA)*. Pendekatan non-parametrik maksudnya adalah pendekatan statistik yang dapat digunakan dengan mengabaikan segala asumsi yang melandasi pendekatan statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Adapun asumsi umum yang melandasi pendekatan non parametrik adalah pendekatan parameter memasukkan *random error* pada *frontier*-nya sehingga dapat dilakukan pengujian secara statistik, sementara pendekatan DEA tidak memasukkan *random error* sehingga sulit dilakukan pengujian secara statistik. Setelah hasil efisiensi di peroleh dari perhitungan menggunakan metode DEA maka dilakukan uji korelasi untuk melihat faktor-faktor yang mempengaruhinya

⁹⁵Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*". (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 67.

B. Subyek dan Objek Penelitian.

Populasi dari subjek penelitian adalah Organisasi Pengelola Zakat Nasional yang mempunyai laporan keuangan yang dipublish ke khalayak umum. Pemilihan sampel dilakukan dengan teknik purposive sampling.

Badan Amil Zakat Nasional dipilih sebagai OPZ yang dikelola oleh pemerintah, Dompot Dhuafa sebagai lembaga zakat yang mengelola dana terbesar, serta Rumah Zakat dan PKPU yang merupakan lembaga zakat swasta yang masuk dalam kategori 4 besar lembaga zakat yang memiliki aset terbesar. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan OPZ tersebut pada periode 2010-2014.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan data yang berasal dari website resmi masing-masing lembaga zakat dan sebagian di peroleh di Jakarta. Penelitian dilaksanakan pada bulan april 2016.

D. Metode Pengumpulan Data

Penentuan metode pengumpulan data ini sangat berkaitan dengan variabel yang diungkap. Metode yang diperlukan agar memperoleh data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka diperlukan metode yang mampu mengungkap data sesuai yang diharapkan. Tiap-tiap metode dalam penelitian mengandung kelebihan dan kekurangan, maka perlu dipilih yang sesuai dengan kebutuhan dan permasalahannya.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, diambil dari dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain. Studi dokumenter merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berbentuk laporan, notulen rapat, catatan khusus dalam pekerjaan sosial dan dokumen-dokumen lain untuk tujuan penelitian.⁹⁶

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Penentuan variabel *input* dan *output* pada penelitian ini menggunakan pendekatan intermediasi sehingga variabel *input* dan *outputnya* ditentukan sebagai berikut:

1. Tahap 1 Pengukuran Efisiensi dengan metode DEA

Efisiensi dalam penelitian ini diasumsikan sebagai kinerja keuangan LAZ

a. Variabel Input

- 1) Biaya Personalia Biaya yang dikeluarkan oleh OPZ untuk personalia, peningkatan kinerja karyawan (amil), baik dalam pos Belanja Pegawai ataupun Pengeluaran Dana Amil dari dana ZISWAF yang diterima
- 2) Biaya Operasional Biaya yang dikeluarkan LAZ untuk operasional kantor yang tak berhubungan langsung dengan penerima manfaat

⁹⁶Soehartono, Irawan, "*Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*". (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hlm 79.

(mustahiq). Semakin banyak proporsi biaya operasional dari penghimpunan menunjukkan sebuah inefisiensi dalam penggunaan dana penghimpunan yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat. Biaya Operasional ini mencakup beban-beban serta biaya yang ada pada laporan keuangan, kecuali biaya gaji karyawan serta biaya sosialisasi ziswaf.

b. Variabel Output

1) Dana Zizwaf yang diterima Jumlah dana yang diterima adalah jumlah donasi dari masyarakat dalam bentuk uang dan barang baik via transfer maupun tunai dalam satu tahun kalender masehi yang dihitung dalam satuan rupiah. Dana ini dalam laporan keuangan kerap disebut penerimaan zakat, infak, wakaf, dan penerimaan dana kemanusiaan.

2) Dana Zizwaf yang disalurkan adalah Jumlah dana dalam bentuk uang maupun barang yang disalurkan dalam bentuk program bantuan kepada para penerima manfaat (mustahik). Jumlah dana ZISWAF yang disalurkan kerap disebut penyaluran kepada mustahiq, penyaluran program, dan sebagainya

2. Tahap kedua dengan menggunakan uji korelasi

a. Y adalah nilai efisiensi dari perhitungan tahap pertama yaitu hasil efisiensi yang dihasilkan dari metode DEA

b. X1 adalah rasio dewan pengawas dengan dewan direksi lembaga zakat

- c. X2 adalah jumlah kantor cabang tiap OPZ yang tersebar di seluruh Indonesia
- d. X3 adalah jumlah aset yang di miliki oleh tiap-tiap OPZ

F. Jenis dan sumber data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder selama periode tahun 2010-2014 lembaga zakat yang masuk ke dalam FOZ. Data sekunder yaitu data yang tidak diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian melainkan melalui pihak lain yang mempunyai data dari objek yang diteliti.

Adapun sumber data yang terkait dengan penelitian ini diambil dari publikasi lembaga zakat dalam bentuk website, atau dari situs resmi masing-masing lembaga zakat.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian dilakukan melalui dua tahap, yaitu Data Envelopment analysis (DEA) pada tahap awal, dan analisis uji korelasi spearman pada tahap kedua.

1. First stage : pengukuran efisiensi dengan metode Data Envelopment Analysis

Terdapat dua pendekatan yang digunakan dalam mengukur tingkat efisiensi yaitu pendekatan parametrik dan pendekatan non parametrik, pada penelitian ini khusus menggunakan pendekatan non parametrik dengan metode DEA (Data Envelopment Analysis)

DEA merupakan alat ukur efisiensi yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana suatu proses pengambilan keputusan dalam suatu unit, ada dua model yang digunakan dalam metode DEA yaitu model CCR (1978) dan model BCC (1984). Model DEA CCR yang dibangun oleh Charles, Choper dan Roles dikenal juga dengan nama CRS (*Constant Return to Scale*). Pada model ini diperkenalkan suatu ukuran efisiensi untuk masing-masing unit kegiatan ekonomi (UKE atau DMU) yang merupakan rasio maksimum antara output yang berbobot dengan input yang terbobot. Tiap bobot nilai yang digunakan dalam rasio tersebut ditentukan dengan batasan bahwa rasio yang sama untuk setiap UKE harus memiliki rasio yang kurang dari 1 atau sama dengan satu. Model DEA BCC yang dikenal sebagai VRS (*Variabel Return to Scale*) mengasumsikan bahwa setiap penambahan satu unit input tidak berarti diikuti dengan penambahan satu unit output, penambahan outputnya bisa lebih besar dari pada satu atau kurang dari satu. Suatu proses produksi dikatakan efisien apabila jika penggunaan sejumlah input tertentu dapat menghasilkan jumlah output yang optimal atau untuk menghasilkan jumlah output tertentu digunakan input yang minimal.

a. Model Constant Return to Scale

Model CRS disebut juga sebagai model CCR karena dikembangkan oleh Charnes, Cooper, Rhodes pada tahun 1978 model ini dikenal sebagai DEA CCR atau program garis batas (*envelopment programme*).

Model ini mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan output adalah sama (Constant return to Scale), yang berarti jika terdapat tambahan input sebesar X kali maka output juga akan meningkat sebesar X kali. Asumsi lain yang digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan beroperasi pada skala yang optimal (optimum scale).

Untuk mendapatkan skor efisiensi bagi perusahaan I yang memiliki satu input x dan output y diperoleh dengan memecahkan sistem persamaan linier, sebagai berikut

Min :

St

Dimana $Y = y_1 + y_2 + \dots + y_n$ dan $X = x_1 + x_2 + \dots + x_n$ dimana n adalah jumlah perusahaan sekawan yang di observasi, x_1 adalah inputnya untuk perusahaan sekawan 1 dan y_1 adalah output y untuk perusahaan sekawan 1, dan y_1 adalah output y untuk perusahaan sekawan 1. Dan $\lambda = \lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n$

Dalam DEA, kita juga dapat menghitung potensial improvement slack dari sistem persamaan berikut ;\

Min

St

Pada sistem persamaan linier (3.2) ini, maka nilai λ tidak dicari, namun diperoleh dari pemecahan sistem persamaan (3.1) oleh karena itu

DEA mengestimasi slack menggunakan sistem persamaan (3.2) ini disebut sebagai Second-stage DEA, sedangkan DEA yang slacknya didapat hanya dari residual sistem persamaan (3.1) disebut one-stage DEA.

b. Model Variable Return to Scale

Model ini merupakan pengembangan dari model CCR yang dilakukan oleh Banker, Charnes, dan Cooper pada tahun 1984, maka model ini disebut dengan model BCC. Model ini beranggapan bahwa perusahaan tidak atau belum beroperasi pada skala yang optimal. Persaingan dan kendala-kendala keuangan dapat menyebabkan perusahaan untuk tidak beroperasi pada skala optimalnya. Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan input dan output tidak sama (variable return to Scale). Artinya penambahan input sebesar x kali tidak akan menyebabkan output meningkat sebesar x kali, bisa lebih kecil atau lebih besar.

Efisiensi teknis (TE) yang di hitung dengan asumsi VRS inilah yang disebut sebagai efisiensi teknis “murni” (pure technical efficiency). Dengan melakukan estimasi frontier menggunakan asumsi CRS dan VRS, maka kita dapat melakukan dekomposisi efisiensi teknis pada asumsi CRS (TE crs) menjadi efisiensi murni (TE vrs) dan efisiensi skala (scale efficiency, SE) secara matematis :

$$TE_{crs} = TE_{vrs} \times SE$$

Skor efisiensi DEA dengan asumsi VRS diperoleh dengan mencari solusi system persamaan berikut ini, yang sebenarnya mirip dengan persamaan (3.1) namun dengan mengenakan kendala konveksitas $N1*\lambda = 1$, sehingga :

Min

St

Dimana $N1$ adalah $N \times 1$ vektor satu. Spesifikasi VRS adalah pendekatan yang paling sering digunakan sejak tahun 1990.

Banyak penelitian yang mendekomposisikan skor TE yang diperoleh dari CRS-DEA menjadi dua komponen, yaitu efisiensi skala (SE) dan efisiensi teknis murni (TE_{vrs}). Hal ini dapat dilakukan dengan me-run CRS-DEA dan VRS-DEA atas data yang sama, jika ada perbedaan skor TE sebuah perusahaan dengan kedua asumsi, hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut masih belum efisien secara skala. Hubungan dekomposisi ini dapat dilihat pada persamaan (5) diatas.

2. Second stage : Uji Korelasi Spearman

Pada tahap ini akan dilakukan analisis mengenai aktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi dengan terlebih dahulu mendapatkan nilai efisiensi pada tahap pertama (first stage) menggunakan DEA, maka nilai tersebut akan dianalisis dengan menggunakan beberapa variabel lingkungan untuk mengetahui hubungan dan sifat hubungan antara variabel-variabel tersebut di tahap ini dengan tingkat efisiensi (second stage). Sehingga kedua

tahap ini dalam penelitian ini disebut dengan two-stage- Data envelopment analysis, dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi digunakan metode uji korelasi

Korelasi rank Spearman adalah alat uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif dua variabel bila datanya berskala ordinal (ranking). Metode statistik ini merupakan yang pertama kali dikembangkan berdasarkan rank dan diperkirakan yang paling banyak dikenal dengan baik hingga kini. Metode korelasi rank Spearman diperkenalkan oleh Spearman pada tahun 1904. Nilai statistiknya disebut *rho*, disimbolkan dengan Metode korelasi rank Spearman adalah ukuran asosiasi yang menuntut kedua variabel diukur sekurang-kurangnya dalam skala ordinal sehingga objek-objek atau individu-individu yang dipelajari dapat di ranking dalam dua rangkaian berurut. Jadi metode korelasi rank Spearman adalah metode yang bekerja untuk skala data ordinal atau ranking dan bebas distribusi.

Nilai korelasi rank Spearman berada diantara -1 s/d 1. Bila nilai = 0, berarti tidak ada korelasi atau tidak ada hubungannya antara variabel independen dan dependen. Nilai = +1 berarti terdapat hubungan yang positif antara variabel independen dan dependen. Nilai = -1 berarti terdapat hubungan yang negatif antara variabel independen dan dependen.

Penjabaran rumus untuk menghitung cukup sederhana. Sebab hal ini membantu menunjukkan sifat hakikat koefisien, dan juga karena penjabaran tersebut akan mengungkapkan bentuk-bentuk lain yang dapat dipakai untuk menyatakan rumus. Satu di antara kemungkinan-kemungkinan bentuk yang

lain akan dipergunakan bila perlu melakukan koreksi koefisiennya karena adanya skor-skor beraneka-sama.

Konsep dan interpretasi nilai Korelasi Spearman (R_S) sama dengan konsep Koefisien Korelasi pada Regresi (Linier Sederhana). Notasi yang digunakan:

n = banyak pasangan data

d_i = selisih peringkat pasangan data ke- i

R_S = Korelasi Spearman

$$R_S = 1 - \frac{6 \sum_{i=1}^n d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

$$\text{Statistik uji} = z = R_S \times (\sqrt{n - 1})$$

Penetapan H_0 dan H_1 :

Terdapat 3 alternatif H_0 dan H_1 , yaitu:

a) H_0 : $R = 0$ (korelasi 0, tidak ada hubungan /tidak ada kecocokan)

H_1 : $R < 0$ (korelasi negatif)

Uji 1 arah dengan daerah penolakan H_0 : $z < -z_\alpha$

b) H_0 : $R = 0$ (korelasi 0, tidak ada hubungan /tidak ada kecocokan)

H_1 : $R > 0$ (korelasi positif)

Uji 1 arah dengan daerah penolakan H_0 : $z > z_\alpha$

c) H_0 : $R = 0$ (korelasi 0, tidak ada hubungan /tidak ada kecocokan)

H_1 : $R \neq 0$ (ada korelasi/kecocokan, korelasi tidak sama dengan 0)

Uji 2 arah dengan daerah penolakan H_0 : $z < -z_{\alpha/2}$ dan $z > z_{\alpha/2}$

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data Penelitian

Populasi pada penelitian ini adalah organisasi pengelola zakat yang terdaftar sebagai anggota Forum Organisasi Zakat (FOZ) di Indonesia yang masih aktif beroperasi. Organisasi pengelola zakat yang terdaftar dalam forum organisasi zakat sebanyak 30 organisasi pengelola zakat (FOZ) dikarenakan beberapa organisasi lembaga zakat tidak dapat memberikan data yang dibutuhkan serta terdapat kendala dilapangan sehingga data yang dapat diambil sebanyak 4 OPZ, rincian OPZ yang akan dijadikan objek penelitian adalah Rumah Zakat, Dompot dhuafa, Baznas, dan PKPU.

Penelitian ini menggunakan dua input dan dua output variabel input yang digunakan yaitu biaya operasional dan biaya personalia. Variabel output yang digunakan yaitu dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan.

B. Profil singkat Lembaga Amil Zakat

1. Rumah Zakat

Visi : Lembaga filantropi internasional berbasis pemberdayaan yang profesional.

Misi :

- a. Berperan aktif dalam membangun jaringan filantropi internasional.
- b. Memfasilitasi kemandirian masyarakat.

c. Mengoptimalkan seluruh aspek sumber daya melalui keunggulan insani.

BRAND VALUE Trusted Menjalankan usaha dengan profesional, transparan, dan terpercaya. Progressive Senantiasa berani melakukan inovasi dan edukasi untuk memperoleh manfaat yang lebih.⁹⁷

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas. BAZNAS menjalankan empat fungsi, yaitu:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;

⁹⁷ www.rumahzakat.org

- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat;
- d. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Untuk terlaksananya tugas dan fungsi tersebut, maka BAZNAS memiliki kewenangan:

- a. Menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat.
- b. Memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, dan LAZ
- c. Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan LAZ.

Selama 11 tahun menjalankan amanah sebagai badan zakat nasional, BAZNAS telah meraih pencapaian sebagai berikut:

- a. BAZNAS menjadi rujukan untuk pengembangan pengelolaan zakat di daerah terutama bagi BAZDA baik Provinsi maupun BAZDA Kabupaten/Kota
- b. BAZNAS menjadi mitra kerja Komisi VIII DPR-RI.
- c. BAZNAS tercantum sebagai Badan Lainnya selain Kementerian/Lembaga yang menggunakan dana APBN dalam jalur pertanggung-jawaban yang terklonsolidasi dalam Laporan Kementerian/Lembaga pada kementerian Keuangan RI.

Berbagai penghargaan bagi BAZNAS dalam empat tahun terakhir:

- a. BAZNAS berhasil memperoleh sertifikat ISO selama empat tahun berturut-turut, yaitu:

- b. Tahun 2009, BAZNAS juga mendapatkan penghargaan The Best Quality Management dari Karim Business Consulting
- c. BAZNAS berhasil memperoleh predikat Laporan Keuangan Terbaik untuk lembaga non departemen versi Departemen Keuangan RI tahun 2008.
- d. BAZNAS meraih “The Best Innovation Programme ” dan “The Best in Transparency Management” pada IMZ Award 2011.⁹⁸

3. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/ lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga independen Dompot Dhuafa Republi

Awalnya adalah sebuah kebetulan, walau sebagai orang yang beriman, kita percaya tidak ada sebuah kebetulan. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah, Sang Maha Perakayasa. April 1993, Koran Republika

⁹⁸Dikutip dari www.baznaspusat.org diakses pada tanggal 24 November 2016

menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di stadion Kridosono, Yogyakarta. Di samping sales promotion untuk menarik pelanggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham koran umum Harian Republika.

Hadir dalam acara itu Pemimpin Umum/Pemred Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat, (alm) Zainuddin MZ dan Raja Penyanyi Dangdut H. Rhoma Irama dan awak pemasaran Republika. Memang, acara itu dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan entertainment. Turun dari panggung, rombongan Republika dari Jakarta diajak makan di restoran Bambu Kuning dan di situ bergabung teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) di bawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin.

Dalam bincang-bincang sambil santap siang, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi all-round: ya guru, dai dan sekaligus aktivis sosial. Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republika pun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan

kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan bagi kalangan dhuafa.

Profesionalitas DD kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana. Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, DD merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.⁹⁹

⁹⁹Dikutip dari www.dompetdhuafa.org diakses pada tanggal 24 November 2016

4. Pos Keadilan Peduli Ummat

Krisis yang terjadi pada 1997 mempengaruhi kondisi perekonomian bangsa dan rakyat Indonesia. Menyikapi krisis yang berkembang, 17 September 1998, sejumlah anak-anak muda yang enerjik melakukan aksi sosial disebagian besar wilayah Indonesia. Menindak lanjuti aksinya, mereka kemudian menggagas entitas kepedulian publik yang bisa bergerak secara sistematis. Maka pada 10 Desember 1999 lahirlah lembaga sosial yang bernama PKPU.

Dalam perkembangannya, PKPU menyadari bahwa potensi dana ummat yang berasal dari Zakat, Infaq dan Shadaqah sangat besar. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa mengoptimalkan dana ZIS-nya untuk memberdayakan masyarakat miskin.

Visi Menjadi Lembaga Kelas Dunia yang Terpercaya Dalam Membangun Kemandirian

Misi Kemanusiaan yang kami lakukan meliputi kegiatan :

- a. Pendayagunaan: Mendayagunakan program kegawatdaruratan, recovery, pemberdayaan dalam meningkatkan kualitas hidup dan membangun kemandiria.
- b. Kemitraan: Menjalin kemitraan dengan masyarakat, dunia usaha, pemerintah, media,dunia akademis dan organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organization – CSO)lainnya atas dasar keselarasan nilai- nilai yang dianut lembaga.

- c. Riset & Pengembangan: Melakukan kegiatan studi, riset, pengembangan, dan pembangunan kapasitas yang relevan bagi peningkatan efektifitas peran Organisasi Masyarakat Sipil.
- d. Kerjasama: Berperan aktif dan mendorong terbentuknya berbagai forum kerjasamadan programsosial-kemanusiaan penting lainnya di level nasional, regional dan global.¹⁰⁰

C. Perhitungan Efisiensi

Penelitian ini menggunakan alat analisis data, yaitu Data Envelopment Analiysis Program (DEAP), pengukuran efisiensi didasarkan pada orientasi output (output oriented) yang dimaksud dengan orientasi output adalah kemampuan menghasilkan output dengan sejumlah input tertentu. sehingga dalam penelitian ini penulis akan menganalisis kemampuan dari penggunaan input biaya operasional, biaya personalia dalam menghasilkan output berupa jumlah dana yang dihimpun dan jumlah dana yang disakurkan dari masing-masing organisasi pengelola zakat di Indonesia selama tahun 2010-2014.

Sebuah OPZ dikatakan efisien bila nilainya mencapai angka 100% semakin menjauhi dari angka 100% atau mendekati 0%, maka ia semakin tidak efisien. Berikut hasil pengolahan CRS dan VRS output oriented OPZ periode 2010-2014 dengan menggunakan software DEAP.

¹⁰⁰ Dikutip dari www.pkpu.org, diakses pada tanggal 24 november 2016

Tabel. 4.1 hasil perhitungan VRS output oriented OPZ tahun 2010-2014.

No	DMU	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rumah zakat	0.824	1.000	0.840	0.791	1.000
	Skala	0.488drs	0.704 drs	0.969 drs	0.963 drs	1.000
2	Dompot Dhuafa	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Skala	1.000	1.000	1.000	0.955 drs	0.674 drs
3	Baznas	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Skala	0.827 irs	0.876 irs	1.000	1.000	1.000
4	PKPU	0.408	1.000	1.000	0.569	0.405
	Skala	0.977 irs	1.000	0.984 irs	0.979 drs	0.783 drs

Sumber : data primer (diolah)

Tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan DEA dengan asumsi VRS, terdapat hanya dua lembaga zakat yang mengalami tingkat inefisiensi pada periode penelitian, yaitu Rumah zakat yang pada tahun 2010, 2012 dan 2013 dan PKPU pada tahun 2010, 2013 dan 2014, dimana tingkat efisiensi rumah zakat pada tahun 2010 menyentuh angka 0.824 dan pada tahun 2012 menyentuh pada angka 0.840 dan nilai tersebut hampir mengarah pada nilai efisiensi sempurna yaitu 1.000. dan pada tahun 2013 menyentuh angka 0.791 sedangkan tingkat efisiensi pada lembaga PKPU pada tahun 2010 menyentuh angka 0.408 dan pada tahun 2013 menyentuh angka 0.569 angka ini cukup jauh dari angka efisiensi mengingat efisiensi sempurna adalah 1.000 sedangkan pada tahun 2014 nilainya menyentuh pada angka 0.405 nilai yang sangat jauh dari nilai efisiensi penuh yaitu 1.000 bahkan kurang dari setengah nilai efisiensi penuh. Dan tingkat efisiensi terendah dimiliki oleh lembaga PKPU pada tahun 2014 dengan nilai efisiensi 0.405 dimana nilai tersebut amat jauh dari nilai efisiensi sempurna 1.000.

Berikut adalah hasil perhitungan CRS output-oriented OPZ tahun 2011-2014.

Tabel 4.2 hasil perhitungan CRS output oriented OPZ tahun 2010-2014

No	DMU	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rumah zakat	0.402	0.814	0.704	0.762	1.000
2	Dompot Dhuafa	1.000	1.000	1.000	0.955	0.674
3	Baznas	0.827	1.000	0.876	1.000	1.000
4	PKPU	0.398	0.984	1.000	0.557	0.317

Sumber : data primer (diolah)

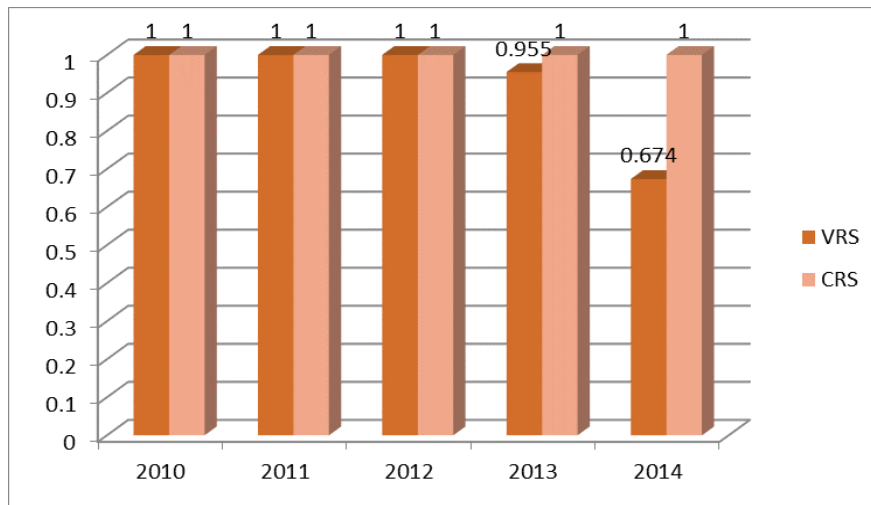
Tabel 4.2 diatas menunjukkan bahwa hasil perhitungan DEA dengan asumsi CRS menunjukkan bahwa semua lembaga mengalami efisiensi penuh (1.000) pada tahun yang berbeda, dari keempat lembaga tersebut tidak ada yang mengalami efisiensi penuh (1.000) selama periode penelitian, rumah zakat hanya mengalami efisiensi penuh hanya sekali pada periode penelitian yaitu pada tahun 2014, begitupun dengan lembaga zakat dompet dhuafa efisiensi penuh terjadi selama tiga kali selama periode penelitian yaitu pada tahun 2010, 2011 dan 2012, baznas mengalami efisiensi penuh selama tiga kali selama periode penelitian yaitu pada tahun 2011, 2013 dan 2014 sedangkan PKPU hanya mengalami efisiensi penuh selama sekali dalam periode penelitian yaitu pada tahun 2012

Dalam hal ini, melihat perbandingan yang ada berdasarkan asumsi VRS dan CRS yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menggunakan asumsi VRS dalam mengurai dan menjelaskan potensi perbaikan lembaga zakat pada subbab berikutnya. Hal ini dikarenakan ouput DEA dengan menguankan asumsi VRS lebih banyak digunakan pada penelitian sebelumnya.

Berikut ini organisasi zakat yang mengalami efisiensi selama tahun 2010-2014 :

1. Dompot Dhuafa.

4.1 Hasil perhitungan dengan asumsi VRS output oriented dompet dhuafa selama tahun 2010- 2014 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

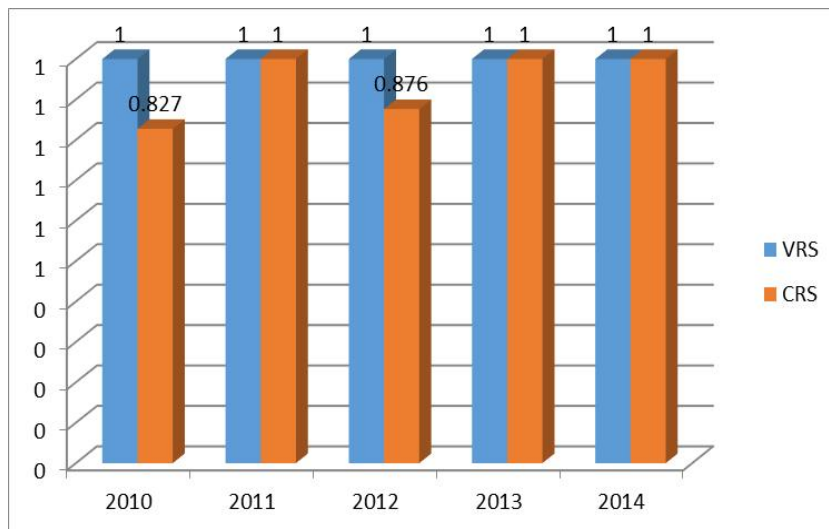


Sumber: olah data DEA

Hasil pada gambar menunjukkan bahwa dengan asumsi VRS OPZ dompet dhuafa mengalami skala efisiensi penuh selama tahun periode penelitian, berbeda dengan asumsi CRS pada tahun 2013 dan tahun 2014 tidak mengalami efisiensi penuh.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

4.2 Hasil perhitungan dengan asumsi VRS dan CRS output oriented baznas selama tahun 2010- 2014 dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Sumber: olah data DEA

Hasil gambar diatas menunjukkan bahwa dengan asumsi VRS, OPZ lembaga amil zakat baznas mengalami efisiensi penuh selama periode penelitian dimana nilainya mencapai 100%, berbeda dengan asumsi CRS, hasil nilai dengan asumsi CRS tidak akan mengalami efisiensi penuh selama periode penelitian, namun hanya pada tahun 2011, 2013, dan 2014 mengalami efisiensi penuh, selebihnya pada tahun 2010 nilai perhitungannya menyentuh angka 0,827 belum mencapai efisiensi penuh, dan pada tahun 2012 nilai perhitungannya menyentuh angka 0,876 belum mencapai efisiensi penuh.

D. Potensi Perbaikan tingkat Efisiensi Organisasi pengelola zakat (VRS)

Metode DEA yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi OPZ juga memberikan informasi tentang sumber ketidakefisienan dengan ukuran

peningkatan potensi (potencial improvement) untuk masing-masing input dan output. Angka-angka yang diperhatikan dalam perbaikan mengacu pada OPZ yang efisien. OPZ yang termasuk dalam katagori inefisien merupakan OPZ yang belum maksimal dalam menggunakan input dan output yang dimiliki. Artinya input dan output yang dimiliki belum mencapai target. Berikut ini ditampilkan OPZ yang termasuk dalam kategori inefisiensi selama periode penelitian 2010- 2014.

Tabel 4.3 Rekapitulasi lembaga zakat yang mengalami kinerja Inefisiensi pada tahun 2010-2014

No	DMU	2010	2011	2012	2013	2014
1	Rumah Zakat	√		√	√	
2	PKPU	√			√	√

Tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa terdapat dua orgasnisasi pengelola zakat yang mengalami inefisiensi yaitu rumah zakat pada tahun 2010, 2011 dan 2013 dan PKPU pada tahun 2010, 2013 dan tahun 2014.

1. Rumah Zakat

Dibawah ini merupakan data yang menunjukkan penyebab inefisiensi rumah zakat indonesia beberapa input dan output tidak memenuhi target, sehingga pada tahun 2013 rumah zakat indonesia kurang efisien dalam menggunakan input dan outputnya

Tabel 4.4 Data Pencapaian Aktual, Target, dan Potensi Perbaikan Rumah Rakat Indonesia tahun 2010

Output/input	Aktual	target	Potensi perbaikan (%)
Penerimaan dana zakat	47583953	57713538	21.28 %
Penyaluran dana zakat	39694350	48868386	23.1 %
Dana operasional	11319841	5524547	-51,19 %
Dana personalia	19577757	6150740	-68.58 %

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan tabel diatas rumah zakat Indonesia pada periode 2010 perlu melakukan perbaikan pada semua variabel, dalam hal ini yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan output penerimaan dana zakat sebesar 21,28 %
- b. Meningkatkan output penyaluran dana zakat sebesar 23,1 %
- c. Menurunkan input biaya operasional sebesar -51,19 %
- d. Menurunkan input biaya personalia sebesar -68,58 %

Tabel 4.5 Data Pencapaian Aktual, Target, dan Potensi Perbaikan Rumah Rakat Indonesia tahun 2012.

Output/input	Aktual	target	Potensi perbaikan (%)
Penerimaan dana zakat	82553076	98273159	19,04 %
Penyaluran dana zakat	7468827	85901862	10,5 %
Dana operasional	12482660	12090701	-3,14 %
Dana personalia	20334174	16643460	-18,15 %

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan tabel diatas rumah zakat Indonesia pada periode 2010 perlu melakukan perbaikan pada semua variabel, dalam hal ini yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan output penerimaan dana zakat sebesar 19,04 %
- b. Meningkatkan output penyaluran dana zakat sebesar 10,5 %
- c. Menurunkan input biaya operasional sebesar -3,14 %
- d. Menurunkan input biaya personalia sebesar -18,15 %

Tabel 4.6 Data Pencapaian Aktual, Target, dan Potensi Perbaikan Rumah Zakat Indonesia tahun 2013.

Output/input	Aktual	target	Potensi perbaikan (%)
Penerimaan dana zakat	77742418	98255710	26,38
Penyaluran dana zakat	8643861	86881558	905,124
Dana operasional	12122321	12122321	0,00
Dana personalia	26602566	19286273	-27,50

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan tabel diatas rumah zakat Indonesia pada periode 2013 tidak perlu melakukan perbaikan pada biaya operasional, akan tetapi dalam hal ini yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan output penerimaan dana zakat sebesar 26,38 %
- b. Meningkatkan output penyaluran dana zakat sebesar 905,124 %
- c. Menurunkan input biaya personalia sebesar -27,50 %

2. PKPU

Tabel 4.7 Data Pencapaian Aktual, Target, dan Potensi Perbaikan PKPU tahun 2010

Output/input	Aktual	target	Potensi perbaikan (%)
Penerimaan dana zakat	21296000	52205627	145,14 %
Penyaluran dana zakat	17895000	44520581	148,78 %
Dana operasional	5117000	5117000	0
Dana personalia	18264000	5933913	-67,51 %

Sumber : data sekunder (diolah)

Berdasarkan tabel diatas PKPU pada periode 2010 tidak perlu melakukan perbaikan pada biaya operasional, akan tetapi dalam hal ini yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan output penerimaan dana zakat sebesar 145,14 %
2. Meningkatkan output penyaluran dana zakat sebesar 148,78 %

3. Menurunkan input biaya personalia sebesar -67,51 %

Tabel 4.8 Data Pencapaian Aktual, Target, dan Potensi Perbaikan PKPU tahun 2013.

Output/input	Aktual	Target	Potensi perbaikan (%)
Penerimaan dana zakat	39525687	69499445	75,83
Penyaluran dana zakat	32623738	61575625	88,74
Dana operasional	8435200	8435200	0,00
Dana personalia	17384023	10262396	40,96

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan tabel diatas PKPU pada periode 2013 tidak perlu melakukan perbaikan pada biaya operasional, akan tetapi dalam hal ini yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan output penerimaan dana zakat sebesar 75,83 %
- b. Meningkatkan output penyaluran dana zakat sebesar 88,74 %
- c. Menurunkan input biaya personalia sebesar -40,96 %

Tabel 4.9 Data Pencapaian Aktual, Target, dan Potensi Perbaikan PKPU tahun 2014.

Output/input	Aktual	Target	Potensi perbaikan (%)
Penerimaan dana zakat	40133631	99211809	147,2 %
Penyaluran dana zakat	34227561	99017833	189,29 %
Dana operasional	10339815	10076252	-2,54 %
Dana personalia	21913994	21913994	0

Sumber: data sekunder (diolah)

Berdasarkan tabel diatas PKPU pada periode 2013 tidak perlu melakukan perbaikan pada biaya personalia, akan tetapi dalam hal ini yang perlu diperbaiki adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan output penerimaan dana zakat sebesar 147,2 %
- b. Meningkatkan output penyaluran dana zakat sebesar 189,29 %
- c. Menurunkan input biaya operasional sebesar -2,54 %

E. Uji Korelasi

Pada tahap selanjutnya dalam penelitian ini akan dianalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi OPZ menggunakan regresi data panel sehingga secara keseluruhan prosedur dalam penelitian ini disebut Two-Stage Data Envelopmet Analysis. Dalam analisis uji korelasi digunakan software SPSS 16. Hasil analisis uji korelasi Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat, Dalam penelitian ini digunakan korelasi sederhana yaitu dengan teknik korelasi Spearman. Teknik korelasi spearman adalah suatu korelasi antara variabel bebas dengan variabel terikat. Angka yang menunjukkan arah dan besar kuatnya hubungan antara suatu variabel bebas dengan satu variabel terikat disebut koefisien korelasi. Untuk menunjukkan besarnya keeratan hubungan antara dua variabel acak yang masing-masing memiliki skala pengukuran minimal interval dan berdistribusi bivariat

Untuk mendapatkan koefisien korelasi pada penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS.16, berikut hasil uji korelasi non parametrik spearman rho :

Tabel 4.10 Hasil Uji Korelasi

	Y	X1	X2	X3
Y	1.000	0.000	-0.710	0.265
X1	0.000	1.000	-0.316	0.086
X2	-0.710	-0.316	1.000	0.039
X3	0.265	0.086	0.039	1.000

Sumber: Olah Data SPSS.16

Berdasarkan hasil perhitungan uji korelasi diatas, untuk melihat hubungan efisiensi dengan rasio dewan pengawas dan dewan direksi, jumlah kantor cabang, dan jumlah aset diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.11 Uji Hipotesis Hubungan Y dengan X1

Correlations		
	y	x1
Correlation Coefficient	1.000	.000
N	20	20
Correlation Coefficient	.000	1.000
N	20	20

Sumber: olah data SPSS

Berdasarkan uji korelasi antara dewan pengawas dan dewan direksi terhadap efisiensi diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Tidak ada korelasi antara rasio dewan pengawas dan dewan direksi terhadap efisiensi lembaga zakat
2. Tidak adanya korelasi antara rasio dewan pengawas dan dewan direksi terhadap efisiensi hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisiensi sebesar 0.000

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara rasio dewan pengawas dan dewan direksi terhadap efisiensi lembaga zakat, maka ketika rasio dewan pengawas dan dewan direksi meningkat maka hal ini tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap efisiensi, hal ini disebabkan karena sumber utama pengawasan dalam lembaga zakat ialah pengawasan melekat yang sesungguhnya bisa menjadi dasar seluruh tipe pengawasan,yaitu

pengawasan dari dalam diri amil masing-masing yang diterapkan kapan saja dan dalam kondisi apapun. Pengawasan melekat bisa berjalan baik jika dalam diri amil telah terbangun sikap untuk mengawasi diri sendiri. Pengawasan melekat yang baik, punya kontribusi besar bagi pengawasan berkala.

Tabel 4.12 Uji Hipotesis Hubungan Y dengan X2

Correlations		
	Y	x2
Correlation Coefficient	1.000	-.710**
N	20	20
Correlation Coefficient	-.710**	1.000
N	20	20

Sumber : Olah data SPSS

Berdasarkan uji korelasi antara jumlah kantor cabang dan efisiensi diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Terdapat korelasi antara jumlah kantor cabang dengan efisiensi lembaga zakat
2. Korelasi antara jumlah kantor cabang dengan efisiensi adalah kuat, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien korelasinya yaitu -0,710 dengan arah koefisien yang negatif

Adanya hubungan korelasi yang kuat antara jumlah kantor cabang dengan efisiensi dengan arah yang negatif menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kantor cabang maka efisiensi lembaga zakat semakin menurun. dalam penelitian ini disebabkan karena semakin banyaknya jumlah kantor cabang maka membutuhkan biaya operasional yang semakin besar, seperti

yang terlihat pada PKPU yang memiliki jumlah aset terbesar kedua setelah Dompot dhuafa namun dalam perhitungan efsiensinya selama periode penelitian 2010-2014 baik dengan asumsi VRS dan CRS tidak mengalami efeisiensi, begitupun dengan biaya personalia sebab dengan pembukaan kantor cabang yang baru maka membutuhkan SDM yang semakin banyak pula, hal ini kadang tidak diimbangi dengan besarnya jumlah zakat yang terhimpun sebab masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa transfer dengan memanfaatkan layanan teknologi secara online yang tersedia, dengan Menganalisis pembukaan kantor cabang baru maka apabila kantor cabang baru menguntungkan bagi perusahaan, maka dapat diteruskan. Tetapi apabila tidak menguntungkan maka akan dihentikan atau dialihkan ke kantor cabang lain supaya mampu memberikan kontribusi yang maksimal dan kegiatan distribusi operasional bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Tabel 4.13 Uji Hipotesis Hubungan Y dengan X3

Correlations		
	y	x3
Correlation Coefficient	1.000	.265
N	20	20
Correlation Coefficient	.265	1.000
N	20	20

Sumber : Olah data SPSS

Berdasarkan uji korelasi antara jumlah aset dan efisiensi diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

1. Terdapat korelasi antara jumlah aset dan efisiensi lembaga zakat
2. Korelasi antara jumlah aset dan efisiensi adalah cukup, hal ini terlihat dari nilai koefisien korelasi yaitu 0,265

Adanya hubungan korelasi yang cukup atau tidak terlalu tinggi antara jumlah aset terhadap efisiensi disebabkan karena tidak hanya efisiensi dalam operasional yang ingin dicapai, efisiensi dalam hal fungsi intermediasinya, hasil perhitungan ini seperti yang terdapat pada penelitian Sugiyarti Fatma¹⁰¹ yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi OPZ, hasil dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa ukuran size (asset) tidak berpengaruh pada efisiensi Organisasi Pengelola zakat.

F. Pembahasan

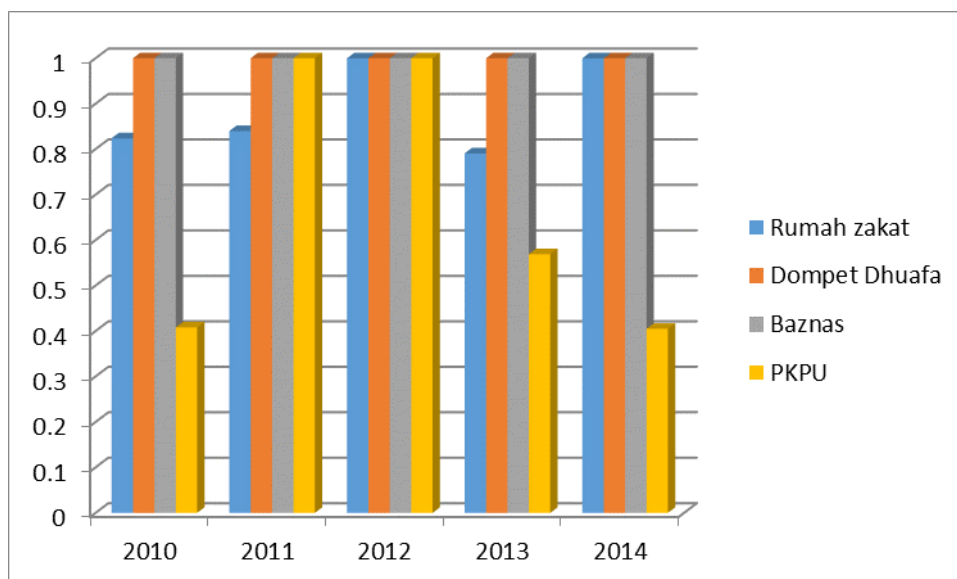
Pengukuran tingkat efisiensi organisasi pengelola zakat Anggota Forum Zakat tahun 2010-2014 menggunakan pendekatan non parametrik DEA. Hasil menunjukkan bahwa tidak ada satupun organisasi pengelola zakat yang mengalami skala efisiensi penuh baik dengan asumsi CRS maupun VRS, hal ini membuktikan secara umum organisasi pengelola zakat bisa dikatakan belum efisien, organisasi pengelola zakat dengan asumsi VRS selama tahun 2010-2014 rata-rata belum optimal masih mengalami pergerakan yang fluktuatif. Nilai mean pada tahun 2012 mengalami efisiensi penuh sebesar 100 % sedangkan pada tahun 2011 nilai mean mengalami penurunan sebesar 96 % disebabkan nilai VRS rumah zakat tidak mencapai 100 % yaitu menyentuh

¹⁰¹Fatma, Sugiyarti, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi P. pengelola Zakat". *Jurnal Tazkia.*, tahun 2010, Vol 5.

angka 0,840 dan pada tahun 2010 pun mengalami penurunan sebesar 80,8 % dimana nilai VRS rumah zakat dan dan PKPU tidak mengalami efisiensi penuh, kembali pada tahun 2013 nilai mean mencapai 84 % disebabkan nilai VRS rumah zakat dan PKPU tidak mencapai 100 % dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 85, 1 % disebabkan karena nilai VRS Rumah zakat dan PKPU yang tidak mencapai efisiensi penuh.

Dan untuk perhitungan dengan asumsi CRS, diperoleh hasil bahwa selama periode waktu penelitian 2010-2014 tidak ada nilai mean yang mencapai efisiensi penuh, pada tahun 2010 nilai mean menyentuh angka 65,7 % kemudian pada tahun 2011 naik menjadi 94, 9 % hal ini disebabkan karena pada tahun itu ada dua OPZ yang mengalami efisiensi penuh yaitu dompet dhuafa dan Baznas, kemudian pada tahun 2012 hingga pada tahun 2014 mengalami penurunan yang terus menerus yaitu pada tahun 2012 nilai meannya sebesar 89,5 % dan pada tahun 2013 turun sebesar 81,8 % kembali mengalami penurunan pada tahun 2014 yaitu nilai mean sebesar 74 %.

Gambar 4.3 Hasil perhitungan Asumsi CRS dan VRS Rumah Zakat, Domept dhuafa, Baznas, dam PKPU tahun 2010-2014



Sumber : Olah data DEA

Angka pada garis vertikal menunjukkan nilai efisiensi antara lembaga OPZ antara anggota FOZ selama tahun 2010-2014. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kondisi yang berbeda-beda dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut menandakan bahwa secara makro kinerja OPZ belum optimal dikarenakan tingkat efisiensi yang belum mencapai 100 %. Sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap input serta output yang belum mencapai target sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi OPZ. Inefisiensi disebabkan oleh penggunaan input yang berlebih atau pencapaian output yang masih minim, berdasarkan pendekatan input.

Gambar diatas menunjukkan bahwa efisiensi baznas yang mempunyai skor 1 atau mempunyai kinerja yang efisien. Semua variabel mempunyai nilai aktual yang sama dengan nilai proyeksi. Tidak perlu ada peningkatan dari output ataupun penurunan input dari variabel yang sudah ada. Seperti halnya dengan lembaga Zakat Dompot Dhuafa yang mengalami efisiensi penuh selama periode penelitian.

Sedangkan untuk lembaga zakat yang mengalami inefisiensi selama periode penelitian yaitu rumah zakat dan PKPU, kinerjanya masih perlu ditingkatkan lagi, baik minimalisasi variabel input seperti biaya personalia dan biaya operasional, serta peningkatan output yang ada variabel dana zizwaf yang diterima, seperti pada inefisiensi lembaga zakat rumah zakat yang terjadi pada tahun 2010 biaya personalia yang dikeluarkan ialah sejumlah 19.577.757

sedangkan besarnya biaya yang di proyeksikan oleh DEA adalah 6.150.740 sehingga potensi perbaikannya mencapai -68.58 persen yang berarti bahwa biaya personalia rumah zakat harus di turunkan sebesar -68.58 persen. Pada lembaga zakat rumah zakat berdasarkan pendekatan input, proyeksi perbaikan dari tahun 2010-2014 menunjukkan perbaikan banyak di tunjukkan pada biaya personalia, maka untuk mencapai efisiensi penuh rumah zakat harus melakukan penurunan pada biaya personalia, sedangkan pada pendekatan output berdasarkan proyeksi perbaikan, dana yang disalurkan harus lebih dioptimalkan lagi untuk mencapai efisiensi sempurna.

Sedangkan pada PKPU selama periode penelitian berdasarkan pendekatan input mayoritas proyeksi perbaikan ada pada biaya personalia, maka untuk mencapai efisiensi sempurna PKPU perlu menurunkan biaya personalianya, sedangkan pada sisi output mayoritas proyeksi perbaikan berada pada dana yang disalurkan, maka untuk mencapai efisiensi sempurna dana yang disalurkan harus ditingkatkan sesuai dengan proyeksi potensi perbaikan.

Hal ini merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmad Kadry (2014)¹⁰² yang meneliti efisiensi zakat dengan 4 sampel organisasi lembaga zakat dan menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil penelitiannya menunjukkan 3 lembaga mengalami inefisiensi yaitu Rumah

¹⁰²Rahmad Kadri, Analisis Efisiensi LAZ di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (Studi Kasus pada RZ, Lazis Swadaya Ummah, Dompot Dhuafa, dan YBUI BNI Tahun 2010-2012). Skripsi.(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Zakat, Laziz Swadaya Ummah dan Dompot dhuafa, hal ini menunjukkan kesamaan pada lembaga Zakat Rumah Zakat yang juga tergolong lembaga zakat yang mengalami inefisiensi selama periode penelitian, akan tetapi berbeda halnya dengan Dompot Dhuafa yang dalam penelitian ini memiliki nilai skala efisiensi 100 % selama periode penelitian, namun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh August Wiharyono (2015) dimana hasil penelitiannya menunjukkan hasil bahwa salah satu lembaga zakat yang mengalami efisiensi penuh selama periode penelitian ialah Dompot dhuafa.

Meskipun beberapa OPZ mengalami penurunan tapi ada beberapa OPZ yang mengalami efisiensi penuh 100 %, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap input serta output yang belum mencapai target sehingga mempengaruhi tingkat efisiensi OPZ .berdasarkan hasil analisis potensi perbaikan beberapa OPZ perlu meningkatkan kinerja output serta penerimaan dana serta penyaluran dana, hal ini diperkuat juga dengan hasil jika peningkatan output tidak dilakukan maka biaya operasional sebaiknya dikurangi. Sebagai salah satu contoh rumah zakat yang terjadi pada tahun 2013. Rumah zakat mengalami inefisiensi dikarenakan target output tidak tercapai, berdasarkan analisis potensi perbaikan, Rumah zakat perlu meningkatkan output penerimaan dana sebesar 26,38 % dan output penyaluran dana sebesar 905,12 % dan menurunkan input biaya operasional sebesar -27,50 % penerimaan dana, penyaluran dana, dan biaya operasional saling berhubungan karena untuk kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana OPZ mengandalkan dana operasional. Maka dari itu jika penghimpun dana dan

penyaluran dana tidak meningkat maka biaya operasional harus diturunkan dengan berpedoman pada angka yang ditunjukkan di hasil potensi perbaikan, lembaga yang mengalami efisiensi sempurna setiap tahunnya seperti dompet dhuafa dan baznas dapat dijadikan acuan dalam mengatur atau mengelola lembaga zakat, sehingga kedepannya lembaga zakat yang belum mengalami efisiensi sempurna dari tahun ke tahun mampu meningkatkan kinerja lembaganya menjadi lebih baik lagi.

Metode DEA juga mampu mengukur dan memastikan apakah sebuah DMU sudah mengoptimalkan kapasitas produksinya, yakni seberapa optimal penggunaan input dalam menghasilkan output. Dalam hal ini, sebuah DMU akan memiliki salah satu dari tiga kondisi Return To Scale (RTS), yaitu Increasing Return To Scale (IRS), Constant Return To Scale (CRS), dan Decreasing Return To Scale (DRS).

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa 4 OPZ berada dalam kondisi IRS dan ada 8 OPZ yang mengalami kondisi DRS, selebihnya dalam kondisi CRS, kondisi IRS memungkinkan untuk terus meningkatkan kapasitas outputnya, dengan mempertahankan input yang ada, karena penambahan input justru tidak efektif mengingat sumber daya yang digunakan masih belum berfungsi secara optimal. Adapun kondisi DRS menuntut adanya pengurangan input, karena jumlah input sudah tidak ideal. Coelli¹⁰³ mengungkapkan bahwa pasar persaingan yang tidak sempurna, regulasi pemerintah, terbatas keuangan, dll dapat menyebabkan sebuah firm tidak beroperasi pada titik *optimum scale*

¹⁰³Coelli, Timothy J, D.S. Prasada Rao, Christopher J. O'Donnell dan George E. Battese, An Introduction to Efficiency and productivity Analysis, 2005, edisi kedua. Springer

(skala optimal). Rendah efisiensi skala berdampak pada rendahnya efisiensi secara overall.¹⁰⁴

Kemudian setelah mengukur tingkat efisiensi masing-masing OPZ maka selanjutnya menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efisiensi OPZ, berdasarkan hasil pengolahan dengan software SPSS.16 diperoleh penjelasan sebagai berikut:

1. Pengaruh rasio dewan pengawas dan dewan direksi terhadap efisiensi

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah diduga rasio dewan pengawas dan dewan direksi memiliki korelasi positif terhadap tingkat efisiensi lembaga zakat

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara rasio dewan pengawas dan dewan direksi terhadap efisiensi lembaga zakat, maka ketika rasio dewan pengawas dan dewan direksi meningkat maka hal ini tidak akan memberikan pengaruh apa-apa terhadap efisiensi, hal ini disebabkan karena sumber utama pengawasan dalam lembaga zakat ialah pengawasan melekat yang sesungguhnya bisa menjadi dasar seluruh tipe pengawasan, diterapkan kapan saja dan dalam kondisi apapun. Pengawasan melekat bisa berjalan baik jika dalam diri amil telah terbangun sikap untuk mengawasi diri sendiri, pengawasan telah built-in melekat inheren dalam diri setiap amil. Pengawasan melekat ini, secara tegas memosisikan amil menjadi pengawas setiap program. Secara moral fungsi ini melegakan amil karena bisa bekerja dan beribadah sekaligus. Secara tak langsung amil

¹⁰⁴Tazkia islamic fiananse & business review. Vol. 4 No.2

dipaksa dewasa, matang, dan sangat bertanggung jawab. Substansi inilah yang membedakan dengan lembaga sosial umum lainnya. Pengawasan melekat yang baik, punya kontribusi besar bagi pengawasan berkala.

2. Pengaruh banyaknya kantor cabang terhadap efisiensi lembaga zakat

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah diduga terdapat korelasi positif banyaknya kantor cabang terhadap efisiensi lembaga zakat

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa adanya hubungan korelasi yang kuat antara jumlah kantor cabang dengan efisiensi dengan arah yang negatif hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah kantor cabang maka efisiensi lembaga zakat semakin menurun. dalam penelitian ini disebabkan karena semakin banyaknya jumlah kantor cabang maka membutuhkan biaya operasional yang semakin besar, seperti yang terlihat pada PKPU yang memiliki jumlah aset terbesar kedua setelah Dompot dhuafa namun dalam perhitungan efisiensi nya selama periode penelitian 2010-2014 baik dengan asumsi VRS dan CRS tidak mengalami efisiensi, begitupun dengan biaya personalia sebab dengan pembukaan kantor cabang yang baru maka membutuhkan SDM yang semakin banyak pula, hal ini kadang tidak diimbangi dengan besarnya jumlah zakat yang terhimpun sebab masyarakat lebih memilih untuk menggunakan jasa transfer dengan memanfaatkan layanan teknologi secara online yang tersedia, dengan Menganalisis pembukaan kantor cabang baru maka apabila kantor cabang baru menguntungkan bagi perusahaan, maka dapat diteruskan. Tetapi apabila tidak menguntungkan maka akan dihentikan atau dialihkan ke

kantor cabang lain supaya mampu memberikan kontribusi yang maksimal dan kegiatan distribusi operasional bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

3. Pengaruh aset terhadap efisiensi

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini diduga bahwa aset memiliki korelasi yang kuat terhadap efisiensi

Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa adanya hubungan korelasi dimana tingkat korelasinya adalah cukup antara jumlah aset terhadap efisiensi disebabkan karena dalam hal ini lembaga zakat masuk dalam kategori lembaga non profit dimana lembaga nirlaba tidak terfokus pada bagaimana mencari laba sebanyak-banyaknya, tiap lembaga nirlaba punya visi misi yang khusus, dana yang di peroleh hanya digunakan untuk biaya operasional, aset yang di miliki lembaga nirlaba tidak boleh *make money* dalam kegiatannya, aset yang dimiliki digunakan untuk kepentingan lembaga maupun mustahik, untuk kepentingan lembaga seperti pembelian asset bergerak dan tidak bergerak, sedangkan untuk kepentingan mustahik dapat berupa pemberian atau penambahan modal pada usaha mustahik yang sudah memperlihatkan perkembangan yang menjanjikan. hasil perhitungan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Sugiyarti Fatma¹⁰⁵ yang meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi OPZ, hasil dari penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa ukuran size (asset) tidak berpengaruh pada efisiensi Organisasi Pengelola zakat.

¹⁰⁵Fatma, Sugiyarti. 2010. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat*. Jurnal Tazkia. Vol 5

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi Organisasi Pengelola zakat (OPZ) di Indonesia pada periode 2010 – 2014 menunjukkan suatu trend yang fluktuatif dan masih termasuk ke dalam kategori inefisien atau belum optimal dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya dengan nilai rata-rata. Secara individu lembaga zakat dompet dhuafa dan baznas memiliki tingkat efisiensi rata-rata tertinggi dengan skor efisiensi sempurna selama periode penelitian, sedangkan lembaga zakat Rumah Zakat dan PKPU masuk dalam kategori inefisien.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efisiensi Organisasi pengelola zakat di Indonesia, dengan menggunakan metode uji korelasi maka diperoleh hasil Efisiensi memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap asset, dan memiliki korelasi yang kuat terhadap banyaknya jumlah kantor cabang dengan arah koefisien korelasi negatif namun tidak memiliki korelasi sama sekali terhadap rasio dewan pengawas dan dewan direksi.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Kepada seluruh OPZ anggota FOZ diharapkan agar dapat mempubikasi data laporan keuangan baik media cetak maupun elektronik sehingga bisa dengan

mudah untuk meneliti yang akan mencari data yang dibutuhkan sebagai bahan perbaikan untuk setiap OPZ.

2. jumlah subjek penelitian masih terbatas. penelitian dilakukan hanya pada empat OPZ, hal ini menyebabkan penilaian efisiensi belum bisa mencakup semua lembaga zakat yang masuk dalam OPZ. hal ini dikarenakan keterbatasan data yang didapat oleh penulis.

C.Saran

1. Kepada OPZ yang mengalami inefisiensi, secara professional segera melakukan perbaikan dalam kinerja input maupun output yang belum mencapai target. Sebagai catatan berdasarkan analisis potensi perbaikan, dalam hal ini Rumah Zakat yang selama periode penelitian yang mengalami inefisiensi potensi perbaikannya terdapat pada semua variabel, yaitu peningkatan output penerimaan dana zakat, peningkatan output penyaluran dana zakat, penurunan input biaya personalia dan penurunan input biaya operasional. Akan tetapi potensi perbaikan terbesar merujuk pada variabel peningkatan output penyaluran dana zakat. Sedangkan pada lembaga zakat PKPU selama periode penelitian tahun 2010 dan 2013 potensi perbaikan merujuk pada peningkatan output penerimaan dana zakat, peningkatan penyaluran dana zakat, dan penurunan input biaya personalia, sedangkan pada tahun 2014 potensi perbaikan merujuk pada peningkatan output penerimaan dana zakat, peningkatan output penyaluran dana zakat dan penurunan input biaya operasional.

2. Kepada peneliti selanjutnya agar dapat melakukan analisis kinerja efisiensi dengan menggunakan input dan output yang berbeda sehingga nantinya dapat memberikan tambahan literatur tentang kinerja efisiensi OPZ anggota FOZ di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid., 2008, *Potensi dan Ironi Zakat*. Jakarta:PIRAC
- Akbar, Nasher., 2009, *Analisis Efisiensi Organisasi Pengelola Zakat Nasional dengan Pendekatan Data Envelopment Analysis*. Jurnal Islamic Finance and Business Review volume 4 no.2. Bogor: Tazkia.
- Al Qurthubi, Abu Abdullah bin Ahmad bin Abu Bakar., 2006, *Al Jami' Li Ahkam Al Quran*, Muassasah Ar-Risalah Jilid 13. Jakarta : Gema Insani Press.
- Al-Qasim, Abu Ubaid., 2006, *Ensiklopedia Keuangan Publik* (Terj.). Jakarta: Gema Insani Press
- An-Nabhani, Taqiyuddin., 2004, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafiduddin, et. At. Jakarta: Robbani Press
- Ash Shidieqy, Muhammad Hasbi., 2001, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum 7*. Jakarta:Pustaka Rizki Putra
- ash-Shiddieqy, Muhammad Hashbi., 2002, *Pedoman Zakat*. Semarang : PT. Pustaka Rizki Putra
- Badan Pusat Statistik., 2014, *Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini, 2010-2013*, diakses dari <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/946>,
- _____, 2014, *Jumlah Penduduk Miskin di Indonesia*, diakses dari <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1494> pada hari Kamis, 24 Januari 2015 pukul 15:27 WIB
- Bapennas., 2014, *Profil Pembangunan Provinsi DIY 2013*. diakses dari <http://simreg.bappenas.go.id/Profil/Profil%20Pembangunan%20Provinsi%203400DIY%202013.Pdf>, diakses pada hari Kamis, 24 Januari 2015
- Beik, Irfan Syauqi., 2008, *Pro Ekonomi Syariah Pro Rakyat*. Jakarta: Republika
- Beik, Irfan Syauqi., 2009, *Analisis Peran Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan. Jurnal Pemikiran dan Gagasan, Zakat and Empowering*. Jakarta: Indonesia Magnifiance of Zakat

- Bin Baz, Syaikh Abdul Azis., 2009, *Zakat. Indonesia*:Raudlatul Muhibbin.
- Boediono., 1993, *Ekonomi Makro*, Edisi ke-4. Yogyakarta: BPFE UGM
- Brigham, eugene F. Dan J Fred Weston. 1994. *Dasar-dasar Manajemen Keuangan*, Jolid . edisi kesembilan. Jakarta:Erlangga
- Chu-Fen Li., 2007, “*Problem in Bank Branch Ineficiency: Management, Scale and Location.*” *Asian Journal of Management and Humanity Sciences*. Vol 1, No.4
- Coelli, Timothy J, D.S. Prasada Rao, Christopher J. O’Donnell dan George E. Battese., 2005, *An Introduction to Efficiency and productivity Analysis*, edisi kedua. Springer.
- Coelli, TJ., 1996, *A Guide to DEAP Version 2.1 : A Data Envelopment Analysis (Computer) Program*. Armidale : Department of Econometrics, University of New England Australia
- Dahlan, Abdul Aziz., 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve
- Departemen Pendidikan Nasional., 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- DPPTAI., 1983, *Ilmu Fiqh*. Jakarta: DPPTAI
- Ghafur Muhammad., 2007, *Potret Perbankan Syariah di IndonesiaTerkini: Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Biruni Press
- H, Muharram dan Pusvitasari R., 2007, *Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode 2005)*. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Vol II, No. 3. Yogyakarta
- Hafiduddin, DR. Didin., 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press
- Handoko, T. Hani., 2009., *Manajemen*. Yogyakarta:BPFE
- Insukindro., 2000, *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Yogyakarta : Bank Indonesia dan MEP UGM

- Iskandar, Tatang., 2014, *Analisis Efisiensi Kinerja Keuangan pada Lembaga Amil Zakat Pos Keadilan Peduli Umat Yogyakarta Periode Tahun 2004-2008*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Kadri, Rahmad., 2014, *Analisis Efisiensi LAZ di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (Studi Kasus pada RZ, Lazis Swadaya Ummah, Dompot Dhuafa, dan YBUI BNI Tahun 2010-2012)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga
- Kemenkeu., 2013, *Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. Jakarta: Kementerian Keuangan
- Mahmudi. *Akuntansi Dana pada Organisasi Nirlaba*. Makalah disampaikan pada Workshop Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat, 12-14 November 2007, Universitas Islam Indonesia
- Muhammad, 2005, *Bank Syariah Problem dan Proses Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Muharram, Harjum dan Rizki Pusvitasari, *Analisis Perbandingan Efisiensi Bank Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (Periode tahun 2005, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, (Yogyakarta), Vol II, No. 3,*
- Nugraha, Muhammad Biwa., 2009, *Analisis Perkembangan Efisiensi Teknis Bank Syariah di Indonesia dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Tahun 2005-2009*. Jurnal Media Ekonomi volume 19 no.1.
- PIRAC., 2004, *Membangun Kesejahteraan dengan Zakat*. Jakarta: Piramedia
- Purwantoro, R. Nugroho. Erwinta Siswadi., 2006, *Pengolahan Data Skala Terbatas dengan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Studi Kasus Efektivitas Proses Peluncuran Produk Baru*. Jakarta: Universitas Indoensia
- Qardhawi, Yusuf., 2004, *Hukum Zakat*. Jakarta : PT. Pustaka Litera Antarnusa
- Qardhawi, Yusuf., 2005, *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta : Zikrul Hakim

- Rahmayanti, Anisa., 2014, *Efisiensi Lembaga Amil Zakat dalam Mengelola Dana Zakat di Indonesia (Studi Kasus: PKPU, Rumah Zakat, dan BAMUIS BNI)*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Siswadi, Erwinta. Wilson Arafat., 2004, *Mengukur Efisiensi Relatif Kantor Cabang LAZ dengan Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA)*. Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia No. 1/TH. XXXIII.
- Soehartono, Irawan., 2000, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sugiyono., 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta
- Sumarjono, D., 2004, *Diktat Kuliah Ilmu Ekonomi Produksi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Susilowati, Indah., 2004, *Modul Perkuliahan Pengukuran Efisiensi melalui Data Envelopment Analysis (DEA)*. Semarang: FE UNDIP
- Tempo., 2014, *Target Pengurangan Kemiskinan di Yogya Meleset*, diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2014/04/02/173567339/TargetPengurangan-Kemiskinan-di-Yogya-Meleset>,
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Worldbank., 2014, *Gross Domestic Product 2013*, diakses dari <http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf> , pada hari Jumat,
- Wulandari, Retno., 2013, *Analisis Efisiensi Lembaga Amil Zakat Nasional Di Indonesia menggunakan Metode Data Envelopment Analysis (DEA) Periode 2011-2012*. Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Zamil, Nor Aiza Mohd., Abdul Rahim Abdul Rahman., 2006, *Efficiency of Islamic and Conventional Commercial Banks in Malaysia: A Data Envelopment Analysis (DEA) Study*. Malaysia : IIUM.
- Zuhri, Muh., 2000, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta : PT Raya Grafindo Persada

Lampiran - Lampiran

No	Nama lembaga zakat	Tahun	Penerimaan Dana Zakat	Penyaluran dana zakat	biaya personalia	Biaya operasional	ASET
1	Rumah Zakat Indonesia	2010	47583953	39694350	11319841	19577757	Rp 26.338.000
2	Dompot dhuafa	2010	57713538	48868386	5524547	6150740	Rp 148.474.908
3	BAZNAS	2010	23661022	21988197	3004898	4810217	Rp 20.796.115
4	PKPU	2010	21296000	17895000	5117000	18264000	Rp 42.887.000
1	Rumah Zakat Indonesia	2011	61099865	52786409	13600951	18325107	Rp 24.890.191
2	Dompot dhuafa	2011	74971733	51393581	9440497	11788762	Rp 195.857.620
3	BAZNAS	2011	32986950	21998197	5112836	5919220	Rp 16.589.472

4	PKPU	2011	25600714	22074368	3204384	10457067	Rp 43.131.792
1	Rumah Zakat Indonesia	2012	82553076	7468827	12482660	20334174	Rp 34.044.631
2	Dompot dhuafa	2012	98273159	85901862	12090701	16643460	Rp 240.390.322
3	BAZNAS	2012	40387972	36019080	5013782	3853478	Rp 22.105.699
4	PKPU	2012	35721419	23491639	4465177	11927046	Rp 54.905.336
1	Rumah Zakat Indonesia	2013	77742418	8643861	12122312	26602566	Rp 35.942.296
2	Dompot dhuafa	2013	124333855	109830708	15466037	27469741	Rp 294.362.096
3	BAZNAS	2013	50741735	45068566	6030097	4376122	Rp 27.981.168
4	PKPU	2013	39525687	32623738	8435200	17384023	Rp 55.273.074
1	Rumah Zakat Indonesia	2014	80596311	80361168	6329814	14515586	Rp

							39.440.450
2	Dompel dhuafa	2014	125989558	125854799	15465373	32556347	Rp 288.962.741
3	BAZNAS	2014	50741735	45068566	6030097	4376122	Rp 39.861.217
4	PKPU	2014	40133631	34227561	10339815	21913994	Rp 58.752.103

Perhitungan DEA

Tahun 2010

Results from DEAP Version 2.1

Instruction file = eq-ins10.txt

Data file = eq-dta10.txt

Output orientated DEA

Scale assumption: VRS

Slacks calculated using multi-stage method

EFFICIENCY SUMMARY:

firm crste vrste scale

1 0.402 0.824 0.488 drs

2 1.000 1.000 1.000 -

3 0.827 1.000 0.827 irs

4 0.398 0.408 0.977 irs

mean 0.657 0.808 0.823

Note: crste = technical efficiency from CRS DEA

vrste = technical efficiency from VRS DEA

scale = scale efficiency = crste/vrste

Note also that all subsequent tables refer to VRS results

SUMMARY OF OUTPUT SLACKS:

firm output:	1	2
1	0.000	723975.276
2	0.000	0.000
3	0.000	0.000
4	0.000	652263.511

mean 0.000 344059.697

SUMMARY OF INPUT SLACKS:

firm input:	1	2
1	5795294.00013427017.000	
2	0.000	0.000
3	0.000	0.000
4	0.00012330086.283	
mean	1448823.500	6439275.821

SUMMARY OF PEERS:

firm peers:	
1	2
2	2
3	3
4	3 2

SUMMARY OF PEER WEIGHTS:
(in same order as above)

firm peer weights:		
1	1.000	
2	1.000	
3	1.000	
4	0.162	0.838

PEER COUNT SUMMARY:
(i.e., no. times each firm is a peer for another)

firm peer count:	
1	0
2	2
3	1
4	0

SUMMARY OF OUTPUT TARGETS:

firm output:	1	2
1	57713538.00048868386.000	
2	57713538.00048868386.000	
3	23661022.00021988197.000	
4	52205627.67744520581.847	

SUMMARY OF INPUT TARGETS:

firm input:	1	2
1	5524547.000	6150740.000
2	5524547.000	6150740.000
3	3004898.000	4810217.000
4	5117000.000	5933913.717

FIRM BY FIRM RESULTS:

Results for firm: 1

Technical efficiency = 0.824

Scale efficiency = 0.488 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	47583953.000	10129585.000	0.000	57713538.000
output	2	39694350.000	8450060.724	723975.276	48868386.000
input	1	11319841.000	0.000	-5795294.000	5524547.000
input	2	19577757.000	0.000	-13427017.000	6150740.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
2	1.000	

Results for firm: 2

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	57713538.000	0.000	0.000	57713538.000
output	2	48868386.000	0.000	0.000	48868386.000
input	1	5524547.000	0.000	0.000	5524547.000
input	2	6150740.000	0.000	0.000	6150740.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
2	1.000	

Results for firm: 3

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 0.827 (irs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original	radial	slack	projected
		value	movement	movement	value
output	1	23661022.000	0.000	0.000	23661022.000
output	2	21988197.000	0.000	0.000	21988197.000
input	1	3004898.000	0.000	0.000	3004898.000
input	2	4810217.000	0.000	0.000	4810217.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
3	1.000	

Results for firm: 4

Technical efficiency = 0.408

Scale efficiency = 0.977 (irs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original	radial	slack	projected
		value	movement	movement	value
output	1	21296000.000	30909627.677	0.000	52205627.677
output	2	17895000.000	25973318.336	652263.511	44520581.847
input	1	5117000.000	0.000	0.000	5117000.000
input	2	18264000.000	0.000	-12330086.283	5933913.717

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
3	0.162	
2	0.838	

Tahun 2011

Results from DEAP Version 2.1

Instruction file = eq-ins11.txt

Data file = eq-dta11.txt

Output orientated DEA

Scale assumption: VRS

Slacks calculated using multi-stage method

EFFICIENCY SUMMARY:

firm	crste	vrste	scale
------	-------	-------	-------

1	0.704	1.000	0.704 drs
---	-------	-------	-----------

2	1.000	1.000	1.000 -
---	-------	-------	---------

3 0.876 1.000 0.876 irs
4 1.000 1.000 1.000 -

mean 0.895 1.000 0.895

Note: crste = technical efficiency from CRS DEA
vrste = technical efficiency from VRS DEA
scale = scale efficiency = crste/vrste

Note also that all subsequent tables refer to VRS results

SUMMARY OF OUTPUT SLACKS:

firm output:	1	2
1	0.000	0.000
2	0.000	0.000
3	0.000	0.000
4	0.000	0.000
mean	0.000	0.000

SUMMARY OF INPUT SLACKS:

firm input:	1	2
1	0.000	0.000
2	0.000	0.000
3	0.000	0.000
4	0.000	0.000
mean	0.000	0.000

SUMMARY OF PEERS:

firm peers:	
1	1
2	2
3	3
4	4

SUMMARY OF PEER WEIGHTS: (in same order as above)

firm peer weights:

1 1.000
 2 1.000
 3 1.000
 4 1.000

PEER COUNT SUMMARY:

(i.e., no. times each firm is a peer for another)

firm peer count:

1 0
 2 0
 3 0
 4 0

SUMMARY OF OUTPUT TARGETS:

firm output:	1	2
1	61099865.000	52786409.000
2	74971733.000	51393581.000
3	32986950.000	21998197.000
4	25600714.000	22074368.000

SUMMARY OF INPUT TARGETS:

firm input:	1	2
1	13600951.000	18325107.000
2	9440497.000	11788762.000
3	5112836.000	5919220.000
4	3204384.000	10457067.000

FIRM BY FIRM RESULTS:

Results for firm: 1

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 0.704 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	61099865.000	0.000	0.000	61099865.000
output	2	52786409.000	0.000	0.000	52786409.000
input	1	13600951.000	0.000	0.000	13600951.000

input 2 18325107.000 0.000 0.000 18325107.000

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight
1 1.000

Results for firm: 2

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	74971733.000	0.000	0.000	74971733.000
output	2	51393581.000	0.000	0.000	51393581.000
input	1	9440497.000	0.000	0.000	9440497.000
input	2	11788762.000	0.000	0.000	11788762.000

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight
2 1.000

Results for firm: 3

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 0.876 (irs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	32986950.000	0.000	0.000	32986950.000
output	2	21998197.000	0.000	0.000	21998197.000
input	1	5112836.000	0.000	0.000	5112836.000
input	2	5919220.000	0.000	0.000	5919220.000

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight
3 1.000

Results for firm: 4

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	25600714.000	0.000	0.000	25600714.000
output	2	22074368.000	0.000	0.000	22074368.000
input	1	3204384.000	0.000	0.000	3204384.000
input	2	10457067.000	0.000	0.000	10457067.000

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight

4 1.000

Tahun 2012

Results from DEAP Version 2.1

Instruction file = eq-ins12.txt

Data file = eq-dta12.txt

Output orientated DEA

Scale assumption: VRS

Slacks calculated using multi-stage method

EFFICIENCY SUMMARY:

firm crste vrste scale

1 0.814 0.840 0.969 drs

2 1.000 1.000 1.000 -

3 1.000 1.000 1.000 -

4 0.984 1.000 0.984 irs

mean 0.949 0.960 0.988

Note: crste = technical efficiency from CRS DEA

vrste = technical efficiency from VRS DEA

scale = scale efficiency = crste/vrste

Note also that all subsequent tables refer to VRS results

SUMMARY OF OUTPUT SLACKS:

firm output:	1	2
1	0.00077010791	0.444
2	0.000	0.000
3	0.000	0.000
4	0.000	0.000

mean 0.00019252697.861

SUMMARY OF INPUT SLACKS:

firm input:	1	2
1	391959.000	3690714.000
2	0.000	0.000
3	0.000	0.000
4	0.000	0.000
mean	97989.750	922678.500

SUMMARY OF PEERS:

firm peers:	1	2
1	2	
2	2	
3	3	
4	4	

SUMMARY OF PEER WEIGHTS:
(in same order as above)

firm peer weights:	1	2
1	1.000	
2	1.000	
3	1.000	
4	1.000	

PEER COUNT SUMMARY:
(i.e., no. times each firm is a peer for another)

firm peer count:	1	2
1	0	
2	1	
3	0	
4	0	

SUMMARY OF OUTPUT TARGETS:

firm output:	1	2
1	98273159.00085901862.000	
2	98273159.00085901862.000	
3	40387972.00036019080.000	
4	35721419.00023491639.000	

SUMMARY OF INPUT TARGETS:

firm input:	1	2
1	12090701.000	16643460.000
2	12090701.000	16643460.000
3	5013782.000	3853478.000
4	4465177.000	11927046.000

FIRM BY FIRM RESULTS:

Results for firm: 1

Technical efficiency = 0.840

Scale efficiency = 0.969 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	82553076.000	15720083.000	0.000	98273159.000
output	2	7468827.000	1422243.556	77010791.444	85901862.000
input	1	12482660.000	0.000	-391959.000	12090701.000
input	2	20334174.000	0.000	-3690714.000	16643460.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
2	1.000	

Results for firm: 2

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	98273159.000	0.000	0.000	98273159.000
output	2	85901862.000	0.000	0.000	85901862.000
input	1	12090701.000	0.000	0.000	12090701.000
input	2	16643460.000	0.000	0.000	16643460.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
2	1.000	

Results for firm: 3

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original	radial	slack	projected
----------	--	----------	--------	-------	-----------

		value	movement	movement	value
output	1	40387972.000	0.000	0.000	40387972.000
output	2	36019080.000	0.000	0.000	36019080.000
input	1	5013782.000	0.000	0.000	5013782.000
input	2	3853478.000	0.000	0.000	3853478.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
3	1.000	

Results for firm: 4

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 0.984 (irs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original	radial	slack	projected
		value	movement	movement	value
output	1	35721419.000	0.000	0.000	35721419.000
output	2	23491639.000	0.000	0.000	23491639.000
input	1	4465177.000	0.000	0.000	4465177.000
input	2	11927046.000	0.000	0.000	11927046.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
4	1.000	

Tahun 2013

Results from DEAP Version 2.1

Instruction file = eq-ins13.txt

Data file = eq-dta13.txt

Output orientated DEA

Scale assumption: VRS

Slacks calculated using multi-stage method

EFFICIENCY SUMMARY:

firm	crste	vrste	scale
------	-------	-------	-------

1	0.762	0.791	0.963 drs
---	-------	-------	-----------

2	0.955	1.000	0.955 drs
---	-------	-------	-----------

3	1.000	1.000	1.000 -
---	-------	-------	---------

4	0.557	0.569	0.979 drs
---	-------	-------	-----------

mean	0.819	0.840	0.974
------	-------	-------	-------

Note: crste = technical efficiency from CRS DEA
 vrste = technical efficiency from VRS DEA
 scale = scale efficiency = crste/vrste

Note also that all subsequent tables refer to VRS results

SUMMARY OF OUTPUT SLACKS:

firm output:	1	2
1	0.00075956909	0.065
2	0.000	0.000
3	0.000	0.000
4	0.000	4212126.729
mean	0.00020042258.948	

SUMMARY OF INPUT SLACKS:

firm input:	1	2
1	0.000	7316292.804
2	0.000	0.000
3	0.000	0.000
4	0.000	7121626.571
mean	0.000 3609479.844	

SUMMARY OF PEERS:

firm peers:		
1	3	2
2	2	
3	3	
4	3	2

SUMMARY OF PEER WEIGHTS:
 (in same order as above)

firm peer weights:		
1	0.354	0.646
2	1.000	
3	1.000	
4	0.745	0.255

PEER COUNT SUMMARY:

(i.e., no. times each firm is a peer for another)

firm peer count:

1	0
2	2
3	2
4	0

SUMMARY OF OUTPUT TARGETS:

firm output:

	1	2
1	98255710.00986881558.974	
2	*****	
3	50741735.00045068566.000	
4	69499445.26461575625.393	

SUMMARY OF INPUT TARGETS:

firm input:

	1	2
1	12122312.00019286273.196	
2	15466037.00027469741.000	
3	6030097.000 4376122.000	
4	8435200.00010262396.429	

FIRM BY FIRM RESULTS:

Results for firm: 1

Technical efficiency = 0.791

Scale efficiency = 0.963 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	77742418.000	20513292.009	0.000	98255710.009
output 2	8643861.000	2280788.910	75956909.065	86881558.974
input 1	12122312.000	0.000	0.000	12122312.000
input 2	26602566.000	0.000	-7316292.804	19286273.196

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
3	0.354	

2 0.646

Results for firm: 2

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 0.955 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	124333855.000	0.000	0.000	124333855.000
output	2	109830708.000	0.000	0.000	109830708.000
input	1	15466037.000	0.000	0.000	15466037.000
input	2	27469741.000	0.000	0.000	27469741.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
2	1.000	

Results for firm: 3

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	50741735.000	0.000	0.000	50741735.000
output	2	45068566.000	0.000	0.000	45068566.000
input	1	6030097.000	0.000	0.000	6030097.000
input	2	4376122.000	0.000	0.000	4376122.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
3	1.000	

Results for firm: 4

Technical efficiency = 0.569

Scale efficiency = 0.979 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	39525687.000	29973758.264	0.000	69499445.264
output	2	32623738.000	24739760.664	4212126.729	61575625.393
input	1	8435200.000	0.000	0.000	8435200.000
input	2	17384023.000	0.000	-7121626.571	10262396.429

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
3	0.745	
2	0.255	

Tahun 2014

Results from DEAP Version 2.1

Instruction file = eq-ins14.txt

Data file = eq-dta14.txt

Output orientated DEA

Scale assumption: VRS

Slacks calculated using multi-stage method

EFFICIENCY SUMMARY:

firm crste vrste scale

1	1.000	1.000	1.000	-
2	0.674	1.000	0.674	drs
3	1.000	1.000	1.000	-
4	0.317	0.405	0.783	drs

mean 0.748 0.851 0.864

Note: crste = technical efficiency from CRS DEA

vrste = technical efficiency from VRS DEA

scale = scale efficiency = crste/vrste

Note also that all subsequent tables refer to VRS results

SUMMARY OF OUTPUT SLACKS:

firm output:	1	2
1	0.000	0.000
2	0.000	0.000
3	0.000	0.000
4	0.00014406045	0.802

mean 0.000 3601511.450

SUMMARY OF INPUT SLACKS:

firm input:	1	2
1	0.000	0.000

2	0.000	0.000
3	0.000	0.000
4	263562.987	0.000
mean	65890.747	0.000

SUMMARY OF PEERS:

firm peers:

1	1
2	2
3	3
4	1 2

SUMMARY OF PEER WEIGHTS:

(in same order as above)

firm peer weights:

1	1.000
2	1.000
3	1.000
4	0.590 0.410

PEER COUNT SUMMARY:

(i.e., no. times each firm is a peer for another)

firm peer count:

1	1
2	1
3	0
4	0

SUMMARY OF OUTPUT TARGETS:

firm output:	1	2
1	80596311.000	80361168.000
2	*****	
3	50741735.000	45068566.000
4	99211809.634	99017833.511

SUMMARY OF INPUT TARGETS:

firm input:	1	2
1	6329814.000	14515586.000
2	15465373.000	32556347.000
3	6030097.000	4376122.000
4	10076252.013	21913994.000

FIRM BY FIRM RESULTS:

Results for firm: 1

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	80596311.000	0.000	0.000	80596311.000
output	2	80361168.000	0.000	0.000	80361168.000
input	1	6329814.000	0.000	0.000	6329814.000
input	2	14515586.000	0.000	0.000	14515586.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
1	1.000	

Results for firm: 2

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 0.674 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	125989558.000	0.000	0.000	125989558.000
output	2	125854799.000	0.000	0.000	125854799.000
input	1	15465373.000	0.000	0.000	15465373.000
input	2	32556347.000	0.000	0.000	32556347.000

LISTING OF PEERS:

peer	lambda	weight
2	1.000	

Results for firm: 3

Technical efficiency = 1.000

Scale efficiency = 1.000 (crs)

PROJECTION SUMMARY:

variable		original value	radial movement	slack movement	projected value
output	1	50741735.000	0.000	0.000	50741735.000

output 2 45068566.000 0.000 0.000 45068566.000
input 1 6030097.000 0.000 0.000 6030097.000
input 2 4376122.000 0.000 0.000 4376122.000

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight
3 1.000

Results for firm: 4

Technical efficiency = 0.405

Scale efficiency = 0.783 (drs)

PROJECTION SUMMARY:

variable	original value	radial movement	slack movement	projected value
output 1	40133631.000	59078178.634	0.000	99211809.634
output 2	34227561.000	50384226.709	14406045.802	99017833.511
input 1	10339815.000	0.000	-263562.987	10076252.013
input 2	21913994.000	0.000	0.000	21913994.000

LISTING OF PEERS:

peer lambda weight
1 0.590
2 0.410

Uji Korelasi

Correlations

			y	x1	x2	x3
Kendall's tau_b	y	Correlation Coefficient	1.000	.236	-.411*	.114
		Sig. (2-tailed)	.	.241	.026	.501
		N	20	20	20	20
	x1	Correlation Coefficient	.236	1.000	-.707**	.075
		Sig. (2-tailed)	.241	.	.001	.694
		N	20	20	20	20
	x2	Correlation Coefficient	-.411*	-.707**	1.000	.024

		Sig. (2-tailed)	.026	.001	.	.893
		N	20	20	20	20
x3		Correlation Coefficient	.114	.075	.024	1.000
		Sig. (2-tailed)	.501	.694	.893	.
		N	20	20	20	20
Spearman's rho	y	Correlation Coefficient	1.000	.269	-.473*	.158
		Sig. (2-tailed)	.	.252	.035	.505
		N	20	20	20	20
	x1	Correlation Coefficient	.269	1.000	-.775**	.090
		Sig. (2-tailed)	.252	.	.000	.706
		N	20	20	20	20
	x2	Correlation Coefficient	-.473*	-.775**	1.000	.039
		Sig. (2-tailed)	.035	.000	.	.871
		N	20	20	20	20
	x3	Correlation Coefficient	.158	.090	.039	1.000
		Sig. (2-tailed)	.505	.706	.871	.
		N	20	20	20	20

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Curriculum Vitae

Nama : Sri w\Wahyuni, S.E.
TTL :29-08-198
Mobile Phone : 0813-559-1589
Email : uniceconomic@gmail.com
Agama : Islam
Alamat sekarang : Jln. Petung gang Mushollah no 3A
Alamat Asal : Jln. Ance dg Ngoyo 3 No. 8A
Pendidikan Terakhir : S1 Ilmu Ekonomi- Universitas Hasanuddin

Riwayat Pendidikan:

1. SD Inpres Tamamaung II Makassar
2. SMP Negeri 8 Makassar
3. SMA Negeri 16 Makassar
4. Universitas Hasanuddin, Makassar

Pengalaman Organisasi:

1. Pengurus KSEI FoSEI Unhas
2. Pengurus HIMAJIE Unhas
3. Pengurus Depnas Fossei
4. Pengurus PSHI Fak Hukum UII